

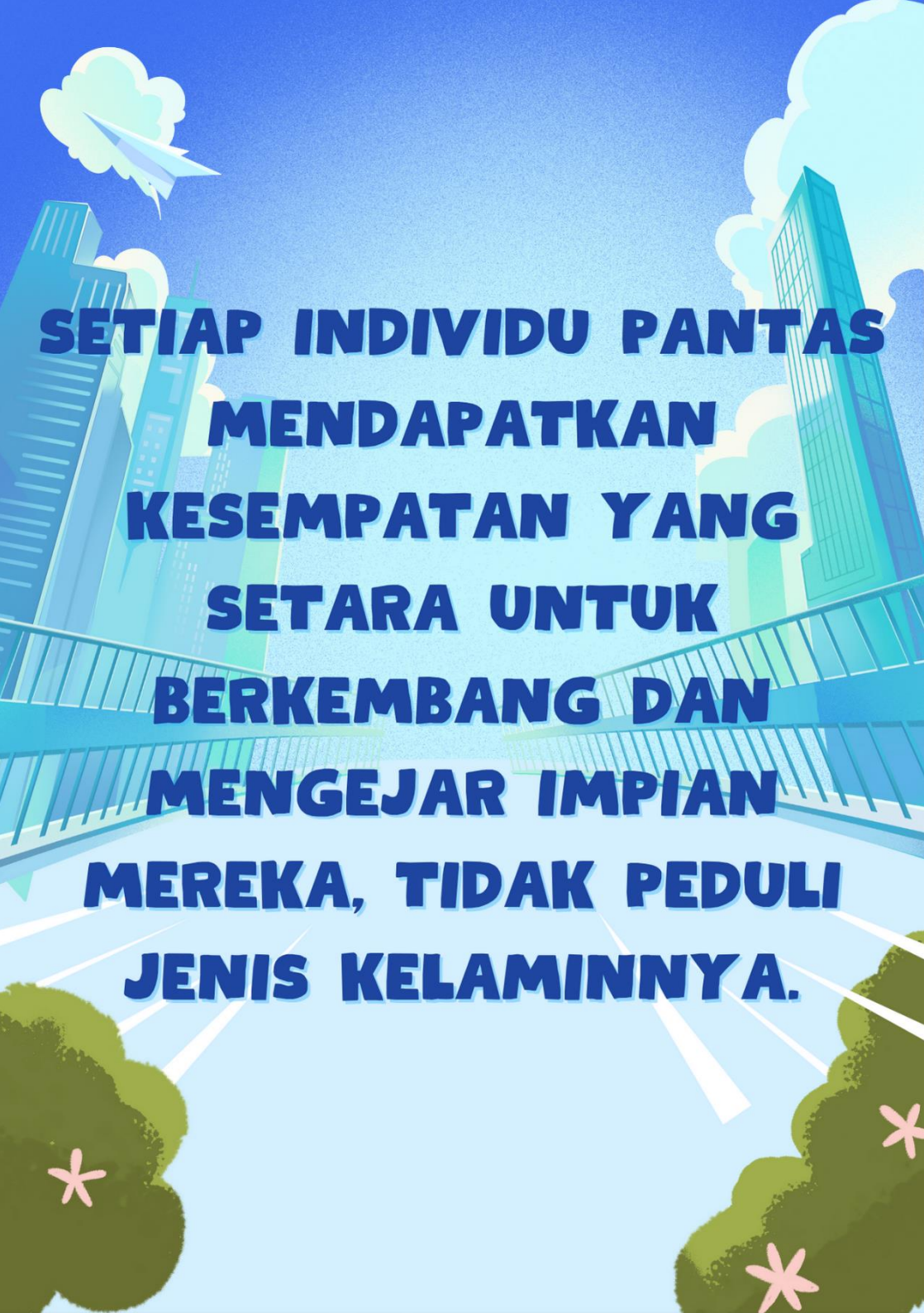


# PROFIL GENDER KOTA BOGOR 2025

KERJA SAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR  
DENGAN PT ANALISIS JAYA SETIAWAN

**KESETARAAN GENDER  
MENCIPTAKAN RUANG  
BAGI LAKI-LAKI DAN  
PEREMPUAN UNTUK  
TUMBUH DAN  
MEMPEROLEH HAK  
YANG SAMA**





**SETIAP INDIVIDU PANTAS  
MENDAPATKAN  
KESEMPATAN YANG  
SETARA UNTUK  
BERKEMBANG DAN  
MENGEJAR IMPIAN  
MEREKA, TIDAK PEDULI  
JENIS KELAMINNYA.**

# **KATA PENGANTAR**



## KATA PENGANTAR

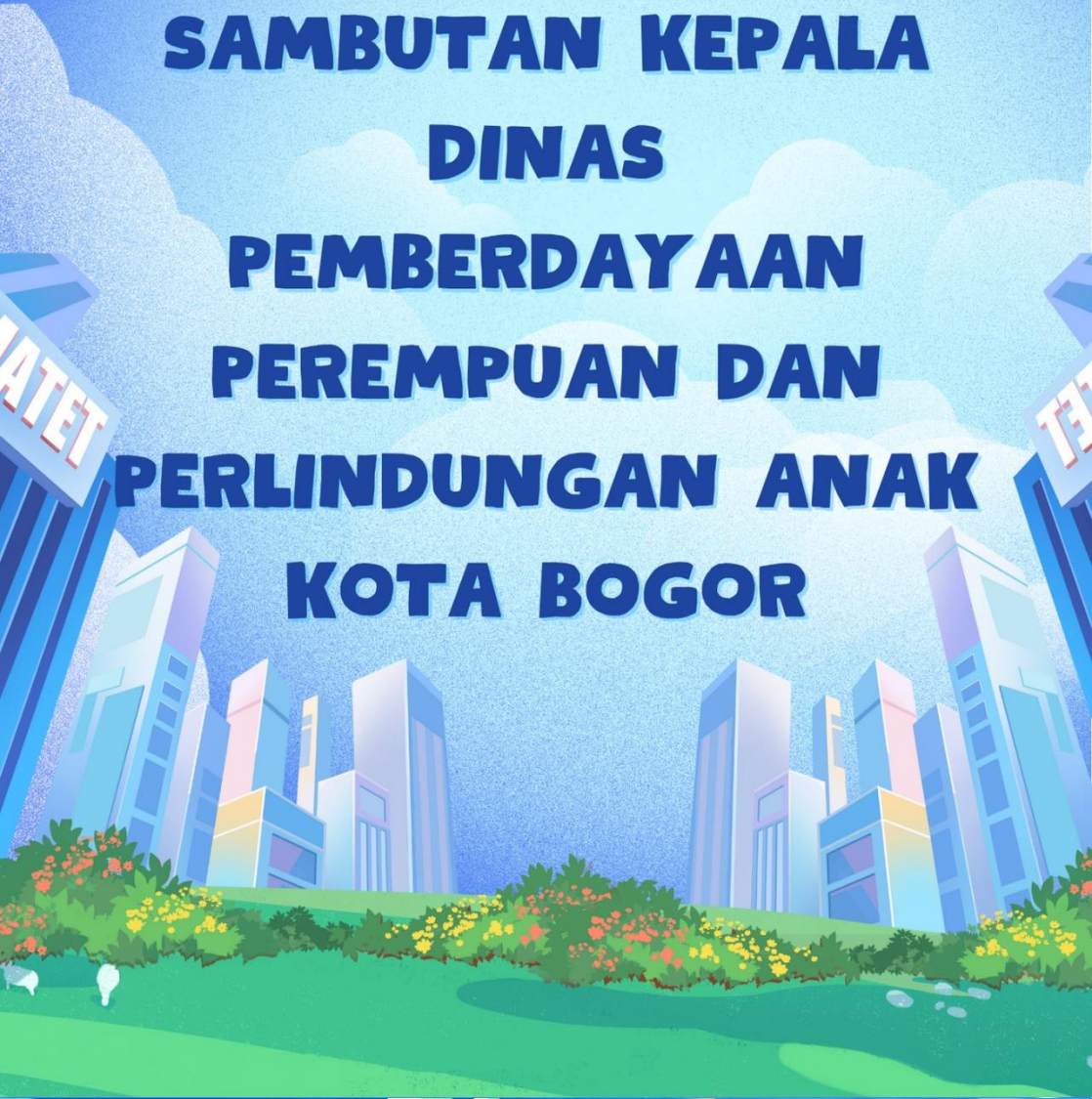
Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat-Nya DPPPA Kota Bogor kembali dapat menyusun Profil Gender Kota Bogor sebagaimana yang dilakukan setiap tahunnya. Meskipun dalam proses penyusunan ini kami menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam memperoleh data serta ketidaksesuaian format antar perangkat daerah, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk menyelesaikan buku ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 1) DPPPA Kota Bogor atas kerja samanya dengan PKGA IPB University; 2) Seluruh pimpinan dan staf perangkat daerah di Kota Bogor yang telah memberikan dukungan, memfasilitasi, dan menyediakan data serta informasi selama pelaksanaan survei lapangan; 3) Seluruh tim dan para asisten yang, di tengah kesibukan masing-masing, tetap berkomitmen dan bekerja keras untuk mewujudkan karya yang sangat bermanfaat ini.

Semoga Buku Profil Gender Kota Bogor Tahun 2025 ini dapat menjadi sebuah referensi yang berguna bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam mengatasi kelangkaan data terpilah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang responsif gender. Kami sangat

menghargai kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penyusunan profil ini di masa mendatang.

**Tim Penyusun**



**SAMBUTAN KEPALA  
DINAS  
PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA BOGOR**

# **SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA BOGOR**

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Buku Profil Gender Kota Bogor Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk menyajikan data statistik terpilah yang memberikan gambaran mengenai kondisi gender di Kota Bogor dengan memperhatikan dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender.

Buku ini juga menyajikan data tentang capaian pembangunan di berbagai bidang, termasuk beragam permasalahan dan berbagai upaya, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya, hingga masyarakat umum yang bergerak bersama-sama, bersinergi,

berkolaborasi, dan memperkuat komitmen demi mencapai peningkatan kualitas hidup perempuan untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dalam bingkai kesetaraan gender.

Kehadiran buku Profil Gender Kota Bogor Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruh pihak baik pemerintah daerah, lembaga ataupun mitra dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran, bermanfaat dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kota Bogor.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi/lembaga, dan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan penyusunan buku Profil Gender Kota Bogor Tahun 2025.

Akhirnya saran dan kritik yang mengarah pada perbaikan penyajian data gender yang lebih komprehensif untuk tahun selanjutnya, tetap kami harapkan.

**Kepala Dinas  
Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak Kota  
Bogor,**



**Dra. RAKHMAWATI M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197010171990032002

# SUMMARY

Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH), selama periode 2020–2024, meningkatkan cukup tinggi. Yakni pada Laki-laki dari 71,74 tahun menjadi 72,89 tahun, sementara Perempuan dari 75,44 tahun menjadi 76,69 tahun.



Dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terdapat peningkatan, Yakni kesenjangan pada laki-laki mencapai 83,71% sementara perempuan mencapai 50,69%. Selain itu, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama lima tahun terakhir—dari 12,68% menjadi 8,13%.



Perempuan masih menghadapi kesenjangan representasi di sektor politik Kota Bogor. Meski hadir di seluruh komisi DPRD, proporsinya masih rendah. Komisi II dan III didominasi laki-laki (lebih dari 78%), sementara Komisi IV lebih terbuka bagi perempuan, namun belum setara. Ketimpangan juga tampak dalam Musrenbang, di mana partisipasi perempuan hanya sekitar 27–39% di tiap kecamatan



Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk SD s/d SMP telah mencapai 90%. Perempuan menunjukkan partisipasi yang tinggi dibanding laki-laki pada seluruh jenjang.



Bidang kesehatan kunjungan ibu hamil K1 dan K4 mencapai 100%. Cakupan pemberian tablet zat besi (Fe) mencapai 98-101%. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan mencapai 100% pada seluruh kekecamatan

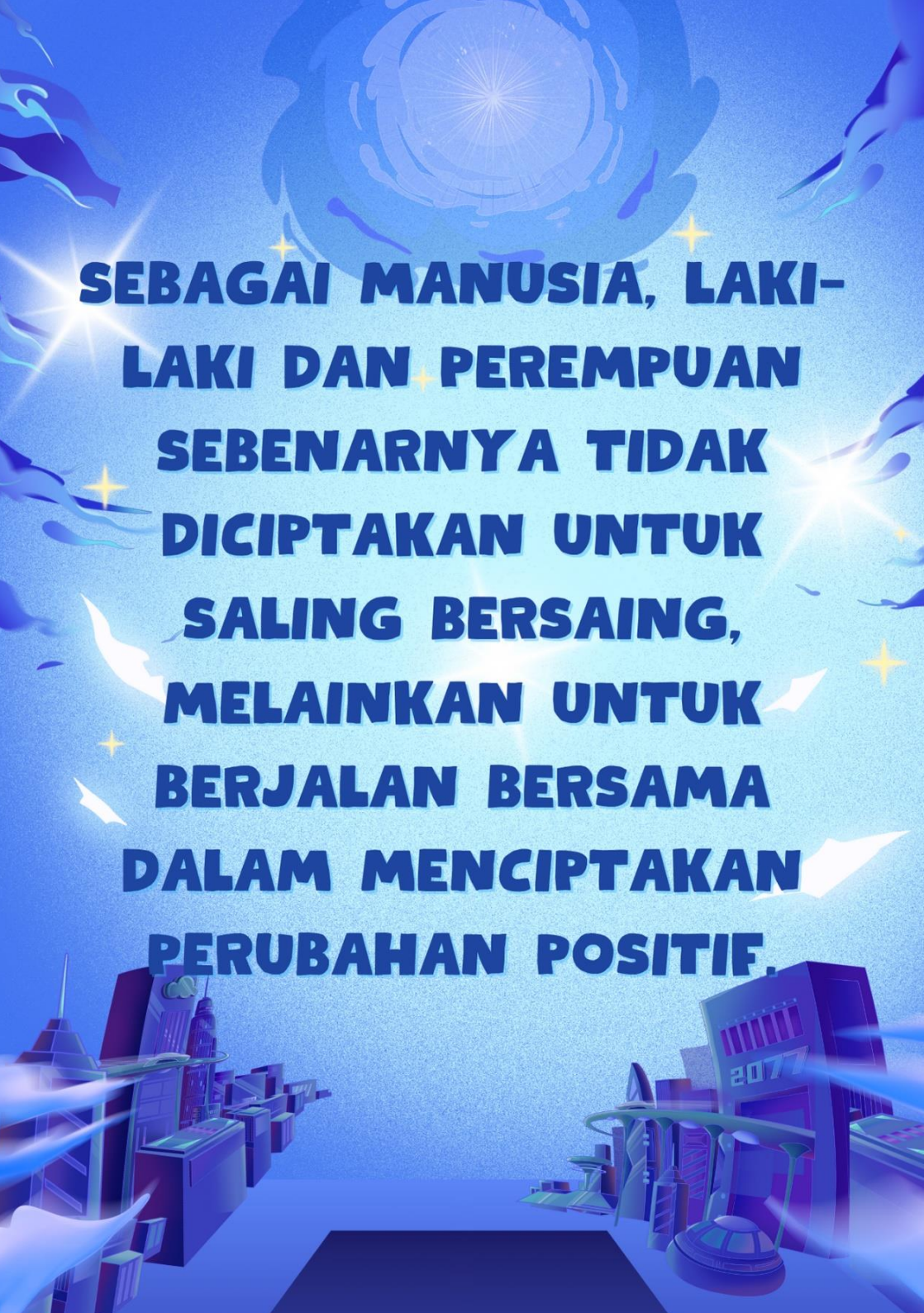


Pada tahun ini juga tercatat 39 kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat kota, dengan distribusi paling tinggi di Bogor Barat, Bogor Selatan, dan Tanah Sareal.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, nilai IPM 78,52, naik dari 77,85 pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini telah melampaui rata-rata provinsi dan nasional





**SEBAGAI MANUSIA, LAKI-  
LAKI DAN PEREMPUAN  
SEBENARNYA TIDAK  
DICIPTAKAN UNTUK  
SALING BERSAING,  
MELAINKAN UNTUK  
BERJALAN BERSAMA  
DALAM MENCIPTAKAN  
PERUBAHAN POSITIF.**

# DAFTAR ISI

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                      | V    |
| <b>SAMBUTAN KEPALA DP3A KOTA BOGOR</b>                                     | Viii |
| <b>EKSECUTIVE SUMMARY</b>                                                  | X    |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                          | Xii  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                                        | Xvi  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                                       |      |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                                                      | 1    |
| 1.1 Latar Belakang                                                         | 1    |
| 1.2 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan                                       | 4    |
| 1.3 Lingkup Kegiatan                                                       | 6    |
| 1.4 Pelaksanaan Studi                                                      | 10   |
| 1.5 Konsep-Konsep Berkaitan Dengan Data Gender                             | 21   |
| <b>II. PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN</b>                             | 27   |
| 2.1 Konsep Gender                                                          | 27   |
| 2.2 Pembangunan Berperspektif Gender                                       | 35   |
| <b>III. GAMBARAN UMUM KOTA DAN MASYARAKAT KOTA BOGOR</b>                   | 41   |
| 3.1 Visi dan Misi Kota Bogor                                               | 42   |
| 3.2 Gambaran Umum Geografis dan Administratif Kota Bogor                   | 47   |
| 3.3 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin                                     | 49   |
| 3.4 Penduduk Berdasarkan Agama                                             | 52   |
| 3.5 Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin                              | 56   |
| 3.6 Penduduk Berdasarkan Pendidikan                                        | 60   |
| 3.7 Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Jenis Kelamin per Kecamatan | 67   |

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| <b>IV. PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN</b>                  | 73  |
| 4.1 Partisipasi Sekolah                                     | 74  |
| 4.2 APK, APM, dan APS                                       | 77  |
| 4.3 Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin   | 86  |
| <b>V. PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN</b>                    | 93  |
| 5.1 Angka Harapan Hidup                                     | 93  |
| 5.2 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)                             | 96  |
| 5.3 Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)            | 99  |
| 5.4 Pertolongan Persalinan                                  | 102 |
| 5.5 Peserta KB Aktif                                        | 104 |
| <b>VI. PROFIL GENDER BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN</b> | 110 |
| 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                      | 110 |
| 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka                            | 112 |
| 6.3 Penduduk Miskin                                         | 114 |
| 6.4 Pemohon Kartu Kuning                                    | 118 |
| 6.5 Koperasi                                                | 120 |
| <b>VII. PROFIL GENDER BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA</b>    | 127 |
| 7.1 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)                       | 127 |
| 7.2 Penyandang Disabilitas                                  | 134 |
| 7.3 Taman dan Ruang Terbuka Hijau                           | 137 |
| <b>VIII. PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN</b>  | 141 |
| 8.1 Aparatur Sipil Negara                                   | 142 |
| 8.2 Dewan Perwakilan Rakyat                                 | 148 |
| 8.3 Musrembang                                              | 160 |
| <b>IX. TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN</b>              | 165 |

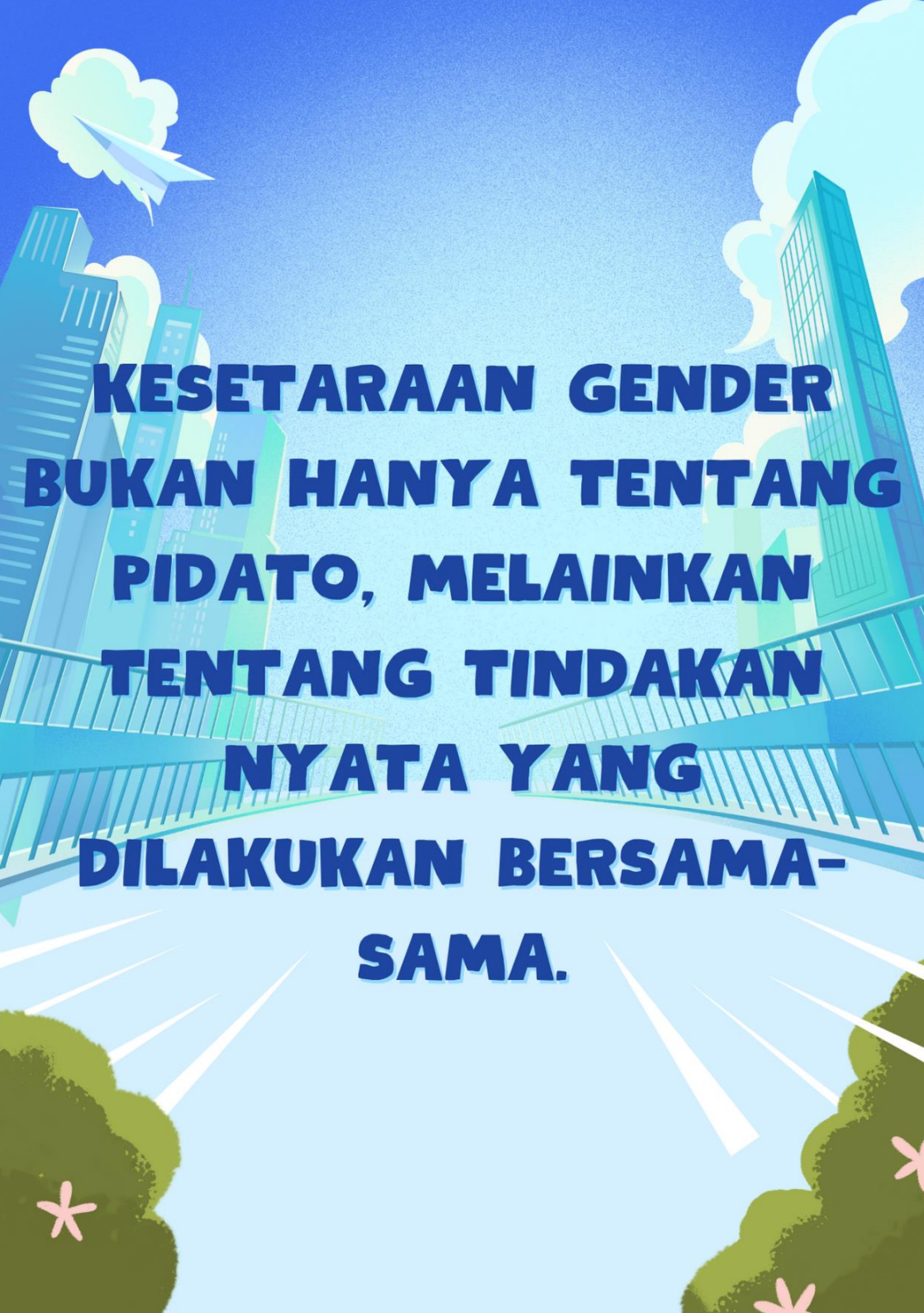
|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1 KDRT dan Kekerasan Seksual                                                                                             | 166 |
| 9.2 Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan                                                                           | 169 |
| 9.3 Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Usia                                                                             | 172 |
| 9.4 Korban Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan                                                                        | 175 |
| 9.5 Korban Kekerasan Berdasarkan Status Pekerjaan                                                                          | 177 |
| 9.6 Pelaku Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan                                                                        | 180 |
| 9.7 Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan Dengan Korban                                                                    | 183 |
| <b>X. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INDEKS PEMBANGUNAN GENDER, INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER, DAN INDEKS KETIMPANGAN GENDER</b> | 187 |
| 10.1 Indeks Pembangunan Manusia                                                                                            | 187 |
| 10.2 Indeks Pembangunan Gender                                                                                             | 192 |
| 10.3 Indeks Pemberdayaan Gender                                                                                            | 197 |
| 10.4 Indeks Ketimpangan Gender                                                                                             | 202 |
| <b>XI. 5PENUTUP: REKOMENDASI KEBIJAKAN</b>                                                                                 | 209 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                      | 217 |

**KESETARAAN BUKAN  
DALAM HAL YANG  
BERBEDA DENGAN CARA  
YANG SAMA,  
KESETARAAN DALAM HAL  
YANG BERBEDA SECARA  
BERBEDA.**



## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                   |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Data Gender dan Anak Berdasarkan Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2023                                   | 13 |
| Tabel 3.1 | Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Status Perkawinan, Jenis Kelamin, dan Kecamatan | 71 |



**KESETARAAN GENDER  
BUKAN HANYA TENTANG  
PIDATO, MELAINKAN  
TENTANG TINDAKAN  
NYATA YANG  
DILAKUKAN BERSAMA-  
SAMA.**

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                                          |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Rancangan Pelaksanaan PUG                                                                | 39 |
| Gambar 3.1 | Luas Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Kecamatan                                  | 48 |
| Gambar 3.2 | Persentase Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin                      | 50 |
| Gambar 3.3 | Persentase Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan        | 51 |
| Gambar 3.4 | Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Agama                                  | 53 |
| Gambar 3.5 | Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin                | 54 |
| Gambar 3.6 | Persentase Kepala Keluarga Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin               | 57 |
| Gambar 3.7 | Persentase Kepala Keluarga Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan | 58 |
| Gambar 3.8 | Persentase Kepala Keluarga Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 per Kecamatan                 | 59 |

|             |                                                                                                |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.9  | Persentase Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan                               | 61 |
| Gambar 3.10 | Persentase Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Kecamatan | 63 |
| Gambar 3.11 | Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Status Kawin dan Jenis Kelamin               | 68 |
| Gambar 4.1  | Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Bogor 2024                               | 76 |
| Gambar 4.2  | Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bogor 2024                             | 76 |
| Gambar 4.3  | Persentase APK Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin          | 78 |
| Gambar 4.4  | Persentase APM Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin          | 81 |
| Gambar 4.5  | Persentase APS Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin          | 84 |

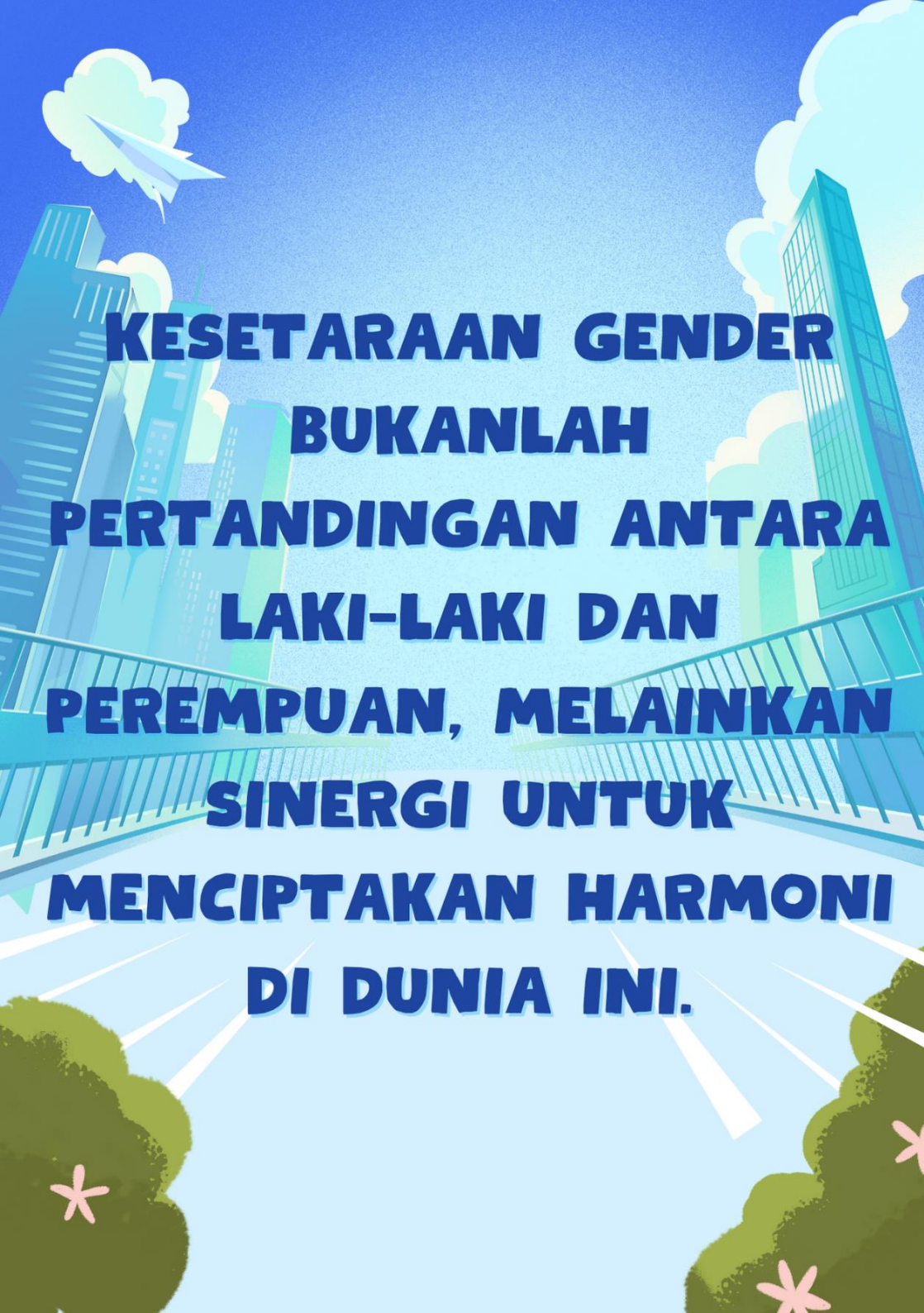
|            |                                                                                         |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 4.6 | Persentase Guru Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin  | 87  |
| Gambar 5.1 | Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin            | 95  |
| Gambar 5.2 | Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) Kota Bogor Tahun 2024 per Kecamatan          | 98  |
| Gambar 5.3 | Persentase Cakupan Tablet Zat Besi pada Ibu Hamil Kota Bogor Tahun 2024 per Kecamatan   | 101 |
| Gambar 5.4 | Persentase Cakupan Persalinan di Fasyankes Kota Bogor Tahun 2024 per Kecamatan          | 103 |
| Gambar 5.5 | Persentase Cakupan Peserta KB Aktif Kota Bogor Tahun 2024 per Kecamatan                 | 105 |
| Gambar 5.6 | Persentase Peserta KB Aktif Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Metode Kontrasepsi Modern | 107 |
| Gambar 6.1 | Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor Tahun 2024                   | 111 |
| Gambar     | Perkembangan Tingkat                                                                    | 113 |

|            |                                                                                                        |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.2        | Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2024                                                             |     |
| Gambar 6.3 | Perkembangan Penduduk Miskin Kota Bogor Tahun 2024                                                     | 116 |
| Gambar 6.4 | Persentase Pemohon Kartu Kuning Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin                        | 119 |
| Gambar 6.5 | Jumlah Koperasi Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Kecamatan                                            | 121 |
| Gambar 6.6 | Persentase Anggota Koperasi Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan              | 124 |
| Gambar 7.1 | Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin                 | 128 |
| Gambar 7.2 | Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Usia                          | 130 |
| Gambar 7.3 | Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kasus dan Jenis Kelamin | 132 |
| Gambar 7.4 | Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan                      | 135 |

|            |                                                                                             |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|            | Kecamatan                                                                                   |     |
| Gambar 7.5 | Jumlah Taman dan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Kecamatan            | 138 |
| Gambar 8.1 | Persentase ASN Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin                  | 142 |
| Gambar 8.2 | Persentase ASN Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin                 | 144 |
| Gambar 8.3 | Persentase ASN Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin       | 146 |
| Gambar 8.4 | Proporsi Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin    | 148 |
| Gambar 8.5 | Komposisi Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin | 152 |
| Gambar 8.6 | Komposisi Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Komisi dan Jenis Kelamin           | 155 |
| Gambar 8.7 | Komposisi Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin       | 158 |

|            |                                                                                                  |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 8.8 | Persentase Peserta Musrembang Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan      | 161 |
| Gambar 9.1 | Jumlah KDRT dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Kecamatan | 167 |
| Gambar 9.2 | Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kekerasan     | 170 |
| Gambar 9.3 | Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia       | 173 |
| Gambar 9.4 | Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan  | 176 |
| Gambar 9.5 | Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Status Pekerjaan    | 178 |
| Gambar 9.6 | Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan  | 181 |

|             |                                                                                                     |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 9.7  | Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Hubungan Dengan Korban | 184 |
| Gambar 10.1 | Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2020 - 2024                                             | 188 |
| Gambar 10.2 | Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2023 - 2024                                | 190 |
| Gambar 10.3 | Indeks Pembangunan Gender Kota Bogor Tahun 2020 - 2024                                              | 193 |
| Gambar 10.4 | Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Bogor Tahun 2023 - 2024                                 | 195 |
| Gambar 10.5 | Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bogor Tahun 2020 - 2024                                             | 198 |
| Gambar 10.6 | Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bogor Tahun 2023 - 2024                                | 200 |
| Gambar 10.7 | Indeks Ketimpangan Gender Kota Bogor Tahun 2020 - 2024                                              | 203 |
| Gambar 10.8 | Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kota Bogor Tahun 2023 - 2024                                 | 205 |



**KESETARAAN GENDER  
BUKANLAH  
PERTANDINGAN ANTARA  
LAKI-LAKI DAN  
PEREMPUAN, MELAINKAN  
SINERGI UNTUK  
MENCIPTAKAN HARMONI  
DI DUNIA INI.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan utama pembangunan dalam era peradaban yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dewasa ini adalah terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Kesetaraan gender merujuk pada kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki akses dan hak yang setara dalam berbagai peran serta partisipasi di seluruh bidang kehidupan. Pembangunan di Kota Bogor ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui sejumlah indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indikator tersebut meliputi naiknya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, serta berkembangnya sistem jaminan sosial. Selain itu, pembangunan juga ditandai dengan meningkatnya tingkat pendidikan, perbaikan kualitas kesehatan dan gizi, terwujudnya kesetaraan gender,

serta berkurangnya kesenjangan kesejahteraan antar individu maupun kelompok masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender, Pemerintah Kota Bogor telah mengadopsi kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 22 Tahun 2021, yang merupakan revisi atas Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Bogor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi agar program dan kegiatan pemerintah lebih sensitif terhadap perspektif gender. Strategi ini dikenal dengan istilah pengarusutamaan gender, yang dalam pelaksanaannya memerlukan analisis gender sebagai landasan. Oleh karena itu, data dan informasi mengenai isu-isu gender, terutama data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, menjadi sangat

penting untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan gender.

Keberadaan data gender menjadi komponen penting dalam implementasi PUG. Data ini dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan untuk: 1) mengidentifikasi kondisi dan perkembangan perempuan dan laki-laki dalam konteks ruang dan waktu; 2) menilai dampak pembangunan terhadap kedua kelompok tersebut; dan 3) merumuskan serta memilih strategi terbaik yang responsif terhadap kebutuhan, pengalaman, serta permasalahan masing-masing gender.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Untuk menjalankan mandat tersebut, dibentuklah unit kerja dalam bentuk dinas atau badan yang bertanggung jawab menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan serta program terkait. Di

Kota Bogor, mandat ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

## **1.2 Tujuan dan Hasil yang Diharapkan**

Penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2025 pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan data dasar yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, guna menggambarkan capaian pembangunan yang telah diraih, berbagai permasalahan yang masih dihadapi, serta langkah-langkah yang telah dan perlu dilakukan dalam mengatasi isu-isu gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan di Kota Bogor. Penyediaan data ini dimaksudkan untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya, sebagai landasan penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah Kota Bogor. Di samping itu, data ini juga berfungsi sebagai potret situasi pembangunan daerah yang berperspektif gender, yang dapat dijadikan rujukan dalam mendorong tercapainya

pembangunan yang adil di berbagai bidang dan sektor.

Secara lebih rinci, penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2025 dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal berikut: 1) Menyediakan data terpilah berdasarkan gender di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, partisipasi perempuan di ruang publik, serta isu-isu gender spesifik yang relevan dengan kondisi Kota Bogor; 2) Menghadirkan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor maupun unsur masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan perempuan di wilayah tersebut; 3) Menyajikan hasil analisis deskriptif mengenai capaian pembangunan gender di Kota Bogor.

Analisis ini dilakukan menggunakan data sekunder yang tersedia untuk menilai kemajuan indikator pembangunan gender dan pemberdayaan perempuan, termasuk dalam hal partisipasi perempuan di sektor publik, pemerintahan, legislatif,

serta pelibatan mereka dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan di Kota Bogor.

### **1.3 Lingkup Kegiatan**

Penyusunan Penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2025 dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, serta dari lembaga vertikal lainnya, DPRD, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi yang memiliki data relevan. Proses ini difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bogor, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh tim pengambilan data. Penulisan laporan serta analisis data menjadi tanggung jawab tim penyusun yang dikoordinasikan oleh ketua tim.

Data yang dikumpulkan harus terpilah berdasarkan jenis kelamin, baik yang bersifat umum maupun sektoral. Mengacu pada KPP (2009), ruang lingkup data terpilah meliputi: 1) Data kuantitatif

maupun kualitatif yang disusun menurut jenis kelamin (*sex-disaggregated data*), yaitu memisahkan informasi antara laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan; 2) Data dengan variabel-variabel yang sudah dibedakan berdasarkan jenis kelamin sesuai dengan topik atau isu yang dibahas; 3) Data dan informasi yang mencerminkan peran dan kondisi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti tingkat melek huruf, pendidikan, jenis pekerjaan, penghasilan, kepemilikan rumah atau tanah, dan akses terhadap pinjaman serta sumber daya lainnya.

Agar data benar-benar terpilah, diperlukan informasi yang secara eksplisit membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tanpa itu, data tidak dapat dikategorikan secara gender. Oleh sebab itu, deskripsi peran dari masing-masing jenis kelamin juga diperlukan untuk memperkaya isi Profil Gender. Ruang lingkup penyusunan profil ini mencakup seluruh wilayah administratif Kota Bogor, dengan fokus pada kondisi aktual masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, serta penekanan pada

tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Hal ini mencerminkan realitas bahwa hingga saat ini, perempuan masih sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Aspek yang akan dianalisis mencakup kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, sosial budaya, serta bidang politik.

Ruang lingkup kegiatan mencakup:

Pengumpulan data sekunder yang terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) dari berbagai sumber, antara lain:

- a. PD terkait, yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis data yang diperlukan. Berdasarkan ketentuan Permen PPPA No. 3 tahun 2023, instansi yang diharapkan menyediakan data meliputi: Bapperida Kota Bogor, BKPSDM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Diskominfo, Dinas Pertanian, Kesbangpol,

BPBD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pusat Statistik, RSUD, Puskesmas, Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Negeri, Kejaksaan Negeri, Sekretariat DPRD, Lapas, BNN, Polresta Bogor Kota, serta seluruh kantor kecamatan se-Kota Bogor.

b. Lembaga pendukung PUG, seperti Pokja PUG, Sub Gugus Tugas PUG, Forum Komunikasi PUG, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), PAUD, rumah singgah, dan sejenisnya.

c. Sumber data tambahan dari hasil penelitian perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, serta lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Bogor.

Melaksanakan entri dan pengolahan data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi, baik dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif,

untuk kemudian dianalisis dan disajikan sebagai data terpilah gender.

## **1.4 Pelaksanaan Studi**

### **Waktu dan Tempat**

Pelaksanaan kegiatan disepakati berlangsung pada periode April hingga Juli 2025, sesuai dengan kesepakatan bersama DPPP Kota Bogor. Rentang waktu ini mencakup seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari penyusunan proposal, proses pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, hingga tahap revisi laporan. Kegiatan studi akan dilaksanakan di wilayah Kota Bogor, dengan melibatkan PD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor serta instansi terkait lainnya.

### **Pendekatan Studi**

Mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, pengelolaan data gender dilakukan dengan berlandaskan lima prinsip utama, yaitu:

- a. Spesifik, yakni data yang dikumpulkan harus secara jelas menggambarkan

indikator-indikator terkait gender dan anak;

- b. Dapat dipercaya, yaitu pengelolaan data dilakukan secara bertanggung jawab dalam hal kualitas pengumpulan, pengolahan, dan penyajiannya, serta menggunakan metode dan prosedur yang dapat dibuktikan secara ilmiah;
- c. Dapat diukur, artinya data disusun berdasarkan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran statistik yang mengacu pada standar yang berlaku;
- d. Relevan, yakni data yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Berkelanjutan, yang berarti pengelolaan data gender dan anak dilakukan secara

terus-menerus dalam berbagai bidang, program, kegiatan, dan periode waktu.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2025 diarahkan untuk menyediakan data yang bersifat spesifik, akurat, terukur, dan konsisten. Profil ini disusun dengan pendekatan penelitian deskriptif analitis, yang menitikberatkan pada penyediaan data terpilah yang mencerminkan pelayanan kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Penelitian dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisis dua kategori utama data, yaitu data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan data kelembagaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait kesetaraan dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan sektor public apakah terdapat ketimpangan atau kecenderungan berpihak terhadap salah satu kelompok gender. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis untuk peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat Kota Bogor secara keseluruhan.

## Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2025 merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Jenis serta sumber data yang digunakan dalam penyusunan profil ini berasal dari berbagai instansi dan lembaga terkait yang relevan.

Tabel 1.1 Data Gender dan Anak Berdasarkan Permen PPPA Nomor 3 Tahun 2023

| Bidang           | Jenis Data                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sumber Data         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bidang Kesehatan | 1. Angka harapan hidup<br>2. Angka kematian ibu melahirkan<br>3. Penyebab kematian ibu melahirkan<br>4. Cakupan pertolongan persalinan<br>5. Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke posyandu dan puskesmas<br>6. Imunisasi <i>tetanus toxoid</i> (TT) pada ibu hamil<br>7. Ibu hamil yang mendapat tablet zat | Jenis Data:<br>Data |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| an                       | <p>besi (Fe)</p> <p>8. Aborsi pada remaja putri</p> <p>9. Penderita HIV/AIDS</p> <p>10. Keluarga berencana</p> <p>11. Usia perkawinan pertama</p> <p>12. Pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Sekunde<br/>r</p> <p>Sumber<br/>Data:<br/>Dinas<br/>Kesehat<br/>an,<br/>DPPPA,<br/>dan BNN<br/>Kota<br/>Bogor</p> |
| Bidang<br>Pendidik<br>an | <p>1. Angka harapan lama sekolah (HLS)</p> <p>2. Angka rata-rata lama sekolah (RLS)</p> <p>3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia (7-12, 13-15, dan 16-18 tahun)</p> <p>4. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA</p> <p>5. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA</p> <p>6. Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA</p> <p>7. Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan</p> <p>8. Data guru dan siswa serta rasio guru/murid</p> <p>9. Fasilitas pendidikan (sekolah dan</p> | <p>Jenis<br/>Data:<br/>Data<br/>Sekunde<br/>r</p> <p>Sumber<br/>Data:<br/>Dinas<br/>Pendidik<br/>an,</p>             |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | <p>perpustakaan)</p> <p>10. Sekolah luar biasa (SLB)</p> <p>11. Pendidikan kesetaraan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Diskominfo,<br/>Kementerian Agama,<br/>dan<br/>Bappenas</p>                                               |
| <p>Bidang<br/>Ekonomi<br/>dan<br/>Ketenagakerjaan</p> | <p>1. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)</p> <p>2. Perkiraan tingkat daya beli (<i>Purchasing Power Parity</i>)</p> <p>3. Kepala keluarga miskin</p> <p>4. Tenaga kerja migran. Terdiri dari 1) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan 2) Antar Kerja Antar Negara (AKAN)</p> <p>5. Pekerja di sektor formal</p> <p>6. Pekerja di sektor informal</p> <p>7. Usaha mikro dan kecil (UMK)</p> <p>8. Keanggotaan koperasi</p> <p>9. Penerima kredit / pinjaman dari lembaga keuangan</p> <p>10. Pengangguran</p> <p>11. Pekerja tak dibayar (<i>Unpaid Worker</i>)</p> <p>12. Perempuan pekerja profesional dan manajerial</p> <p>13. Pekerja menurut lapangan usaha, status pekerjaan, dan jenis pekerjaan</p> | <p>Jenis Data:<br/>Data Sekunder</p> <p>Sumber Data:<br/>Dinas Tenaga Kerja,<br/>Dinas Sosial,<br/>Dinas</p> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | 14. Kelompok wanita tani dan ternak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Koperasi dan UMKM, Bapperida, dan Dinas Pertanian                                                                                |
| Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan | <p>1. Partisipasi di</p> <p>Lembaga Legislatif: a. Anggota DPRD Provinsi, b. Anggota DPRD Kota</p> <p>2. Partisipasi di Lembaga Yudikatif: a. Jaksa, b. Hakim c. Polisi</p> <p>3. Partisipasi di Lembaga Eksekutif: a. PNS menurut Jabatan Struktural b. PNS menurut Jabatan Fungsional, c. PNS menurut Pangkat dan Golongan, d. Camat, e. Kepala Desa/Lurah</p> <p>4. Pengurus dan Anggota Organisasi Sosial dan Politik: a. Keanggotaan Partai Politik. b. Pengurus Harian Parpol, c. Kaukus Perempuan Politik, d. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan</p> <p>5. Keikutsertaan Musrembang</p> | <p>Jenis Data: Data Sekunder</p> <p>Sumber Data: Bagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Kesbangpol, Pengadilan Agama,</p> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Polresta Bogor Kota                        |
| Bidang Hukum dan Sosial-Budaya | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas)</li> <li>2. Penghuni rumah tahanan (Rutan)</li> <li>3. Jumlah kasus perceraian dan penyebab perceraian</li> <li>4. Penduduk lanjut usia (Lansia). Terdiri dari a) Penduduk lansia menurut pendidikan yang ditamatkan, b) Penduduk lansia menurut aktivitas yang dilakukan, dan c) angka kesakitan lansia (morbiditas)</li> <li>5. Penyandang cacat (Penca). Terdiri dari a) Penca menurut pendidikan yang ditamatkan, dan b) Penca menurut aktivitas yang dilakukan</li> <li>6. Pengungsi akibat konflik/bencana</li> <li>7. Akses teknologi dan informasi</li> </ol> | <p>Jenis Data: Data Sekunder</p> <p>Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencata</p> |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | 8. Tindak Kriminalitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tan<br>Sipil,<br>Dinas<br>Sosial,<br>Lappas,<br>BPBD,<br>Polresta<br>Bogor<br>Kota,<br>dan<br>Pengadil<br>an<br>Agama                      |
| Kekerasa<br>n<br>Terhada<br>p<br>Perempu<br>an | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korban. Terdiri dari data: usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status perkawinan, jenis kekerasan, tempat kejadian, jenis pelayanan yang diberikan, frekuensi kekerasan</li> <li>2. Pelaku. Terdiri dari data: tingkat pendidikan, status pekerjaan, hubungan dengan korban, dan kebangsaan</li> </ol> | <p>Jenis<br/>Data:<br/>Data<br/>Sekunde<br/>r</p> <p>Sumber<br/>Data:<br/>DPPPA,<br/>UPTD<br/>PPA, dan<br/>Polresta<br/>Bogor<br/>Kota</p> |

Penyusunan data untuk Profil Gender Kota Bogor Tahun 2025 diupayakan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1. Namun demikian, keterbatasan ketersediaan data masih menjadi tantangan utama dalam proses penyusunan profil gender ini. Oleh karena itu, data yang disajikan sangat bergantung pada data yang tersedia di tingkat PD, LSM, DPRD, maupun organisasi masyarakat di Kota Bogor. Upaya untuk melengkapi data juga telah dilakukan melalui pencarian sumber data dari luar Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan kebutuhan.

### **Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, seperti statistik rutin dari instansi terkait, pemanfaatan data sekunder dari hasil penelitian, serta pendekatan lain yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat

sipil, serta lembaga non-pemerintah. Seluruh proses pengumpulan data dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun petugas pengumpul data merupakan pihak yang telah ditunjuk dan sebelumnya telah mendapatkan pelatihan (*coaching*) terkait pengambilan data sekunder.

### **Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis dengan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil tabulasi atau visualisasi tersebut. Proses analisis bersifat deskriptif dan disesuaikan dengan ketersediaan data, baik berupa data sekunder maupun data kualitatif yang diperoleh dari para informan. Dalam penyusunan Profil Gender Kota Bogor Tahun 2025, dilakukan pengembangan dengan menambahkan analisis khusus pada bidang hukum dan sosial yang disajikan dalam bab tersendiri. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran mengenai kondisi pembangunan gender, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan di Kota

Bogor. Proses analisis data dilakukan oleh tim ahli yang terlibat dalam penyusunan profil ini.

### **Penyajian Data**

Penyajian data yang disepakati adalah dalam bentuk buku Profil Gender Kota Bogor 2025. Data yang sama juga dipublikasikan dalam bentuk elektronik melalui *web site* resmi DPPA Kota Bogor yaitu <https://dpppa.kotabogor.go.id/>.

## **1.5 Konsep-Konsep Berkaitan Dengan Data Gender**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 4/2023 tentang Penyelenggaraan Data Gender konsep berkaitan dengan data gender adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan data gender merupakan proses sistematis dalam mengelola data pembangunan, mencakup tahapan pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyajian data secara menyeluruh dan berkelanjutan. Data tersebut dirindi

berdasarkan jenis kelamin, usia, serta data kelembagaan terkait elemen-elemen kunci dalam pengarusutamaan gender, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan strategi PUG.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah metode strategis yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.
3. Data gender merujuk pada informasi mengenai hubungan, status, peran, dan kondisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.
4. Data terpilah adalah data yang diuraikan berdasarkan jenis kelamin serta memperlihatkan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan,

kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum, sosial budaya, serta kekerasan.

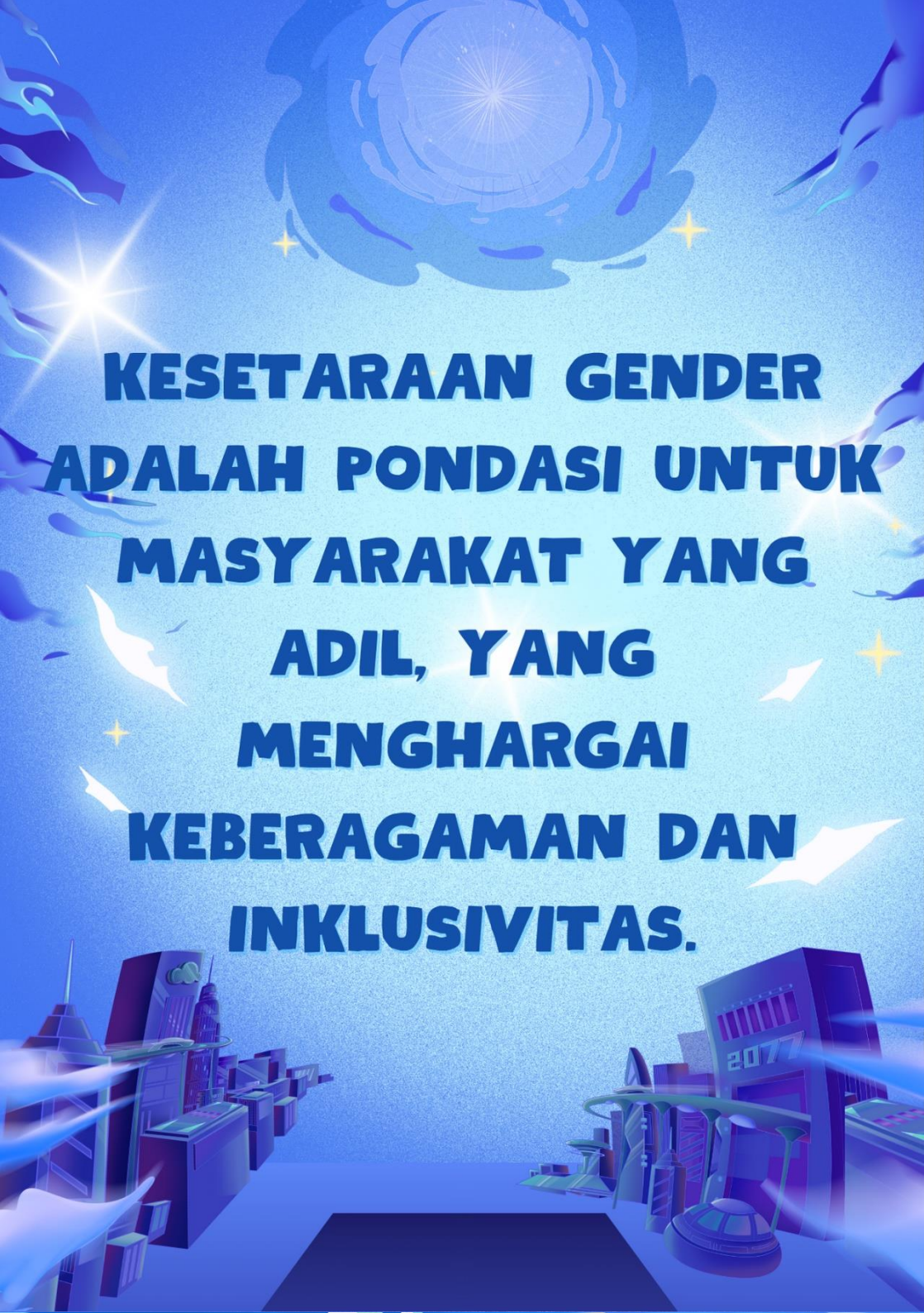
5. Data kelembagaan pengarusutamaan gender mencakup informasi tentang lembaga dan struktur pendukung PUG yang mencerminkan sistem yang berjalan efektif dan berkelanjutan, serta berlandaskan pada prinsip pemenuhan hak asasi perempuan dan laki-laki untuk mencapai kesetaraan gender.
6. Pengolahan data adalah rangkaian kegiatan sistematis terhadap data, termasuk verifikasi, pengorganisasian, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, kalkulasi, dan ekstraksi, yang hasil akhirnya berupa informasi yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, usia, dan wilayah.
7. Analisis data mengacu pada proses untuk menguraikan dan membandingkan

variabel-variabel yang menunjukkan situasi, kondisi, dan status laki-laki serta perempuan.

8. Penyajian data adalah tahapan penyampaian hasil data yang telah diolah dan dianalisis agar menjadi informasi yang relevan dan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara manajerial.
9. Data sektoral adalah jenis data yang dikumpulkan dan digunakan oleh instansi tertentu untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas utama instansi tersebut.
10. Data khusus merupakan data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam berbagai bidang seperti dunia usaha, pendidikan, sosial-budaya, maupun kebutuhan masyarakat lainnya,

dan dikelola oleh lembaga atau pihak non-pemerintah.

11. Survei adalah metode pengumpulan data dengan cara mencacah sebagian sampel untuk menggambarkan karakteristik populasi tertentu pada waktu tertentu.
12. Unit kerja pemberdayaan perempuan adalah lembaga dalam struktur pemerintahan daerah seperti badan, biro, atau kantor yang memiliki fungsi khusus dalam bidang pemberdayaan perempuan.
13. Perangkat Daerah (PD) adalah lembaga atau instansi di lingkungan pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan pengelolaan data gender dan anak.



**KESETARAAN GENDER  
ADALAH PONDASI UNTUK  
MASYARAKAT YANG  
ADIL, YANG  
MENGHARGAI  
KEBERAGAMAN DAN  
INKLUSIVITAS.**

## **BAB II**

# **PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN**

### **2.1 Konsep Gender**

Mengacu pada konsep gender yang dijelaskan oleh United Nations (2001), gender dipandang sebagai variabel sosial-budaya yang melintasi berbagai sektor. Konsep ini memiliki karakter menyeluruh karena dapat diterapkan pada berbagai variabel lain seperti ras, kelas sosial, usia, kelompok etnis, dan sebagainya. Sistem gender terbentuk dalam konteks sosial-budaya yang menentukan apa yang dianggap wajar, diperbolehkan, dan dihargai terhadap perempuan dan laki-laki, termasuk perempuan muda dan anak laki-laki dalam suatu masyarakat tertentu. Peran gender terbentuk melalui proses sosialisasi, dan karena merupakan hasil konstruksi sosial, maka sifatnya tidak permanen dan bisa berubah seiring waktu. Sistem gender dilembagakan melalui lembaga pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, hukum, serta nilai budaya

dan tradisi yang berlaku. Dalam pendekatan gender, fokus utamanya bukan pada individu perempuan atau laki-laki melainkan pada sistem yang membentuk pembagian peran, tanggung jawab, akses, serta kontrol terhadap sumber daya, serta pengambilan keputusan.<sup>1</sup>

Lebih lanjut, Wood (2001) mengemukakan bahwa gender merupakan suatu konstruksi sosial yang bervariasi antara satu budaya dengan budaya lainnya, dan mengalami perubahan seiring waktu dalam suatu kebudayaan tertentu. Gender bersifat relasional, artinya konsep maskulinitas dan femininitas memperoleh maknanya karena masyarakat membedakannya secara sosial. Berdasarkan pemahaman ini, penting untuk ditegaskan bahwa gender tidak sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin mengacu pada aspek biologis yang bersifat kodrati dan tidak dapat dipertukarkan, seperti perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, gender merujuk pada

---

<sup>1</sup> Gender Issues and the Advancement of Women, United Nations (CH rev. August 2001) <http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet2.pdf>

perbedaan peran dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk melalui proses belajar sosial dan dapat mengalami perubahan. Perbedaan peran ini tidak menjadi persoalan selama tidak menyebabkan ketimpangan gender (*gender inequality*). Ketimpangan dan perbedaan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk serta bervariasi antara negara atau sektor tertentu.

Berdasarkan United Nations (2002)<sup>2</sup>, terdapat beberapa elemen penting yang dapat digunakan sebagai titik tolak dalam memahami bagaimana dan mengapa perbedaan serta ketidaksetaraan gender menjadi relevan dalam situasi tertentu, antara lain:

1. Ketidaksetaraan dalam kekuasaan politik (akses, pengambilan keputusan, representasi dll.)

Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah secara global. Hal ini berdampak pada minimnya representasi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan formal seperti di

---

<sup>2</sup> United Nations. 2002. Gender Mainstreaming. New York.

pemerintahan, dewan masyarakat, dan lembaga pembuat kebijakan. Rendahnya representasi ini membuat prioritas, kebutuhan, dan kepentingan perempuan kerap tidak terlihat atau tidak dianggap penting. Akibatnya, kebijakan nasional, regional, bahkan lokal seringkali dirumuskan tanpa melibatkan perspektif perempuan secara bermakna.

## 2. Ketimpangan dalam rumah tangga

Perbedaan hak dalam rumah tangga tercermin dalam akses dan kendali terhadap sumber daya keluarga serta pengambilan keputusan. Hal ini relevan untuk dianalisis dalam memahami beragam persoalan penting, termasuk respon perempuan dan laki-laki terhadap insentif ekonomi, desain kebijakan sosial yang efektif, serta strategi pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS.

## 3. Perbedaan status dan hak

Meskipun berbagai konstitusi dan perangkat hukum internasional telah menyatakan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya masih banyak perempuan yang tidak memiliki hak yang sama dalam hal status pribadi, keamanan, kepemilikan tanah, warisan, dan akses pekerjaan. Menghapus hambatan-hambatan ini bukan hanya penting dalam rangka keadilan gender, tetapi juga menjadi strategi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta mewujudkan tata kelola sumber daya yang berkelanjutan. Perlindungan hak-hak perempuan seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif komunitas internasional, bukan hanya aktivis gender.

#### 4. Pembagian kerja pada sektor ekonomi

Di banyak negara, distribusi perempuan dan laki-laki dalam sektor

ekonomi sangat berbeda. Perempuan cenderung terkonsentrasi di sektor informal, sektor dengan bayaran rendah, atau pekerjaan tidak tetap seperti paruh waktu dan berbasis rumah. Selain itu, mereka juga memiliki akses yang lebih sedikit terhadap pendidikan, pelatihan, kepemilikan aset, dan kredit. Hal ini menyebabkan kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Misal, liberalisasi perdagangan dapat memberikan dampak yang tidak merata berdasarkan sektor, dan berimplikasi pada kesetaraan gender serta pertumbuhan ekonomi.

#### 5. Ketidakadilan pada sektor domestik/sektor tanpa upah

Di banyak negara, perempuan memikul tanggung jawab terbesar dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak, merawat anak, menjaga orang

sakit, dan membersihkan rumah. Di negara-negara berkembang, perempuan juga berkontribusi besar terhadap penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan kayu bakar. Beban kerja ini seringkali menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam politik dan kegiatan ekonomi yang lebih luas. Penelitian terbaru menekankan keterkaitan antara pekerjaan domestik (reproduktif) dan pekerjaan di sektor produktif. Pekerjaan domestik ini esensial dalam menjaga kualitas tenaga kerja yang sehat dan produktif, tetapi sayangnya tidak dihargai secara ekonomi maupun sosial.

#### 6. Kekerasan terhadap perempuan

Ketidaksetaraan gender juga terwujud dalam bentuk kekerasan berbasis gender. Ini mencakup kekerasan dalam rumah tangga oleh pasangan, kekerasan seksual dalam konflik

bersenjata, eksploitasi seksual, hingga perdagangan perempuan dan anak perempuan. Kekerasan ini mencerminkan dominasi struktural dan sosial terhadap perempuan, yang menghambat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

## 7. Diskriminasi

Ketimpangan gender juga muncul dalam bentuk-bentuk diskriminasi yang tidak selalu mudah dikenali atau diukur. Norma sosial yang mengatur perilaku ideal bagi perempuan dan laki-laki sering kali berdasarkan stereotip yang kaku. Nilai dan praktik ini saling memperkuat dan menciptakan hambatan terhadap perubahan sosial yang lebih adil. Akibatnya, perubahan menuju kesetaraan gender menjadi kompleks dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

## 2.2 Pembangunan Berperspektif Gender

Integrasi sudut pandang gender terus didorong baik dalam kebijakan tingkat global maupun di dalam lingkup nasional seperti di Indonesia. Seperti diketahui, kesetaraan gender merupakan bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai tujuan kelima. Tujuan global ini mencakup beberapa target, antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan,
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi,
3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan,
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat,

## 5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi.

Dalam konteks nasional Indonesia, hal ini tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan bahwa gender mengacu pada peran dan tanggung jawab sosial yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan, yang terbentuk dari dinamika sosial dan budaya, serta dapat berubah mengikuti perubahan kondisi tersebut. Kebijakan ini juga menekankan bahwa pendekatan gender harus diterapkan dalam seluruh tahapan pembangunan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Perencanaan yang responsif gender didefinisikan sebagai perencanaan yang mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, persoalan, dan aspirasi antara laki-laki dan perempuan dalam setiap penyusunan program.

Secara umum, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk menciptakan keadilan dan

kesetaraan gender melalui kebijakan serta program pembangunan yang memperhitungkan kebutuhan kedua gender. Masih merujuk pada Inpres No. 9 Tahun 2000, keberhasilan pelaksanaan PUG ditentukan oleh sejumlah faktor penting. Faktor-faktor tersebut antara lain: komitmen politik yang nyata, dukungan kebijakan pemerintah, tersedianya sumber daya manusia yang mampu melakukan analisis gender, kecukupan dana, ketersediaan data serta statistik terpilah menurut gender, sistem monitoring dan evaluasi yang memadai, serta adanya partisipasi aktif dari masyarakat luas.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat daerah, masih ditemukan ketimpangan dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengintegrasian gender secara sistematis mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, hingga

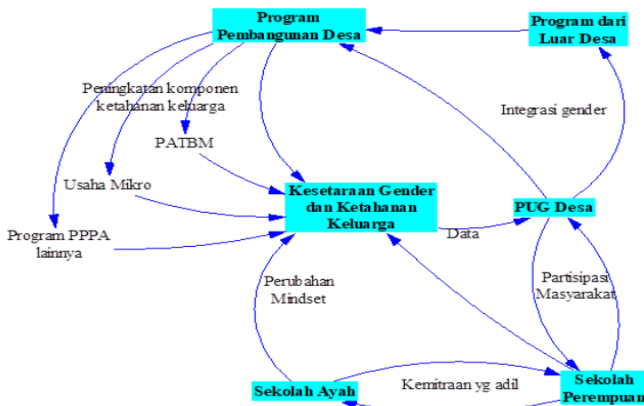
evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Mengutip dari United Nations (2002), implementasi PUG dalam pembangunan harus dimulai dengan menyisipkan perspektif gender dalam perumusan isu atau masalah kebijakan. Proses identifikasi masalah ini akan menentukan sejauh mana isu-isu gender dapat dianalisis dan direspon secara tepat. Selanjutnya, analisis gender tersebut harus tercermin dalam perumusan berbagai rekomendasi kebijakan dan pilihan solusi yang relevan.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender melalui berbagai kebijakan yang ditujukan untuk melindungi serta memberdayakan perempuan dan anak. Komitmen ini diwujudkan dengan pemberian instruksi kepada seluruh instansi pemerintahan seperti kementerian, lembaga pemerintah non-departemen, lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, serta pemerintah daerah (gubernur, bupati/walikota) untuk

mengintegrasikan pendekatan gender dalam berbagai aspek pembangunan.

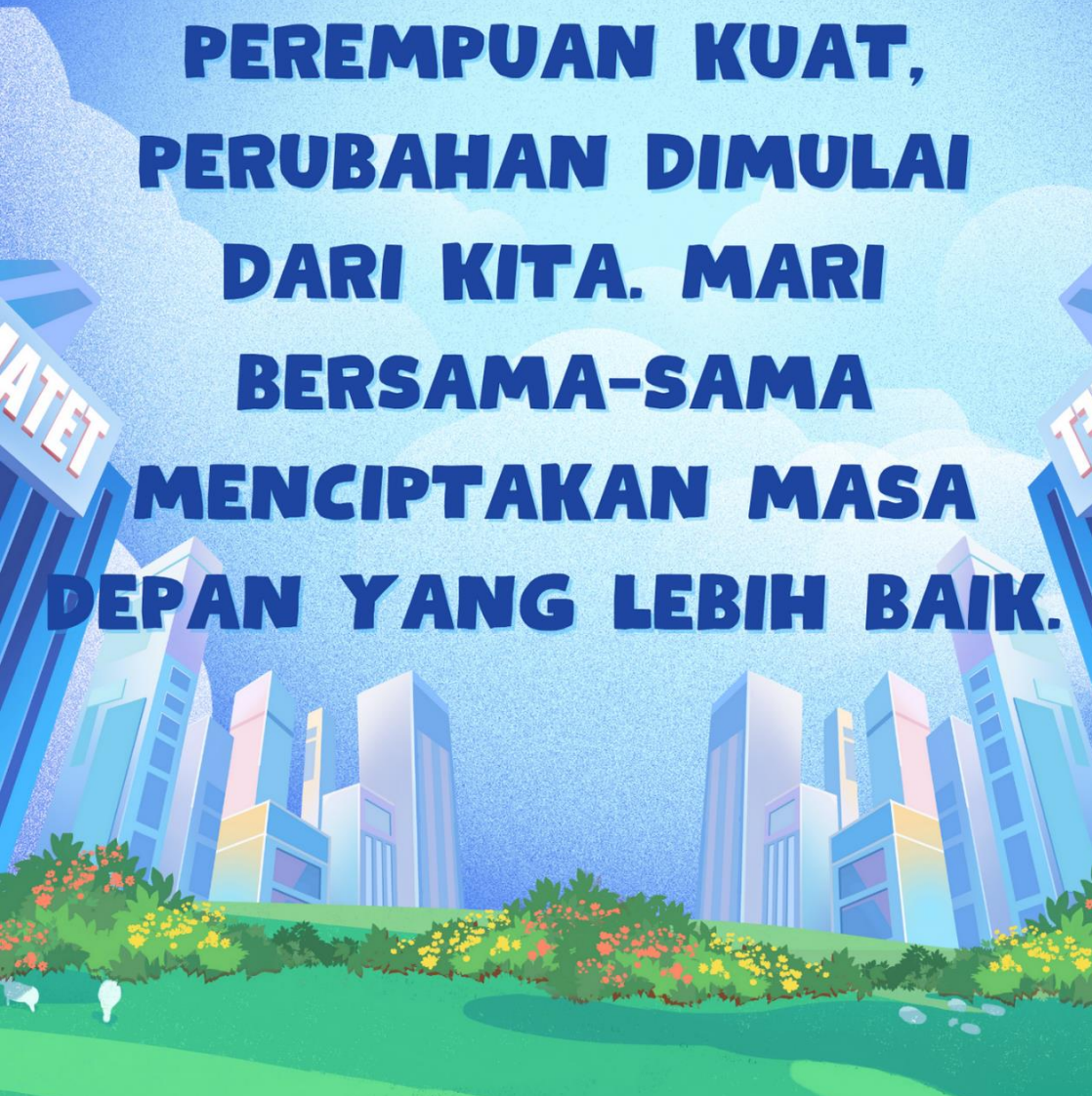
Sejak tahun 2020, Deputi Bidang Kesetaraan Gender pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menyusun rencana kerja yang mencakup pengembangan PUG hingga tingkat desa. Implementasi ini dilakukan dengan mengaitkan PUG Desa dengan Sekolah Perempuan serta pembangunan kesetaraan gender dalam lingkup keluarga, yang divisualisasikan dalam bagan berikut.



Gambar 2.1 Rancangan Perkembangan PUG

Sumber: Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 - 2024

**PEREMPUAN KUAT,  
PERUBAHAN DIMULAI  
DARI KITA. MARI  
BERSAMA-SAMA  
MENCIPTAKAN MASA  
DEPAN YANG LEBIH BAIK.**



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KOTA DAN MASYARAKAT KOTA BOGOR**

Manusia merupakan bagian dari sumber daya yang tercermin melalui data kependudukan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, pemantauan terhadap jumlah penduduk, struktur usia, pertumbuhan, persebaran, dan karakteristik demografis lainnya menjadi hal yang penting agar pembangunan dapat berlangsung secara merata dan adil.

Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi yang menguntungkan atau justru menjadi tantangan, tergantung pada kualitas yang dimilikinya. Penduduk yang memiliki kualitas tinggi dapat berperan sebagai aset dan penggerak pembangunan, sedangkan

penduduk dengan kualitas rendah justru berpotensi menjadi hambatan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.

### **3.1 Visi dan Misi Kota Bogor**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah (RPJMD Kota Bogor 2025-2029).

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2029. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2025-2024

menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

### ***"Bogor Beres, Bogor Maju"***

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kota Bogor yang dimaksud adalah:

Berakar dari keinginan kuat untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang tertata dan berdaya saing tinggi di berbagai aspek kehidupan. Fokus pada perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kota Bogor dapat tumbuh menjadi kota maju yang berkelanjutan.

1. **Bogor Beres** artinya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad

untuk bekerja sama membangun Kota Bogor sampai beres. Beres tidak hanya bermakna menata secara fisik, tetapi menata kualitas secara keseluruhan, termasuk beres pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga kota. Beres juga mengandung makna bahwa untuk bergerak kedepan, permasalahan (lama) yang masih ada perlu diselesaikan (dibereskan) segera. Tidak mungkin kota bergerak maju kedepan jika permasalahan dasar masih belum terurai.

2. **Bogor Maju** artinya membangun kemajuan Kota Bogor. Kemajuan sering kali ditandai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi (atau inovasi). Hal ini juga menjadi salah satu pilar dari kemajuan Kota Bogor. Namun, kemajuan ini perlu juga disokong dengan pilar-pilar lainnya, termasuk kota yang memiliki kebudayaan dan karakter masyarakat yang

kuat, manusia yang berkualitas, serta infrastruktur yang memadai.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 4 (empat) misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2025. Adapun 4 (empat) misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2025-2029 yaitu:

#### 1. Bogor Cerdas

Mencerminkan perwujudan kualitas intelektualitas manusia, tata kelola pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, misi ini memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memperdayakan lembaga pendidikan formal dan nonformal. Selain itu, misi ini juga memastikan pengelolaan

pembangunan yang baik, disertai dengan aparatur yang cerdas dan pelayanan publik yang semakin prima dan inovatif.

## 2. Bogor Sehat

Mencerminkan perwujudan kualitas warga dan lingkungan yang sehat. Dengan demikian, misi ini memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain itu, misi ini juga memastikan penciptaan kualitas lingkungan binaan dan hidup yang menopang kesehatan dan kualitas hidup warganya.

## 3. Bogor Sejahtera

Mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas ekonomi kota yang berkeadilan. Dengan demikian, misi ini memastikan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong

kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif yang inovatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

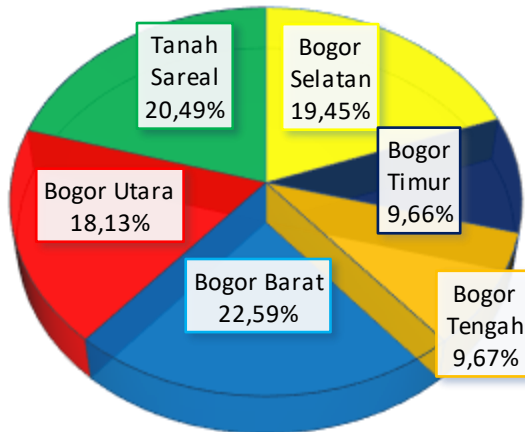
#### 4. Bogor Lancar

Mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas mobilitas dan tata ruang. Dengan demikian, misi ini berupaya untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik.

### **3.2 Gambaran Umum Geografis dan Administratif Kota Bogor**

Kota Bogor memiliki 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Enam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah

Sareal. Gambar 3.1 menggambarkan luas wilayah masing-masing kecamatan yang ada di Kota Bogor.



Gambar 3.1 Luas Daerah Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah  
Utara : Kecamatan Kemang, Bojong Gede,  
dan Kecamatan Sukaraja  
Kabupaten Bogor

Sebelah  
Timur : Kecamatan Sukaraja dan  
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

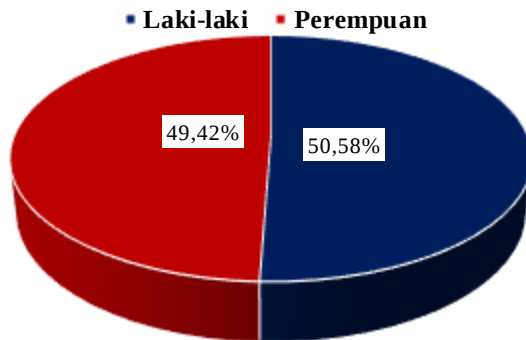
Sebelah : Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan  
Selatan : Caringin, Kabupaten Bogor  
Sebelah : Kecamatan Dramaga dan  
Barat : Kecamatan Ciomas, Kabupaten  
Bogor

### **3.3 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan salah satu indikator penting dalam kajian demografi karena berpengaruh terhadap dinamika kependudukan, terutama dalam hal pertumbuhan penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan, dan perencanaan pembangunan berbasis gender. Data jenis kelamin penduduk juga menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang responsif gender dan berkeadilan sosial.

Selain itu, distribusi jenis kelamin ini juga dapat dijadikan dasar dalam menyusun program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam isu-isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, serta

akses perempuan dan laki-laki terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Persentase penduduk kota Bogor berdasarkan jenis kelamin tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.2.

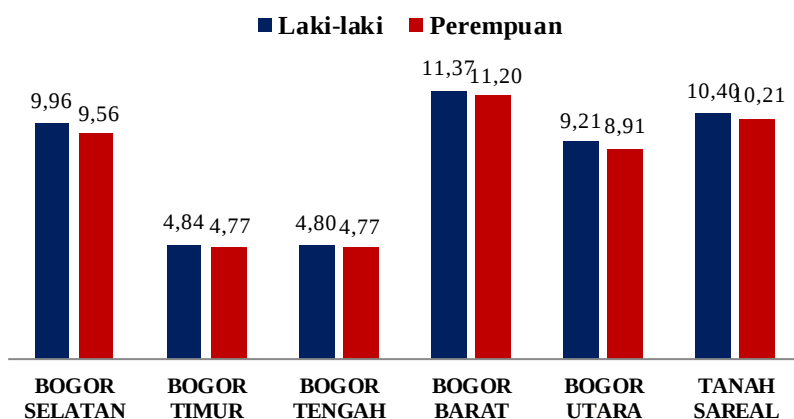


Gambar 3.2 Persentase Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 3.2, diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Komposisi ini ditunjukkan dengan persentase penduduk laki-laki sebesar 50,58%, sedangkan penduduk perempuan sebesar 49,42%. Perbandingan yang relatif seimbang antara jumlah

penduduk laki-laki dan perempuan di kota Bogor mengindikasikan bahwa tidak terdapat kesenjangan signifikan dalam struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin. Hal ini menjadi modal yang baik untuk mendorong pembangunan berbasis potensi sumber daya manusia secara setara, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, maupun pelayanan publik lainnya.



Gambar 3.3 Persentase Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 3.3, diketahui bahwa distribusi penduduk laki-laki dan perempuan di setiap

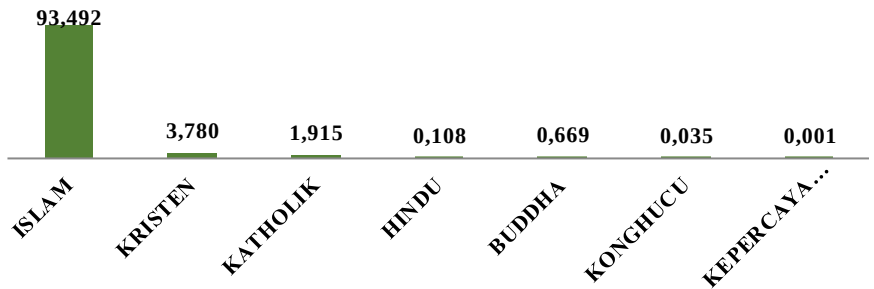
kecamatan di Kota Bogor relatif seimbang. Kecamatan dengan persentase penduduk tertinggi adalah Bogor Barat, baik laki-laki (11,37%) maupun perempuan (11,20%), diikuti oleh Tanah Sereal dan Bogor Selatan. Sementara itu, Bogor Tengah dan Bogor Timur memiliki persentase penduduk terendah, dengan masing-masing berada di bawah 5% dari total populasi kota.

Secara umum, perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan menunjukkan keseimbangan yang cukup baik. Tidak terdapat kesenjangan signifikan yang mengarah pada dominasi jenis kelamin tertentu di wilayah-wilayah administratif Kota Bogor. Keseimbangan ini penting untuk menjamin pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya manusia, serta perencanaan layanan publik yang inklusif dan sensitif pada isu gender.

### **3.4 Penduduk Berdasarkan Agama**

Data penduduk berdasarkan agama merupakan salah satu indikator penting dalam kajian

sosial dan kependudukan. Informasi ini berguna dalam perencanaan pembangunan yang menjunjung tinggi nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, serta pelayanan publik yang inklusif. Selain itu, data ini juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang menjamin kebebasan beragama dan keberlangsungan kehidupan beragama yang harmonis. Jumlah penduduk kota Bogor tahun 2024 berdasarkan agama dapat dilihat pada Gambar 3.4.



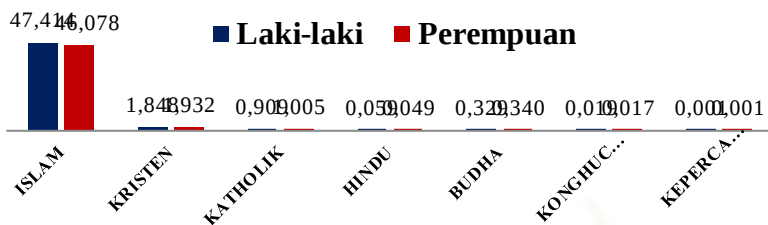
Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Agama

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 3.4, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kota Bogor memeluk

agama Islam, dengan jumlah sebanyak 93.492 jiwa. Jumlah ini sangat dominan dibandingkan pemeluk agama lainnya. Agama Kristen menempati urutan kedua dengan 3.780 jiwa, diikuti oleh Katolik sebanyak 1.915 jiwa, Buddha sebanyak 0,669 ribu jiwa (669 jiwa), Hindu sebanyak 108 jiwa, Konghucu sebanyak 35 jiwa, dan Kepercayaan sebanyak 1 jiwa.

Persebaran ini mencerminkan keberagaman agama di Kota Bogor, meskipun didominasi oleh satu kelompok agama tertentu. Keberadaan pemeluk agama minoritas tetap signifikan dalam membentuk dinamika sosial masyarakat Kota Bogor.



Gambar 3.5 Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 3.5, penduduk beragama Islam merupakan mayoritas, baik pada kelompok laki-laki (47.414 jiwa) maupun perempuan (46.078 jiwa). Pada kelompok agama Kristen, terdapat 1.848 jiwa laki-laki dan 1.932 jiwa perempuan, sementara Katolik mencatat 909 jiwa laki-laki dan 1.005 jiwa perempuan.

Selain kelompok agama mayoritas, terdapat pula penduduk yang menganut agama lain dalam jumlah yang lebih kecil namun tetap mencerminkan keragaman keyakinan di Kota Bogor. Penduduk beragama Hindu tercatat sebanyak 59 jiwa laki-laki dan 49 jiwa perempuan. Sementara itu, penganut agama Buddha berjumlah 329 jiwa laki-laki dan 340 jiwa perempuan, menunjukkan komposisi yang relatif seimbang. Untuk agama Konghucu, terdapat 19 jiwa laki-laki dan 17 jiwa perempuan. Adapun penduduk yang menganut kepercayaan lain tercatat masing-masing sebanyak 1 jiwa laki-laki dan 1 jiwa perempuan.

Data ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin relatif

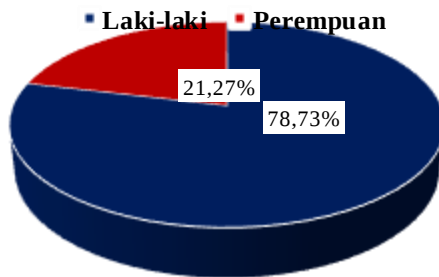
seimbang di setiap kelompok agama. Dominasi penduduk muslim menjadi ciri khas Kota Bogor, namun keberadaan pemeluk agama lain tetap penting dalam membentuk keberagaman masyarakat.

### **3.5 Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin**

Persentase kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin merupakan indikator penting dalam memahami struktur sosial masyarakat. Data ini mencerminkan dinamika peran gender dalam rumah tangga serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan keluarga yang responsif gender.

Persentase ini juga berkaitan erat dengan aspek sosial ekonomi, seperti tanggung jawab nafkah, pengasuhan anak, hingga akses terhadap program bantuan sosial. Pemahaman terhadap distribusi kepala keluarga laki-laki dan perempuan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun program yang lebih adil dan inklusif,

terutama bagi rumah tangga yang dikepalai perempuan yang umumnya lebih rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Persentase kepala keluarga di kota Bogor tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 3.6.

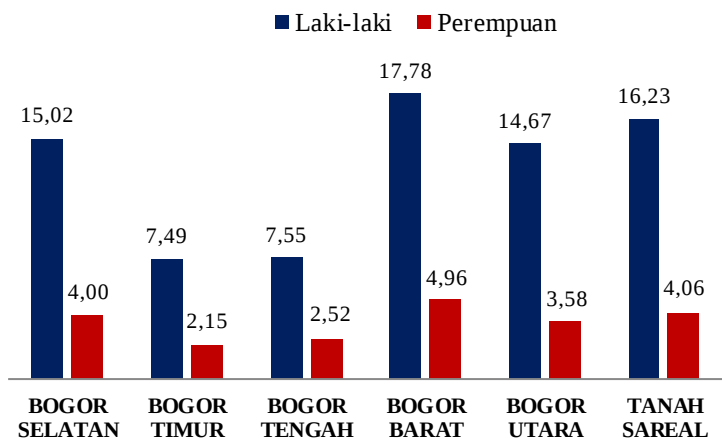


Gambar 3.6 Persentase Kepala Keluarga Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2025 (diolah)

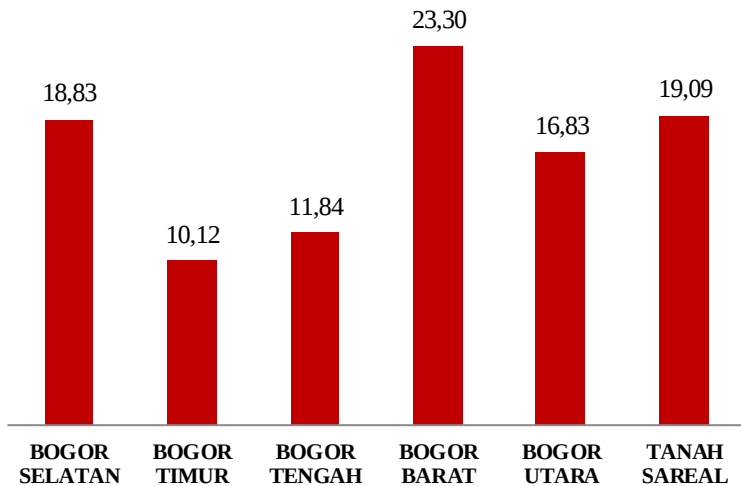
Berdasarkan Gambar 3.6, diketahui bahwa proporsi kepala keluarga laki-laki mencapai 78,73%, sedangkan kepala keluarga perempuan sebesar 21,27%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih dikepalai oleh laki-laki. Namun demikian, angka kepala keluarga perempuan yang cukup signifikan mengindikasikan

adanya pergeseran peran dalam struktur keluarga, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun budaya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam perumusan program pemberdayaan keluarga yang lebih sensitif terhadap kebutuhan kepala keluarga perempuan.



Gambar 3.7 Persentase Kepala Keluarga Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2025 (diolah)



Gambar 3.8 Persentase Kepala Keluarga Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 per Kecamatan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2025 (diolah)

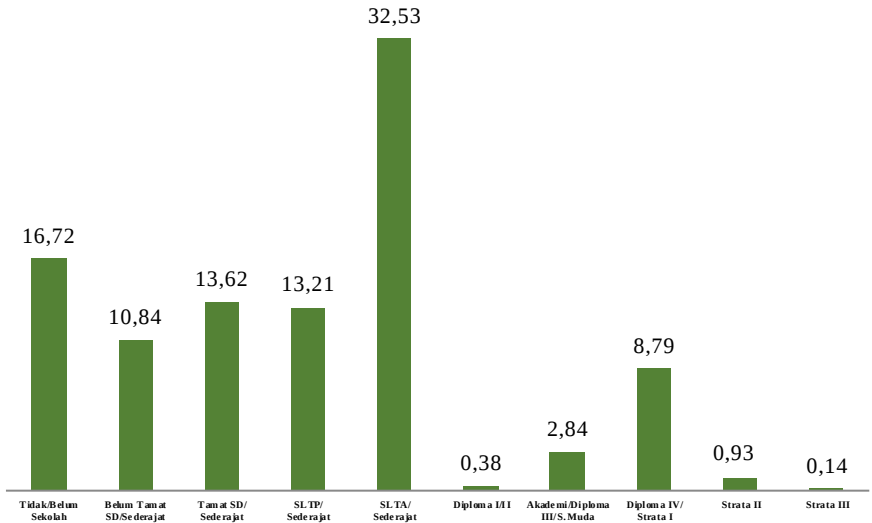
Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seorang perempuan mengambil peran sebagai kepala rumah tangga. Beberapa di antaranya adalah karena perceraian, kondisi suami yang tidak mampu menjadi pencari nafkah utama akibat disabilitas atau kehilangan pekerjaan, serta karena suami meninggalkan keluarga dalam jangka waktu lama tanpa memberikan nafkah. Selain itu, ada pula

perempuan yang belum menikah tetapi memiliki tanggungan keluarga, atau kondisi di mana suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga karena praktik poligami, pengangguran, atau menderita penyakit tertentu. Meski demikian, penyebab paling umum perempuan menjadi kepala rumah tangga adalah karena ditinggal wafat oleh suaminya.

### **3.6 Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

Gambar 3.9 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Bogor pada tahun 2024 memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA atau sederajat, dengan persentase mencapai 32,53%. Angka ini menempati posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya, yang menunjukkan bahwa pendidikan menengah atas merupakan capaian pendidikan terbanyak bagi masyarakat Kota Bogor. Hal ini bisa jadi mencerminkan akses pendidikan yang cukup baik hingga tingkat menengah, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya

menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja.



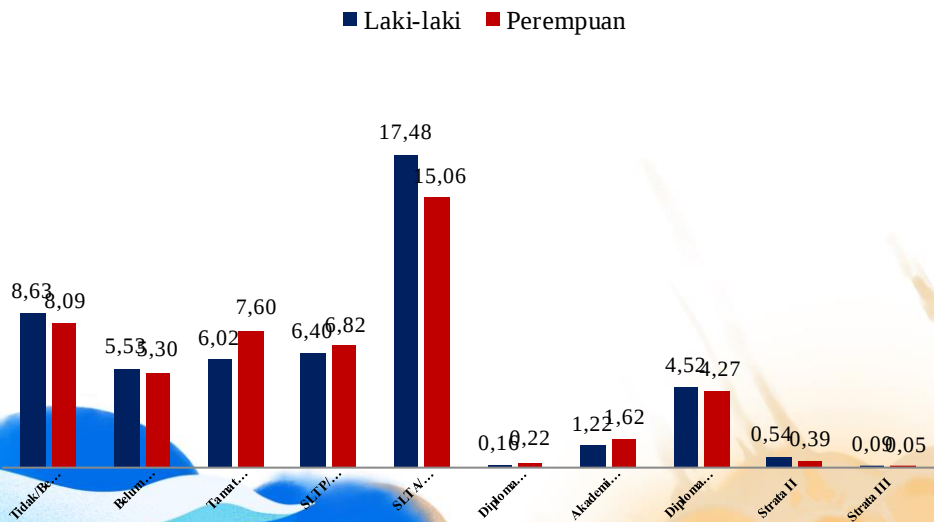
**Gambar 3.9** Persentase Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan  
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2025 (diolah)

Namun demikian, masih terdapat jumlah yang cukup besar dari penduduk yang belum atau tidak bersekolah, yakni 16,72%, serta yang belum tamat SD/ sederajat sebesar 10,84%. Jika ditambahkan, hampir sepertiga dari total penduduk Kota Bogor berada dalam kelompok pendidikan rendah. Ini

menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena kelompok ini rentan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pekerjaan layak, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan.

Penduduk yang telah tamat SD/ sederajat berjumlah 13,62%, dan yang menyelesaikan SLTP/ sederajat sebanyak 13,21%. Kedua kategori ini juga menunjukkan proporsi yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama masih menjadi titik capaian utama bagi sebagian masyarakat. Sementara itu, jika dilihat dari proporsi penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi, angkanya masih tergolong rendah. Hanya 2,84% penduduk yang menyelesaikan pendidikan Diploma I/II, dan 8,79% untuk Diploma III atau Sarjana Terapan. Untuk jenjang Sarjana (S1), persentasenya hanya mencapai 0,93%, sementara Magister (S2) hanya 0,14%, dan jenjang Doktorat (S3) hampir tidak tercatat secara signifikan.

Rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi ini dapat mencerminkan beberapa kemungkinan, seperti keterbatasan biaya, minimnya akses terhadap lembaga pendidikan tinggi, rendahnya motivasi atau kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan, serta keharusan untuk segera bekerja setelah lulus SMA. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian penting, mengingat pendidikan tinggi merupakan instrumen utama dalam mempersiapkan individu yang berkualitas, adaptif, dan memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan revolusi industri.



**Gambar 3.10 Persentase Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Kecamatan**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2025 (diolah)

Sementara itu, Gambar 3.10 menunjukkan persentase penduduk Kota Bogor pada tahun 2024 berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Secara umum, terdapat pola yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam hampir seluruh jenjang pendidikan, meskipun terdapat beberapa perbedaan signifikan pada jenjang-jenjang tertentu.

Pada jenjang SMA atau sederajat, yang merupakan jenjang pendidikan dengan persentase penduduk terbanyak, jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu 16,99% laki-laki berbanding 15,54% perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan menengah atas relatif tinggi dan sedikit lebih didominasi oleh laki-laki. Meskipun demikian,

kesenjangan gender dalam akses pendidikan pada jenjang ini tidak terlalu mencolok.

Sementara itu, pada kelompok tidak/tidak tamat sekolah, jumlah laki-laki dan perempuan relatif seimbang, masing-masing berada di angka 8,83% (tidak/tidak tamat sekolah untuk laki-laki) dan 8,45% (perempuan). Begitu juga pada jenjang SD/ sederajat dan SLTP/ sederajat, proporsi antara laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan kesenjangan yang besar. Ini mencerminkan bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, akses terhadap pendidikan telah cukup merata antar gender.

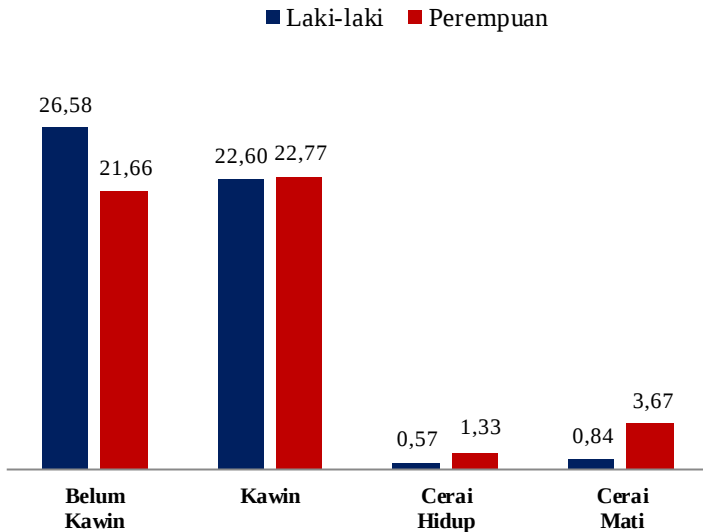
Namun, pada jenjang pendidikan tinggi, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan mulai terlihat. Pada jenjang Diploma I/II, 0,51% laki-laki telah menyelesaikan pendidikan ini, dibandingkan dengan 0,42% perempuan. Untuk jenjang Diploma III/ Sarjana Terapan, terdapat 4,41% laki-laki dan 4,38% perempuan—selisih yang tipis namun tetap menunjukkan sedikit dominasi laki-laki.

Kesenjangan yang lebih mencolok muncul pada jenjang Sarjana (S1), di mana 4,89% laki-laki telah menyelesaikan pendidikan ini dibandingkan 3,9% perempuan. Sementara itu, pada jenjang Magister (S2), 0,12% laki-laki dan 0,02% perempuan telah menamatkan pendidikan, menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Pada jenjang Doktoral (S3), angka partisipasi hampir tidak terlihat pada kedua jenis kelamin, yang mengindikasikan bahwa pendidikan pada level tertinggi ini masih belum menjadi suatu capaian umum di kalangan masyarakat kota Bogor.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar hingga menengah cukup merata antar gender, partisipasi perempuan pada pendidikan tinggi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain persepsi sosial, tanggung jawab domestik, keterbatasan ekonomi, atau minimnya dukungan struktural terhadap perempuan dalam melanjutkan pendidikan tinggi.

### **3.7 Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Jenis Kelamin per Kecamatan**

Gambar 3.11 menyajikan data mengenai persentase penduduk Kota Bogor tahun 2024 berdasarkan status kawin dan jenis kelamin, yang mencerminkan struktur sosial masyarakat dalam hal pernikahan, perceraian, dan kematian pasangan. Informasi ini penting untuk memahami dinamika keluarga dan relasi gender dalam masyarakat perkotaan. Data tersebut menunjukkan distribusi penduduk yang belum kawin, telah kawin, cerai hidup, dan cerai mati, serta memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan pada beberapa kategori status perkawinan.



Gambar 3.11 Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Status Kawin dan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2025 (diolah)

Gambar 3.11 menunjukkan persentase penduduk Kota Bogor tahun 2024 berdasarkan status kawin dan jenis kelamin. Data ini memberikan gambaran tentang dinamika demografi dan kondisi sosial masyarakat Kota Bogor, terutama dalam hal pernikahan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam status pernikahan.

Kategori "Belum Kawin" didominasi oleh penduduk laki-laki dengan persentase 26,58%, sedangkan perempuan sebesar 21,66%. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih banyak yang belum menikah dibandingkan perempuan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain usia pernikahan pertama laki-laki yang cenderung lebih tinggi, orientasi ekonomi dan karier sebelum menikah, serta konstruksi sosial budaya yang memungkinkan laki-laki menunda pernikahan lebih lama dibanding perempuan.

Pada kategori "Kawin", persentase penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, yaitu 22,60% untuk laki-laki dan 22,77% untuk perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kota Bogor yang telah menikah terdiri dari proporsi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, mencerminkan stabilitas sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Perbedaan mulai tampak signifikan pada status "Cerai Hidup" dan "Cerai Mati". Pada kategori Cerai

Hidup, terdapat 0,57% laki-laki dan 1,33% perempuan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak yang berstatus cerai hidup, yang dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari kecenderungan perempuan untuk tetap tinggal di daerah asal setelah perceraian, atau kemungkinan lebih rendahnya angka pernikahan ulang pada perempuan.

Kategori "Cerai Mati" memperlihatkan perbedaan yang lebih mencolok, dengan 0,84% laki-laki dan 3,67% perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih banyak yang berstatus janda dibandingkan laki-laki yang berstatus duda. Perbedaan ini sangat mungkin disebabkan oleh angka harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dibanding laki-laki, sehingga perempuan lebih sering menjadi pasangan yang ditinggal mati oleh suami. Selain itu, budaya patriarki dan preferensi menikah ulang di kalangan laki-laki juga dapat menjelaskan lebih rendahnya persentase laki-laki yang berstatus cerai mati.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Bogor Tahun 2024  
Berdasarkan Status Perkawinan, Jenis Kelamin, dan Kecamatan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor 2025 (diolah)

| KODE              | KECAMATAN     | BELUM KAWIN    |                | KAWIN          |                | CERAI HIDUP  |               | CERAI MATI   |               |
|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                   |               | L              | P              | L              | P              | L            | P             | L            | P             |
| 01                | BOGOR SELATAN | 61.178         | 48.542         | 49.904         | 50.499         | 1.039        | 2.658         | 1.859        | 7.724         |
| 02                | BOGOR TIMUR   | 29.060         | 23.936         | 24.742         | 24.976         | 649          | 1.594         | 909          | 4.110         |
| 03                | BOGOR TENGAH  | 28.957         | 23.759         | 23.982         | 24.097         | 832          | 1.812         | 1.112        | 4.853         |
| 04                | BOGOR BARAT   | 67.839         | 55.678         | 58.270         | 58.500         | 1.628        | 3.667         | 2.368        | 10.238        |
| 05                | BOGOR UTARA   | 55.450         | 44.889         | 47.207         | 47.484         | 1.081        | 2.563         | 1.641        | 7.042         |
| 06                | TANAH SAREAL  | 61.596         | 50.995         | 54.413         | 54.909         | 1.260        | 2.931         | 1.698        | 7.978         |
| <b>KOTA BOGOR</b> |               | <b>304.080</b> | <b>247.799</b> | <b>258.518</b> | <b>260.465</b> | <b>6.489</b> | <b>15.225</b> | <b>9.587</b> | <b>41.945</b> |

Fenomena ini mencerminkan pentingnya perhatian terhadap perlindungan sosial bagi perempuan, khususnya mereka yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati. Pemerintah Kota Bogor perlu mempertimbangkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan kemandirian perempuan yang kehilangan pasangan, baik melalui program ekonomi, bantuan sosial, maupun pemberdayaan komunitas.



**JANGAN BIARKAN  
PERBEDAAN GENDER  
MENGHALANGI  
KESEMPATANMU UNTUK  
BERSINAR. KAMU MAMPU  
MELAKUKAN APA YANG  
KAMU IMPIKAN.**

## **BAB IV**

### **PROFIL GENDER BIDANG PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan salah satu sektor fundamental dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Akses yang setara terhadap pendidikan bagi laki-laki dan perempuan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat partisipasi aktif keduanya dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Kota Bogor, pengukuran capaian pendidikan berdasarkan jenis kelamin menjadi penting untuk memahami sejauh mana keadilan gender telah terwujud di sektor ini. Profil gender dalam bidang pendidikan mencakup berbagai indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat melek huruf, serta rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin. Melalui analisis data ini, dapat diidentifikasi ketimpangan yang masih terjadi, sekaligus merumuskan arah kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan anak perempuan maupun laki-laki.

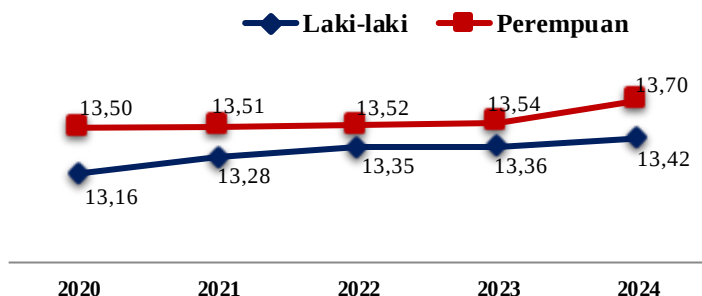
## **4.1 Partisipasi Sekolah**

Partisipasi sekolah mencerminkan keterlibatan individu dalam kegiatan pendidikan, baik yang bersifat formal maupun nonformal, dan dikaitkan dengan status apakah seseorang belum pernah sekolah, sedang bersekolah, atau sudah tidak bersekolah lagi. Indikator ini merupakan salah satu ukuran dasar untuk menilai akses masyarakat terhadap pendidikan, khususnya bagi kelompok usia sekolah. Melalui indikator ini, dapat diketahui sejauh mana penduduk memperoleh akses pendidikan, antara lain ditunjukkan melalui persentase penduduk yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah terhadap total populasi. Semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang belum pernah sekolah mengindikasikan rendahnya akses terhadap kegiatan pendidikan, dan sebaliknya, semakin tinggi persentase penduduk yang masih aktif bersekolah menunjukkan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan semakin terbuka luas. Sementara itu, tingginya persentase penduduk usia sekolah yang tidak lagi bersekolah menjadi sinyal

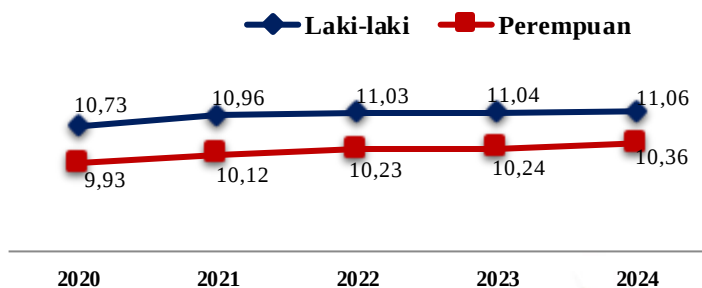
bahwa kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan masih terbatas. Dua indikator yang dapat memberikan gambaran lebih lanjut mengenai partisipasi pendidikan masyarakat adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

HLS menggambarkan perkiraan lama waktu (dalam tahun) yang akan ditempuh seorang anak untuk mengenyam pendidikan formal mulai dari usia tertentu di masa depan, dengan HLS mencerminkan potensi akses anak usia 7 tahun ke atas terhadap sistem pendidikan saat ini. Angka ini bermanfaat untuk mengevaluasi bagaimana sistem pendidikan berkembang di tiap jenjang. Di sisi lain, RLS atau *Mean Years School* (MYS) menunjukkan rata-rata lama waktu yang telah ditempuh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal. Angka ini dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai tingkat dan mutu pendidikan masyarakat di suatu wilayah. Dalam perhitungannya, penduduk yang lulus SD diasumsikan memiliki lama sekolah selama 6 tahun, SMP selama 9 tahun, dan SMA selama 12 tahun,

tanpa memperhitungkan apakah yang bersangkutan pernah tinggal kelas. Informasi mengenai perkembangan HLS dan RLS di Kota Bogor tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.



Gambar 4.1 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Bogor 2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)



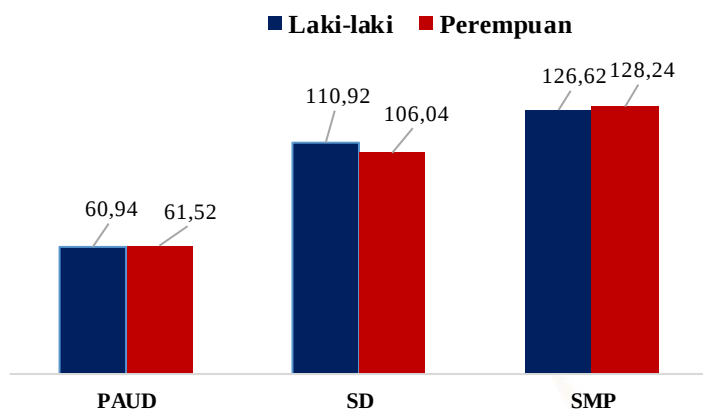
Gambar 4.2 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bogor 2024  
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.2, terlihat dengan jelas bahwa angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bogor belum pernah melampaui angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Meskipun demikian, terdapat tren peningkatan pada angka RLS di Kota Bogor, meskipun laju kenaikannya tergolong lambat, yakni masih berada di bawah 1 poin dalam rentang waktu enam tahun terakhir. Oleh karena itu, partisipasi dari seluruh elemen, bukan hanya terbatas pada Dinas Pendidikan, perlu terus diupayakan guna mencapai angka RLS yang setidaknya setara dengan angka HLS.

## **4.2 APK, APM, dan APS**

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah di suatu wilayah, tanpa memperhatikan apakah peserta didik berada pada usia yang seharusnya untuk jenjang pendidikan tersebut. APK dihitung dengan membandingkan jumlah seluruh peserta didik pada suatu jenjang pendidikan (baik

yang sesuai maupun tidak sesuai usia) dengan jumlah penduduk usia sekolah yang seharusnya berada pada jenjang tersebut, kemudian dikalikan seratus persen. Semakin tinggi nilai APK menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang berhasil dijangkau oleh sistem pendidikan. APK dapat melebihi 100% apabila terdapat peserta didik yang usianya lebih tua atau lebih muda dari kelompok usia ideal pada jenjang tertentu.



Gambar 4.3 Persentase APK Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2025 (diolah)

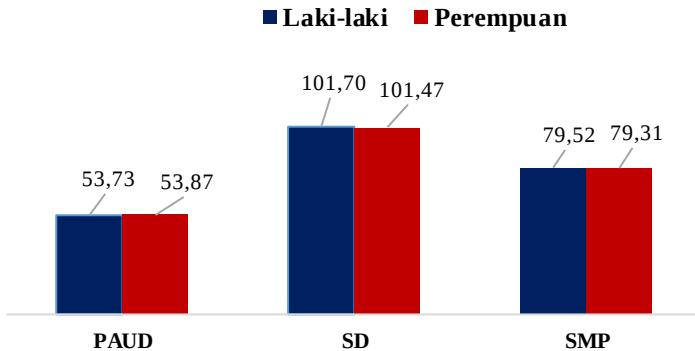
Berdasarkan Gambar 4.3, terlihat bahwa partisipasi penduduk dalam pendidikan di Kota Bogor sudah cukup merata antara laki-laki dan perempuan pada jenjang PAUD, SD, dan SMP. Pada jenjang PAUD, persentase partisipasi perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 61,52% dan 60,94%. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan di Kota Bogor telah memiliki akses yang cukup baik terhadap pendidikan usia dini. Sementara itu, pada jenjang Sekolah Dasar (SD), partisipasi penduduk laki-laki tercatat lebih tinggi dengan angka sebesar 110,92%, dibandingkan perempuan sebesar 106,04%. APK yang melebihi 100% pada jenjang ini menunjukkan bahwa terdapat anak-anak yang mengikuti pendidikan SD di luar kelompok usia idealnya, baik yang lebih muda maupun lebih tua.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), partisipasi perempuan kembali sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, masing-masing sebesar 128,24% dan 126,62%. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan jenjang menengah di Kota Bogor

relatif tinggi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, data ini mencerminkan bahwa sistem pendidikan di Kota Bogor telah mampu menjangkau sebagian besar penduduk usia sekolah, meskipun tetap perlu dorongan untuk memastikan kesetaraan akses dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh jenjang.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya, terhadap seluruh penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM mencerminkan seberapa banyak anak yang mengenyam pendidikan tepat waktu sesuai kelompok usia ideal. Misalnya, anak usia 7–12 tahun untuk SD, 13–15 tahun untuk SMP, dan sebagainya. Semakin tinggi APM, maka semakin baik pula kinerja sistem pendidikan dalam menjangkau anak-anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan di jenjang yang semestinya. APM juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerataan

akses pendidikan dan efektivitas kebijakan wajib belajar.



Gambar 4.4 Persentase APM Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.4, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Bogor tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar jenjang pendidikan. Pada jenjang PAUD, APM laki-laki tercatat sebesar 53,73% dan perempuan sebesar 53,87%, yang menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif seimbang antara anak laki-laki dan perempuan meskipun masih tergolong rendah. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), APM mengalami lonjakan

signifikan dengan angka 101,70% untuk laki-laki dan 101,47% untuk perempuan. Angka yang melebihi 100% ini mengindikasikan adanya anak usia di luar kelompok usia sekolah dasar yang turut terdata mengikuti pendidikan pada jenjang ini.

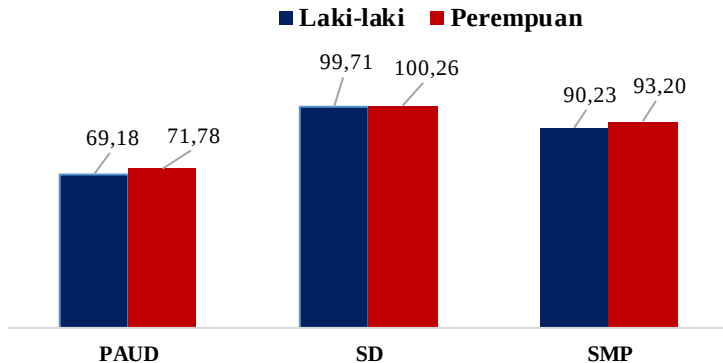
Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), APM menurun menjadi 79,52% untuk laki-laki dan 79,31% untuk perempuan. Penurunan ini dapat menjadi indikasi adanya tantangan dalam mempertahankan anak-anak usia remaja untuk tetap melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama. Secara umum, data APM ini menunjukkan pentingnya perhatian berkelanjutan terhadap upaya meningkatkan keterjangkauan dan keberlanjutan pendidikan dasar hingga menengah bagi seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan, di Kota Bogor.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah terhadap total penduduk pada kelompok usia tersebut, tanpa memperhatikan

apakah mereka bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya atau tidak. APS digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keterlibatan penduduk usia sekolah dalam kegiatan pendidikan formal. Berbeda dengan Angka Partisipasi Murni (APM) yang hanya menghitung peserta didik pada usia ideal untuk jenjang pendidikan tertentu, APS lebih inklusif karena mencakup semua yang sedang bersekolah dalam kelompok usia tertentu, meskipun mereka bersekolah tidak pada jenjang yang semestinya.

Oleh karena itu, APS dapat menggambarkan cakupan pendidikan yang lebih luas dan mengidentifikasi adanya keterlambatan atau percepatan dalam jenjang pendidikan penduduk usia sekolah. Semakin tinggi nilai APS menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah yang mengakses pendidikan, sedangkan nilai APS yang rendah menandakan adanya hambatan akses, keterlambatan pendidikan, atau anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah sama sekali. APS merupakan indikator penting dalam evaluasi kinerja

sektor pendidikan dan perencanaan kebijakan pendidikan di suatu wilayah.



Gambar 4.5 Persentase APS Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.5, terlihat bahwa angka partisipasi sekolah (APS) di Kota Bogor tahun 2024 menunjukkan tren yang cukup positif di seluruh jenjang pendidikan, dengan partisipasi perempuan cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki pada semua jenjang. Pada jenjang PAUD, partisipasi perempuan tercatat sebesar 71,78%, sedikit lebih tinggi dari laki-laki yang sebesar 69,18%. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan lebih banyak

mengakses layanan pendidikan anak usia dini dibandingkan anak laki-laki.

Untuk jenjang SD, partisipasi sekolah mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 99,71% untuk laki-laki dan 100,26% untuk perempuan. Angka ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Kota Bogor telah mengakses pendidikan, dan perbedaan antara jenis kelamin sangat tipis. Sementara itu, pada jenjang SMP, APS perempuan kembali lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 93,20% untuk perempuan dan 90,23% untuk laki-laki. Meski terdapat sedikit kesenjangan, partisipasi pada jenjang ini masih tergolong tinggi, mencerminkan bahwa sebagian besar anak usia SMP di Kota Bogor tetap melanjutkan pendidikan.

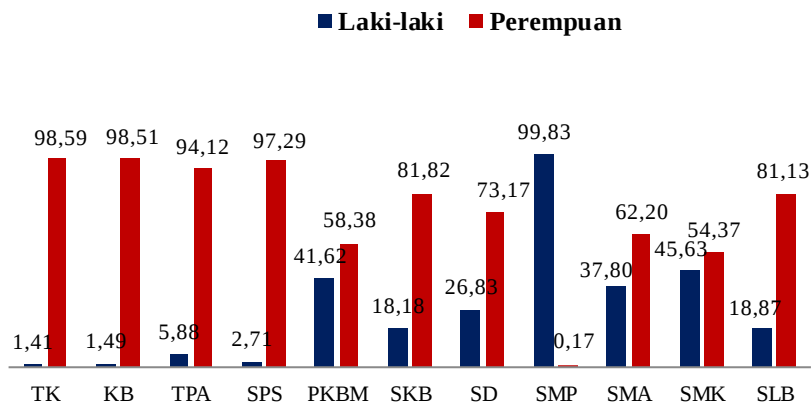
Tingginya angka APS menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mendukung hak anak atas pendidikan. Namun, perbedaan partisipasi berdasarkan jenis kelamin tetap perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif gender.

### **4.3 Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin**

Ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas merupakan salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bogor. Selain jumlah sekolah, keberadaan guru yang profesional, kompeten, dan merata dari segi gender sangat memengaruhi keberhasilan proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Distribusi guru berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan mencerminkan tidak hanya kecukupan jumlah tenaga pengajar, tetapi juga keterwakilan gender dalam dunia pendidikan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Data mengenai persentase guru berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kota Bogor tahun 2024 disajikan pada Gambar 4.6. Informasi ini memberikan gambaran tentang proporsi guru laki-laki dan perempuan di tiap jenjang pendidikan, baik pada PAUD, SD, maupun SMP, dan menjadi dasar

evaluasi dalam perencanaan kebijakan pendidikan ke depan.



**Gambar 4.6** Persentase Guru Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4.6 yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, distribusi guru di Kota Bogor pada tahun 2024 menunjukkan pola yang sangat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Data ini mencerminkan bagaimana stereotip gender dan preferensi sosial masih berperan dalam dunia kerja, khususnya di sektor pendidikan.

Pada jenjang pendidikan anak usia dini seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan Pendidikan Sejenis (SPS), tampak dominasi yang sangat kuat dari guru perempuan. Persentase guru perempuan di TK mencapai 98,59%, di KB sebesar 98,51%, di TPA sebesar 94,12%, dan di SPS sebesar 97,29%. Sementara itu, persentase guru laki-laki di jenjang-jenjang tersebut hanya berkisar antara 1,41% hingga 5,88%. Kondisi ini mencerminkan bahwa profesi guru pada jenjang usia dini masih sangat diidentikkan dengan peran keibuan dan sifat keperempuanan seperti kelembutan dan pengasuhan, sehingga jumlah guru laki-laki masih sangat minim.

Sementara itu, pada lembaga pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), distribusi gender mulai tampak lebih beragam. Di PKBM, persentase guru perempuan adalah 58,38%, sedangkan laki-laki sebesar 41,62%. Ini menunjukkan bahwa pada pendidikan nonformal

yang lebih fleksibel dan berbasis komunitas, keterlibatan laki-laki mulai meningkat meskipun masih belum seimbang. Di SKB, guru perempuan kembali mendominasi sebesar 81,82%, sedangkan guru laki-laki hanya 18,18%.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), dominasi guru perempuan masih sangat kuat dengan persentase 73,17%, sementara guru laki-laki sebesar 26,83%. Namun, ketika memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), terjadi pergeseran yang sangat signifikan. Guru laki-laki mendominasi dengan persentase sebesar 99,83%, sedangkan guru perempuan hanya 0,17%. Ini merupakan jenjang dengan ketimpangan gender paling ekstrem, dan dapat menunjukkan beberapa faktor seperti preferensi sekolah terhadap guru laki-laki untuk jenjang menengah, persepsi terhadap otoritas, atau bahkan keterbatasan jumlah guru perempuan yang melamar pada jenjang ini.

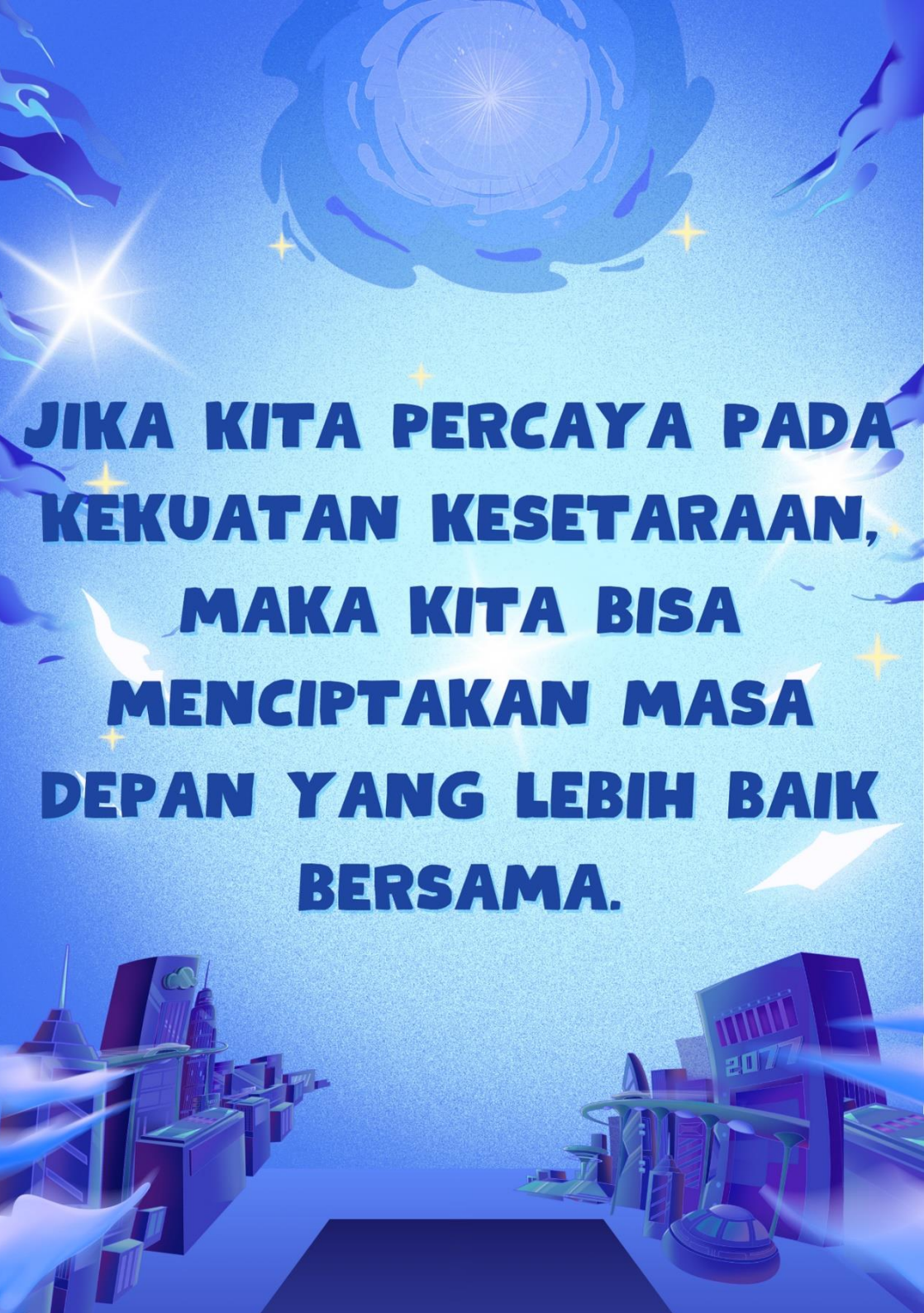
Untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pola distribusi mulai lebih seimbang. Di SMA, guru

perempuan mendominasi dengan 62,20%, dan laki-laki sebesar 37,80%. Di SMK, guru perempuan sebesar 54,37% dan laki-laki 45,63%. Distribusi ini dapat mencerminkan adanya pergeseran peran dan penerimaan yang lebih luas terhadap guru dari kedua jenis kelamin, terutama di lingkungan sekolah yang menuntut keahlian akademik dan kejuruan.

Sementara itu, pada Sekolah Luar Biasa (SLB), guru perempuan juga mendominasi sebesar 81,13%, dan guru laki-laki sebesar 18,87%. Hal ini menunjukkan bahwa pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus masih sangat dipengaruhi oleh persepsi bahwa perempuan lebih sabar dan telaten dalam memberikan perhatian serta pendekatan individual.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa peran gender dalam dunia pendidikan di Kota Bogor masih sangat kental. Guru perempuan mendominasi pada jenjang pendidikan anak usia dini dan dasar, sedangkan keterlibatan guru laki-laki meningkat di jenjang menengah. Ketimpangan yang tajam pada jenjang SMP menjadi perhatian tersendiri,

mengingat pentingnya representasi gender yang seimbang di setiap jenjang pendidikan demi menciptakan lingkungan belajar yang setara, aman, dan inklusif bagi seluruh peserta didik.



**JIKA KITA PERCAYA PADA  
KEKUATAN KESETARAAN,  
MAKA KITA BISA  
MENCIPTAKAN MASA  
DEPAN YANG LEBIH BAIK  
BERSAMA.**

## **BAB V**

### **PROFIL GENDER BIDANG KESEHATAN**

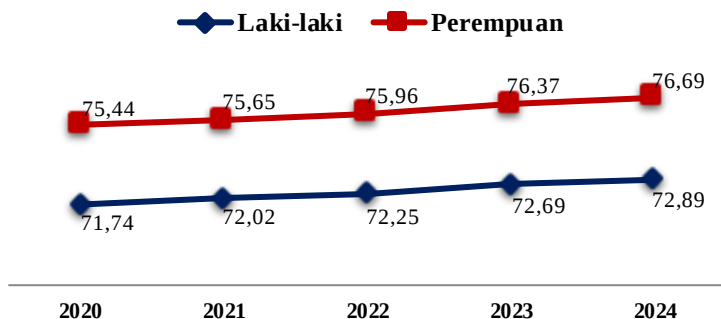
Profil gender dalam bidang kesehatan menggambarkan kondisi dan aksesibilitas layanan kesehatan yang diterima oleh penduduk berdasarkan jenis kelamin. Perbedaan kebutuhan biologis dan sosial antara perempuan dan laki-laki menuntut adanya pendekatan yang sensitif terhadap gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, data terpilah menurut jenis kelamin menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan serta mengukur efektivitas intervensi yang telah dilakukan pemerintah.

#### **5.1 Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah estimasi rata-rata jumlah tahun yang dapat diharapkan untuk dijalani oleh seseorang sejak lahir, dengan asumsi bahwa pola kematian yang berlaku saat ini akan tetap sama sepanjang hidupnya. AHH merupakan indikator penting dalam bidang demografi dan kesehatan masyarakat karena mencerminkan tingkat

kesejahteraan dan kualitas hidup suatu populasi, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, gizi, dan lingkungan hidup yang sehat. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu wilayah, semakin baik pula kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakatnya secara umum. Indikator ini juga sering digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia.

Berdasarkan Gambar 5.1, terlihat bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Bogor mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup penduduk Kota Bogor. AHH perempuan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki dalam lima tahun terakhir, yang menegaskan kecenderungan umum bahwa perempuan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.



Gambar 5.1 Angka Harapan Hidup Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Pada tahun 2020, AHH laki-laki tercatat sebesar 71,74 tahun, sementara perempuan mencapai 75,44 tahun. Selanjutnya, angka ini meningkat secara bertahap setiap tahunnya. Tahun 2021, AHH laki-laki naik menjadi 72,02 tahun dan perempuan menjadi 75,65 tahun. Tahun 2022 menunjukkan kenaikan lebih lanjut menjadi 72,25 tahun untuk laki-laki dan 75,96 tahun untuk perempuan. Tren ini berlanjut di tahun 2023, dengan AHH laki-laki sebesar 72,69 tahun dan perempuan 76,37 tahun. Hingga tahun 2024, angka ini terus

meningkat menjadi 72,89 tahun untuk laki-laki dan 76,69 tahun untuk perempuan.

Selisih antara AHH laki-laki dan perempuan juga relatif stabil, berkisar antara 3 hingga 4 tahun, yang mengindikasikan adanya perbedaan struktural dan sosial dalam aspek kesehatan dan gaya hidup antar jenis kelamin. Secara keseluruhan, peningkatan AHH ini mencerminkan kemajuan Kota Bogor dalam pembangunan sektor kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum.

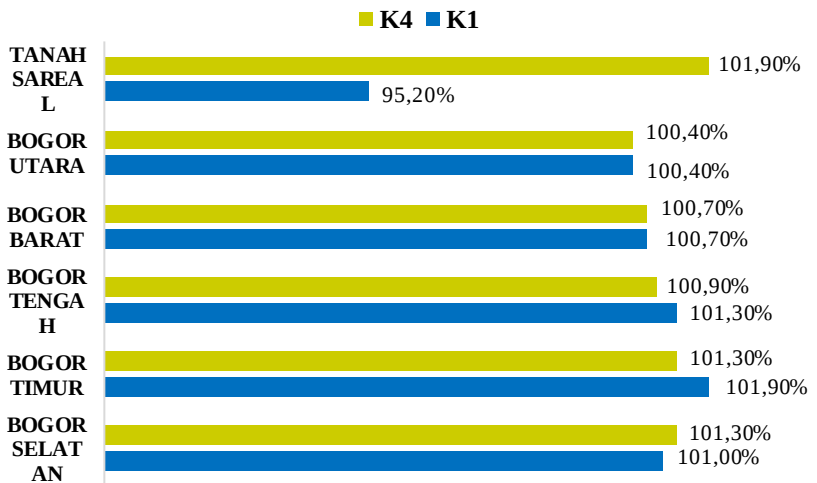
## **5.2 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)**

Pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil merupakan salah satu langkah krusial dalam upaya pencegahan kematian pada masa kehamilan maupun saat melahirkan. Oleh karena itu, penyelenggaraan layanan antenatal menjadi sangat penting dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 97 Tahun 2014 mengenai Pelayanan Kesehatan pada Masa Prahamil, Kehamilan, Persalinan, hingga Masa Nifas. Tingkat keberhasilan layanan kesehatan bagi ibu hamil dapat

dievaluasi melalui indikator kunjungan ibu hamil, khususnya kunjungan pertama (K1) dan kunjungan keempat (K4).

Persentase kunjungan ibu hamil, khususnya kunjungan pertama (K1) dan kunjungan keempat (K4), merupakan indikator penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Kunjungan K1 menandai kontak awal ibu hamil dengan tenaga kesehatan, yang berperan krusial dalam deteksi dini risiko kehamilan. Sementara itu, kunjungan K4 mencerminkan keberlanjutan pemantauan kehamilan sesuai standar pelayanan antenatal yang dianjurkan oleh pemerintah.

Tingginya persentase kunjungan ini menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan bagi ibu hamil telah menjangkau sebagian besar wilayah, dan mencerminkan kesadaran masyarakat serta efektivitas program kesehatan ibu yang dijalankan di Kota Bogor. Data capaian kunjungan K1 dan K4 di setiap kecamatan menjadi cerminan komitmen daerah dalam memastikan keselamatan dan kesehatan ibu selama masa kehamilan.



Gambar 5.2 Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K1 dan K4) Kota Bogor Tahun 2024 per Kecamatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5.1, terlihat bahwa seluruh kecamatan di Kota Bogor telah mencapai cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4) yang tinggi pada tahun 2024. Kunjungan K1 merupakan kontak pertama ibu hamil dengan fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan K4 mengacu pada minimal empat kali kunjungan selama masa kehamilan yang direkomendasikan untuk memastikan pemantauan kesehatan ibu dan janin secara berkelanjutan.

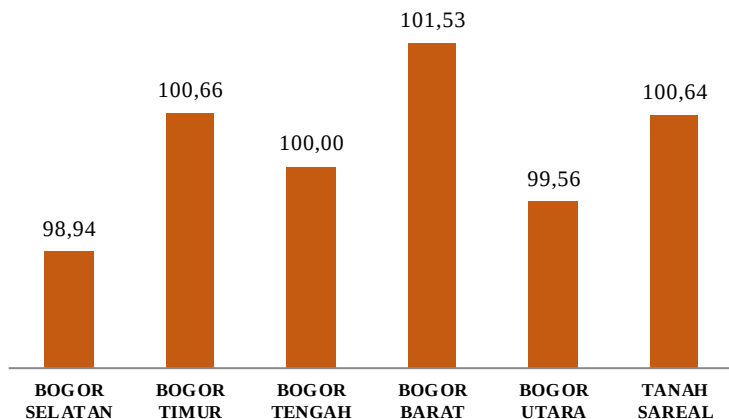
Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Timur menunjukkan angka K4 tertinggi sebesar 101,90%, disusul Bogor Barat dengan 100,70%, serta Bogor Selatan dan Bogor Utara dengan masing-masing 101,30% dan 100,40%.

Sementara itu, angka K1 tertinggi dicapai oleh Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Timur, yaitu 101,30%, menunjukkan bahwa hampir seluruh ibu hamil di wilayah tersebut telah mengakses layanan pemeriksaan kehamilan sejak awal masa kandungan. Satu-satunya kecamatan dengan cakupan K1 di bawah 100% adalah Tanah Sareal (95,20%), yang masih perlu ditingkatkan untuk memastikan deteksi dini risiko kehamilan berjalan optimal. Secara umum, data ini menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan ibu di Kota Bogor telah berjalan cukup baik dan merata antar wilayah.

### **5.3 Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)**

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di

Indonesia adalah melalui penyediaan layanan kesehatan berupa pemberian tablet penambah darah (Fe) kepada ibu hamil. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2018 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi wanita usia subur dan ibu hamil, disebutkan bahwa konsumsi tablet tambah darah penting guna melindungi wanita usia subur dan ibu hamil dari defisiensi gizi serta mencegah anemia akibat kekurangan zat besi. Data mengenai cakupan ibu hamil yang menerima layanan Tablet Fe di Kota Bogor disajikan menurut pembagian kecamatan dan dapat dilihat secara lengkap pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Persentase Cakupan Tablet Zat Besi pada Ibu Hamil Kota Bogor Tahun 2024 per Kecamatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2025 (diolah)

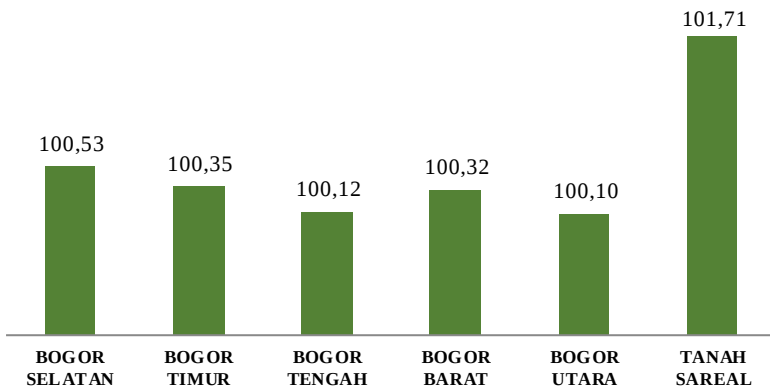
Berdasarkan Gambar 5.3, seluruh kecamatan di Kota Bogor pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup tinggi dalam pemberian tablet penambah darah kepada ibu hamil. Kecamatan dengan persentase tertinggi adalah Bogor Barat sebesar 101,53%, yang menunjukkan cakupan pelayanan melebihi target sasaran. Disusul oleh Bogor Timur (100,66%), Tanah Sareal (100,64%), dan Bogor Tengah (100,00%). Sementara itu, dua kecamatan lainnya juga mencatatkan capaian yang baik, yakni

Bogor Utara sebesar 99,56% dan Bogor Selatan sebesar 98,94%. Data ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan layanan kesehatan ibu hamil guna mencegah anemia dan komplikasi kehamilan, serta mengurangi risiko kematian ibu selama masa kehamilan dan persalinan.

#### **5.4 Pertolongan Persalinan**

Persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan salah satu indikator penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pelayanan persalinan yang aman dan profesional di fasyankes dapat memastikan ibu dan bayi mendapatkan penanganan medis yang sesuai, terutama dalam kondisi darurat. Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program kesehatan mendorong seluruh ibu hamil untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai, baik di puskesmas, rumah sakit, maupun klinik bersalin. Oleh karena itu, cakupan persalinan di fasyankes menjadi tolok ukur keberhasilan sistem pelayanan kesehatan maternal di suatu daerah.

Data persentase persalinan di fasyankes di Kota Bogor berdasarkan kecamatan tahun 2024 menjadi salah satu gambaran nyata terhadap ketersediaan layanan serta kesadaran masyarakat dalam mengakses fasilitas persalinan yang aman.



Gambar 5.4 Persentase Cakupan Persalinan di Fasyankes Kota Bogor Tahun 2024 per Kecamatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor 2025 (diolah)

Gambar 5.3 menunjukkan persentase persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) menurut kecamatan di Kota Bogor tahun 2024. Secara umum, seluruh kecamatan telah mencapai cakupan persalinan di fasyankes yang sangat tinggi, bahkan melampaui 100%.

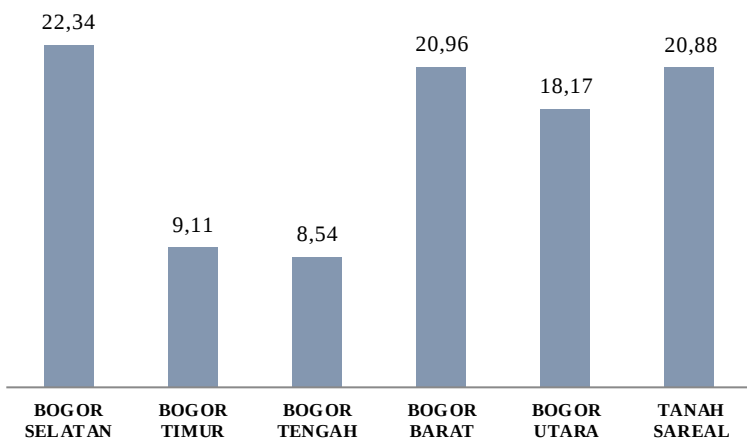
Capaian tertinggi terjadi di Kecamatan Tanah Sareal dengan persentase sebesar 101,71%, yang mengindikasikan bahwa tidak hanya warga setempat, tetapi juga warga luar kecamatan melakukan persalinan di wilayah ini.

Kecamatan lainnya yang juga mencatat persentase tinggi adalah Bogor Selatan (100,53%), Bogor Timur (100,35%), Bogor Tengah (100,12%), Bogor Barat (100,32%), dan Bogor Utara (100,10%). Data ini mencerminkan akses yang baik terhadap layanan kesehatan ibu melahirkan di Kota Bogor serta efektivitas sistem rujukan dan pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh wilayah kota.

## **5.5 Peserta KB Aktif**

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi utama dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas hidup keluarga. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju kelahiran, tetapi juga mendukung kesehatan reproduksi serta kesejahteraan ibu dan anak. Tingkat partisipasi peserta KB aktif menjadi indikator penting dalam

mengevaluasi keberhasilan program KB di suatu wilayah. Oleh karena itu, pencatatan terhadap distribusi peserta KB aktif di setiap kecamatan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian dan intervensi lebih lanjut.



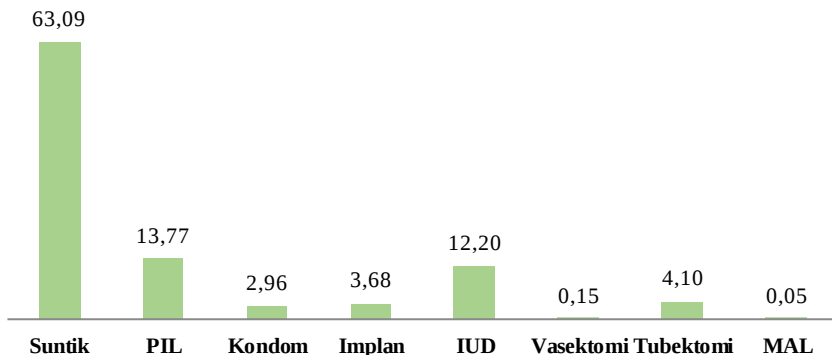
Gambar 5.5 Persentase Cakupan Peserta KB Aktif Kota Bogor Tahun 2024 per Kecamatan  
Sumber: DPPKB Kota Bogor 2025 (diolah)

Gambar 5.5 menunjukkan tingkat partisipasi peserta Keluarga Berencana (KB) aktif di enam kecamatan di Kota Bogor pada tahun 2024. Kecamatan Bogor Selatan mencatat persentase tertinggi dengan 22,34%, diikuti oleh Bogor Barat

(20,96%) dan Tanah Sareal (20,88%). Ketiga wilayah ini menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi terhadap program KB, yang menjadi indikator keberhasilan penyuluhan serta akses layanan kesehatan reproduksi.

Sebaliknya, tingkat partisipasi terendah terdapat di Bogor Tengah (8,54%) dan Bogor Timur (9,11%), yang angkanya jauh tertinggal dibanding kecamatan lainnya. Hal ini dapat mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi, kualitas pelayanan, serta kemudahan akses bagi warga di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun beberapa kecamatan telah mencapai tingkat partisipasi yang cukup baik, masih terlihat kesenjangan antarwilayah yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program KB, demi tercapainya pengendalian penduduk yang merata dan berkelanjutan di Kota Bogor.

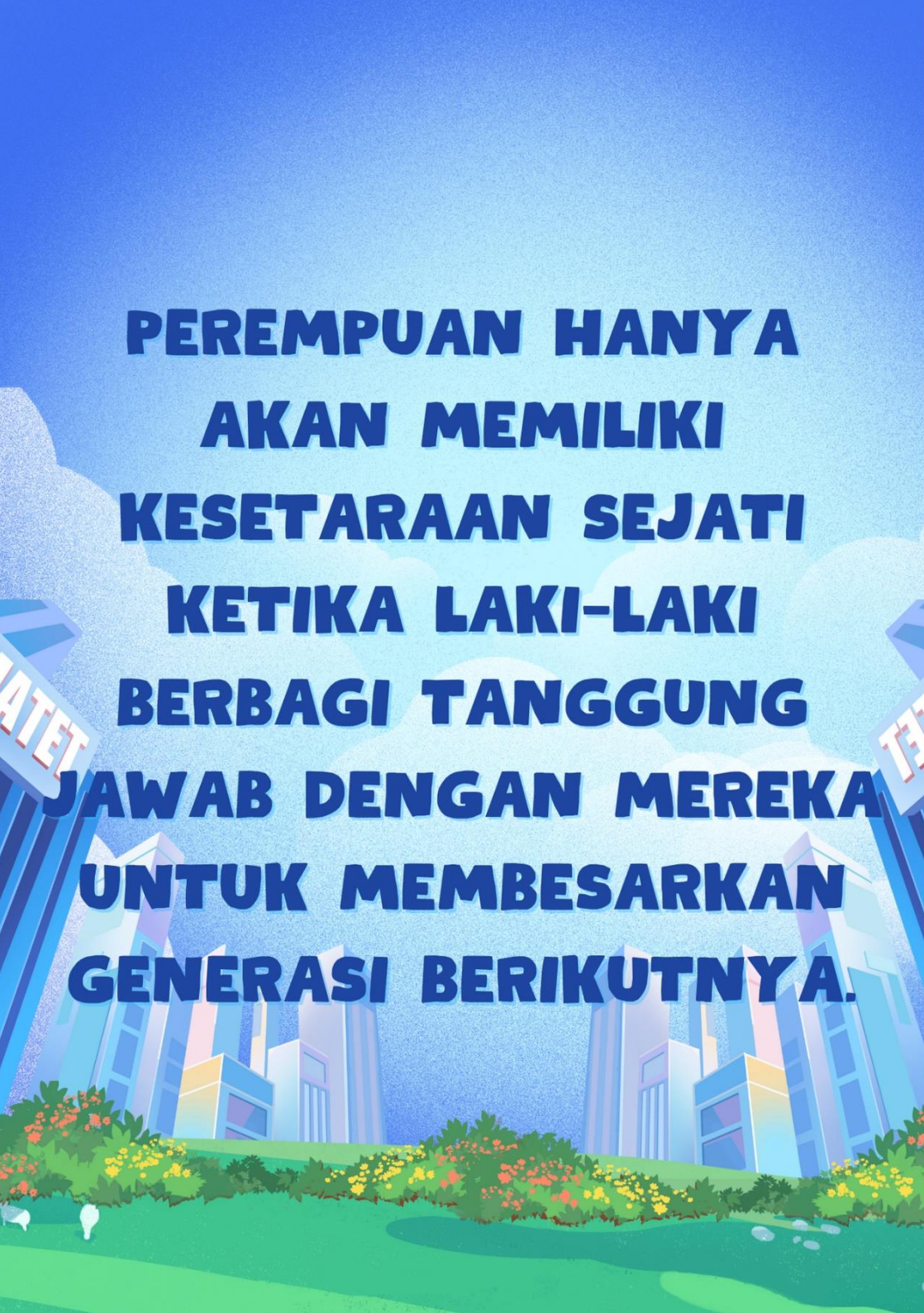


Gambar 5.6 Persentase Peserta KB Aktif Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Metode Kontrasepsi Modern

Sumber: DPPKB Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar 5.6 yaitu persentase peserta KB aktif menurut metode kontrasepsi modern di Kota Bogor tahun 2024, terlihat bahwa metode suntik menjadi pilihan paling dominan dengan persentase sebesar 63,09%. Pilihan berikutnya adalah pil (13,77%) dan IUD (12,20%). Sementara itu, penggunaan metode implan (3,68%), kondom (2,96%), dan tubektomi (4,10%) masih relatif rendah. Adapun metode vasektomi dan MAL (Metode Amenorea Laktasi) hanya digunakan oleh sebagian kecil peserta, yaitu masing-masing sebesar 0,15% dan 0,05%.

Pola ini menunjukkan kecenderungan masyarakat Kota Bogor untuk memilih metode yang bersifat jangka pendek dan non-invasif, seperti suntik dan pil, dibandingkan metode kontrasepsi jangka panjang atau permanen. Temuan ini dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan edukasi dan penyuluhan KB untuk mendorong penggunaan metode yang lebih efektif dan berkelanjutan.



**PEREMPUAN HANYA  
AKAN MEMILIKI  
KESETARAAN SEJATI  
KETIKA LAKI-LAKI  
BERBAGI TANGGUNG  
JAWAB DENGAN MEREKA  
UNTUK MEMBESARKAN  
GENERASI BERIKUTNYA.**

## **BAB VI**

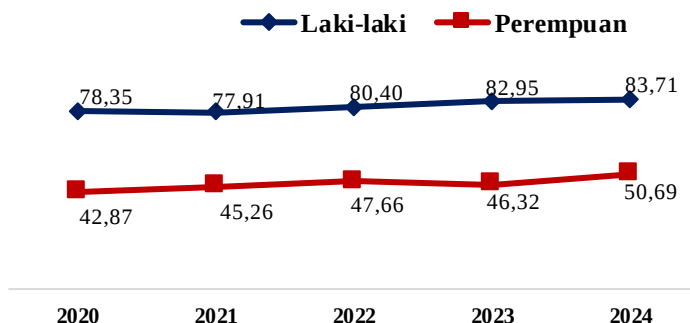
### **PROFIL GENDER BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN**

Profil gender dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan berperan penting dalam memberikan gambaran mengenai peran serta, akses, dan kesempatan yang dimiliki perempuan dan laki-laki dalam kegiatan ekonomi serta pasar kerja. Ketimpangan gender dalam sektor ini masih menjadi isu krusial, terutama terkait tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan, upah, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan perlindungan tenaga kerja.

#### **6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting dalam mengukur keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan TPAK dari tahun ke tahun dapat mencerminkan dinamika ketenagakerjaan, termasuk potensi pemanfaatan tenaga kerja laki-laki

dan perempuan di suatu wilayah. Di Kota Bogor, pengamatan terhadap TPAK selama periode 2020–2024 menunjukkan adanya tren peningkatan partisipasi angkatan kerja, baik dari kelompok laki-laki maupun perempuan, meskipun masih terdapat kesenjangan gender yang cukup signifikan dalam kontribusinya terhadap pasar kerja.



Gambar 6.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bogor Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan data perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Bogor tahun 2020–2024, terlihat bahwa partisipasi angkatan kerja laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2020, TPAK

laki-laki tercatat sebesar 78,35% dan sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 77,91%, namun kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 83,71% pada tahun 2024. Sementara itu, TPAK perempuan menunjukkan tren yang lebih fluktuatif.

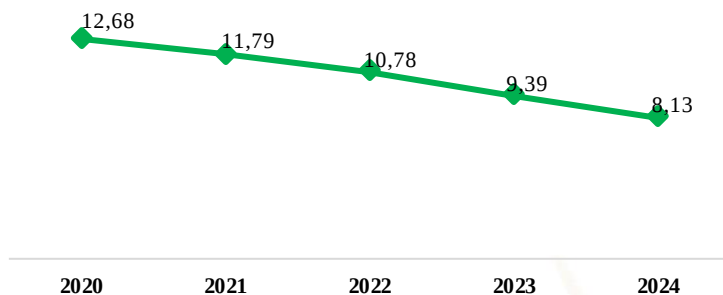
Dimulai dari 42,87% pada tahun 2020, angka ini mengalami peningkatan hingga 47,66% pada tahun 2022, kemudian sempat menurun pada tahun 2023 menjadi 46,32%, sebelum naik signifikan ke angka 50,69% di tahun 2024. Kenaikan TPAK perempuan di tahun terakhir mencerminkan adanya kemajuan partisipasi perempuan dalam dunia kerja, meskipun kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih terlihat cukup lebar.

## **6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kondisi perekonomian suatu daerah. Tingginya tingkat pengangguran dapat mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan

pekerjaan, serta menjadi tantangan bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemantauan terhadap perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi hal yang krusial dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sasaran.

Data TPT Kota Bogor dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran tentang dinamika ketenagakerjaan di wilayah tersebut dan menjadi dasar evaluasi atas upaya penanggulangan pengangguran yang telah dilakukan.



Gambar 6.2 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan data perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor tahun

2020 hingga 2024, terlihat tren penurunan yang cukup konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPT berada di angka tertinggi sebesar 12,68%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan ketenagakerjaan. Namun, sejak saat itu, angka pengangguran terus menurun setiap tahunnya: 11,79% pada 2021, 10,78% pada 2022, 9,39% pada 2023, hingga mencapai titik terendah sebesar 8,13% pada tahun 2024.

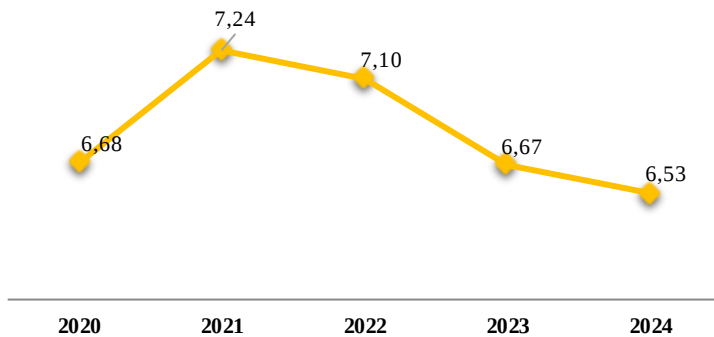
Penurunan ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi yang berangsur membaik serta peningkatan efektivitas program ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, tren ini menunjukkan arah yang positif dalam penanggulangan pengangguran di Kota Bogor.

### **6.3 Penduduk Miskin**

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Tingkat

kemiskinan mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat, serta menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi dan program sosial yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, pemantauan terhadap perkembangan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu sangat diperlukan sebagai dasar evaluasi dan perumusan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat mencapai sasaran.

Data perkembangan penduduk miskin di Kota Bogor selama periode 2020–2024 memberikan gambaran dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat di tengah tantangan dan perubahan yang terjadi, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan pasca pandemi.



Gambar 6.3 Perkembangan Penduduk Miskin Kota Bogor Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan data perkembangan penduduk miskin di Kota Bogor tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi namun dengan kecenderungan menurun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,68%, kemudian mengalami peningkatan menjadi 7,24% pada tahun 2021. Kenaikan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran. Namun

demikian, sejak tahun 2022 angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan secara konsisten.

Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin menurun menjadi 7,10%, lalu turun cukup signifikan menjadi 6,67% di tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 6,53% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya pemulihan ekonomi secara bertahap serta mulai efektifnya berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

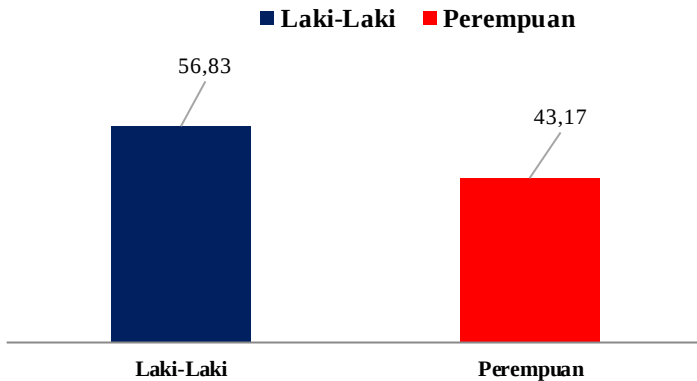
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun sempat meningkat di awal periode akibat krisis kesehatan global, angka kemiskinan di Kota Bogor dapat ditekan secara bertahap melalui upaya pemulihan dan intervensi kebijakan yang tepat. Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan tren penurunan ini agar kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.

## **6.4 Pemohon Kartu Kuning**

Kartu kuning, atau disebut juga dengan AK/I (Antar Kerja Antar Daerah/Antar Kerja Lokal), adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai tanda pencari kerja yang telah terdaftar secara sah. Dokumen ini berfungsi sebagai syarat administratif untuk melamar pekerjaan di instansi pemerintah maupun sektor swasta, serta menjadi data dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan. Selain mencantumkan identitas dan latar belakang pendidikan pemohon, kartu kuning juga membantu memetakan jumlah pencari kerja di suatu wilayah. Proses pembuatan kartu kuning umumnya tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara daring maupun langsung di kantor dinas terkait.

Kartu kuning merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran partisipasi pencari kerja, khususnya di sektor formal. Dengan melihat distribusi ini, dapat dilakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencari

kerja dalam mengakses peluang kerja formal melalui mekanisme administratif seperti kartu kuning.



Gambar 6.4 Persentase Pemohon Kartu Kuning Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar 6.4 yaitu persentase pemohon kartu kuning menurut jenis kelamin di Kota Bogor tahun 2024, terlihat bahwa pemohon laki-laki mendominasi dengan persentase sebesar 56,83%, sedangkan pemohon perempuan tercatat sebesar 43,17%. Kartu kuning atau AK/I merupakan salah satu dokumen penting bagi pencari kerja yang ingin mendaftar ke perusahaan atau lembaga formal. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa laki-laki

cenderung lebih aktif dalam mencari pekerjaan melalui jalur formal atau lebih terfasilitasi dalam mengakses layanan ketenagakerjaan.

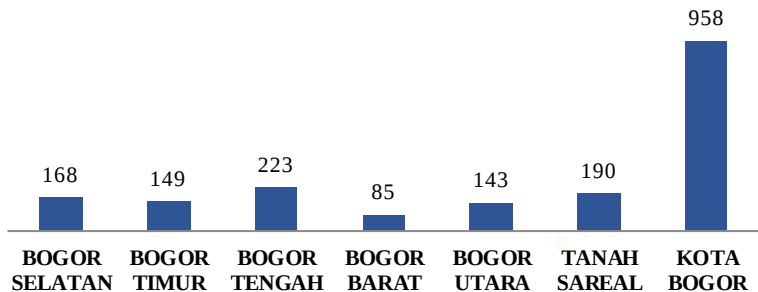
Di sisi lain, lebih rendahnya persentase pemohon perempuan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan akses, tanggung jawab domestik, atau kecenderungan perempuan bekerja di sektor informal yang tidak mensyaratkan kartu kuning. Data ini juga mencerminkan adanya tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam hal akses terhadap dokumen pendukung kerja.

## **6.5 Koperasi**

Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi rakyat yang berperan penting dalam memperkuat fondasi perekonomian lokal. Sebagai wadah yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong, koperasi tidak hanya menyediakan akses terhadap pembiayaan, distribusi barang dan jasa, namun juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di

berbagai lapisan. Di Kota Bogor, koperasi menjadi bagian dari strategi pembangunan inklusif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, distribusi dan jumlah koperasi di setiap kecamatan menjadi indikator penting dalam membaca perkembangan ekonomi mikro di daerah ini. Data tahun 2024 memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana koperasi tersebar dan berperan di masing-masing kecamatan di Kota Bogor.



Gambar 6.5 Jumlah Koperasi Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Dikopukmdagin Kota Bogor 2025 (diolah)

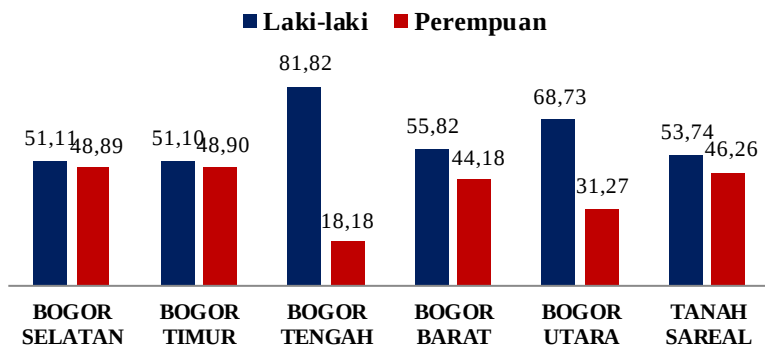
Berdasarkan gambar 6.5, jumlah koperasi yang terdaftar dan aktif di Kota Bogor pada tahun 2024

mencapai 958 unit. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Bogor Tengah menempati posisi tertinggi dengan 223 koperasi, menunjukkan tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi berbasis komunitas di pusat kota. Selanjutnya, Tanah Sereal menyusul dengan 190 koperasi, disusul oleh Bogor Selatan yang memiliki 168 koperasi. Bogor Timur dan Bogor Utara masing-masing mencatatkan 149 dan 143 koperasi, yang menggambarkan adanya potensi pertumbuhan koperasi merata di wilayah timur dan utara kota.

Sementara itu, Bogor Barat tercatat memiliki jumlah koperasi paling sedikit, yakni hanya 85 unit, yang mungkin menunjukkan adanya tantangan dalam pengembangan koperasi atau dominasi bentuk usaha lain di wilayah tersebut. Jumlah total koperasi untuk keseluruhan Kota Bogor mencerminkan peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan kelembagaan ekonomi lokal sebagai sarana peningkatan kesejahteraan bersama. Perbedaan jumlah koperasi antar kecamatan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan koperasi

ke depan, agar terjadi pemerataan dukungan, fasilitasi, dan aksesibilitas layanan koperasi di seluruh wilayah Kota Bogor.

Keanggotaan koperasi menjadi indikator penting dalam melihat sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis kolektif yang berprinsip kekeluargaan dan keadilan. Dalam konteks Kota Bogor, analisis terhadap distribusi keanggotaan koperasi tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi lokal, tetapi juga memperlihatkan keterlibatan gender dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Data tahun 2024 yang disajikan berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan memberikan gambaran menarik mengenai perbedaan tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam koperasi di setiap wilayah kota.



Gambar 6.6 Persentase Anggota Koperasi Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan

Sumber: Dikopukmdagin Kota Bogor 2025 (diolah)

Pada tahun 2024, distribusi anggota koperasi di Kota Bogor menunjukkan kecenderungan dominasi partisipasi laki-laki dibandingkan perempuan di hampir seluruh kecamatan. Kecamatan Bogor Tengah mencatat ketimpangan paling signifikan, dengan 81,82% anggota koperasi adalah laki-laki dan hanya 18,18% perempuan. Demikian pula di Bogor Utara, persentase laki-laki mencapai 68,73%, jauh di atas perempuan yang hanya 31,27%. Sementara itu, Bogor Barat mencatat perbedaan yang lebih moderat, dengan 55,82% laki-laki dan 44,18% perempuan.

Menariknya, dua kecamatan yaitu Bogor Selatan dan Bogor Timur mencatat proporsi yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan, masing-masing sekitar 51% untuk laki-laki dan 49% untuk perempuan. Hal ini menunjukkan adanya partisipasi perempuan yang lebih merata dalam koperasi di wilayah tersebut dibandingkan kecamatan lainnya. Di Tanah Sareal, laki-laki juga mendominasi dengan 53,74%, sementara perempuan sebesar 46,26%.



**KESETARAAN GENDER  
BUKAN BERARTI  
MENCIPTAKAN  
PERSAINGAN, TETAPI  
MEMPERKUAT KERJA  
SAMA ANTARA LAKI-LAKI  
DAN PEREMPUAN.**

## **BAB VII**

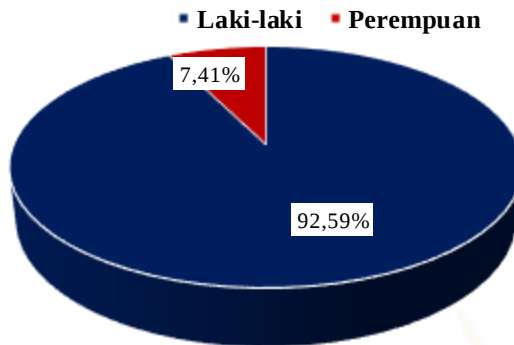
### **PROFIL GENDER BIDANG HUKUM DAN SOSIAL BUDAYA**

Profil gender dalam bidang hukum dan sosial budaya memegang peranan strategis dalam menilai sejauh mana norma hukum, sistem sosial, serta nilai-nilai budaya memberikan ruang yang adil bagi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Ketimpangan gender dalam aspek ini sering kali muncul dalam bentuk perlakuan diskriminatif, stereotip peran gender, serta hambatan akses terhadap keadilan dan partisipasi sosial. Analisis gender dalam ranah hukum dan sosial budaya penting untuk mengidentifikasi ketidaksetaraan yang bersumber dari struktur sosial dan budaya patriarkal yang masih kuat mengakar.

#### **7.1 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi penahanan, tetapi juga pembinaan dan reintegrasi

sosial terhadap individu yang terjerat permasalahan hukum. Dalam upaya mewujudkan sistem peradilan yang adil dan manusiawi, penting untuk memahami karakteristik warga binaan pemasyarakatan (WBP), termasuk dari perspektif gender. Di Kota Bogor, data tahun 2024 menunjukkan gambaran yang cukup mencolok dalam hal komposisi WBP berdasarkan jenis kelamin, yang mencerminkan dinamika sosial dan kecenderungan kriminalitas yang masih didominasi oleh kelompok laki-laki.



Gambar 7.1 Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

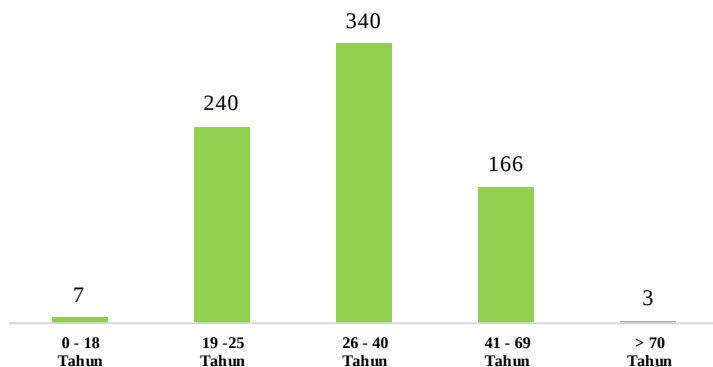
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar 7.1, diketahui bahwa mayoritas besar warga binaan adalah laki-laki, yaitu

sebesar 92,59%, sementara perempuan hanya mencakup 7,41% dari total warga binaan. Ketimpangan ini menegaskan bahwa pelanggaran hukum yang berujung pada pemidanaan masih lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari konstruksi sosial peran gender, kondisi ekonomi, hingga tekanan sosial dan psikologis yang berbeda antar jenis kelamin. Tingginya proporsi laki-laki sebagai WBP juga mencerminkan pola kriminalitas yang secara historis memang lebih banyak didominasi oleh laki-laki, khususnya dalam tindak pidana seperti pencurian, kekerasan, narkoba, dan pelanggaran hukum lain.

Sementara itu, rendahnya persentase perempuan sebagai WBP bisa menjadi indikator keterbatasan perempuan dalam akses terhadap sumber daya yang mendorong tindak pidana, atau karena adanya stigma dan norma sosial yang lebih kuat terhadap perilaku menyimpang perempuan. Data ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dalam upaya pencegahan kriminalitas serta

pelaksanaan program pembinaan yang berbasis gender di Kota Bogor.



Gambar 7.2 Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Usia

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kota Bogor 2025 (diolah)

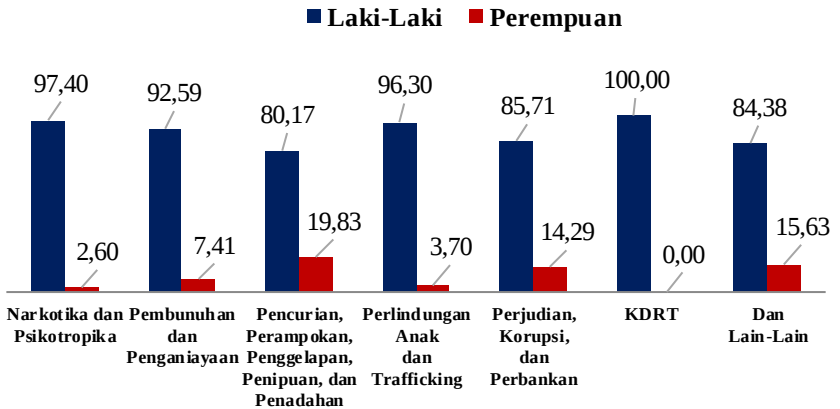
Berdasarkan gambar 7.2, mayoritas warga binaan di Kota Bogor berasal dari kelompok usia 26–40 tahun, yakni sebanyak 340 orang, menjadikannya kelompok usia dengan jumlah WBP terbanyak. Hal ini memperkuat temuan bahwa usia produktif merupakan kelompok yang paling rentan terlibat dalam tindakan kriminal, mungkin karena dorongan ekonomi, tekanan pekerjaan, atau keterlibatan dalam aktivitas sosial berisiko tinggi. Kelompok usia

19–25 tahun menyusul di posisi kedua dengan 240 orang, mengindikasikan bahwa usia muda, yang cenderung lebih eksploratif dan mudah terpengaruh oleh lingkungan, juga memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyimpangan sosial.

Sementara itu, kelompok 41–69 tahun tercatat sebanyak 166 orang, menunjukkan penurunan jumlah dibanding usia lebih muda, meskipun tetap signifikan. Jumlah warga binaan di usia 0–18 tahun dan lebih dari 70 tahun sangat kecil, masing-masing hanya 7 orang dan 3 orang, mencerminkan bahwa keterlibatan anak-anak serta lansia dalam sistem pemasyarakatan relatif rendah, kemungkinan besar karena pengaruh regulasi hukum yang berbeda serta peran sosial yang terbatas pada kelompok usia ini.

Distribusi usia ini menandakan bahwa program pembinaan perlu disesuaikan dengan karakteristik psikologis dan sosial dari tiap kelompok usia. Misalnya, usia 19–40 tahun memerlukan pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan karakter yang lebih intensif, sementara usia 41 tahun ke atas bisa difokuskan pada pendampingan reintegrasi keluarga

dan sosial. Di sisi lain, jumlah kecil WBP anak dan lansia menunjukkan urgensi perlindungan ekstra karena kerentanan mereka terhadap dampak psikologis selama masa pembedaan.



Gambar 7.3 Persentase Warga Binaan Pemasyarakatan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kasus dan Jenis Kelamin

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kota Bogor 2025 (diolah)

Data pada gambar 7.3 menunjukkan variasi jumlah warga binaan berdasarkan kelompok umur, yang dapat merefleksikan kecenderungan usia produktif terhadap keterlibatan dalam tindak kriminalitas, serta menandai kebutuhan intervensi

berbasis usia dalam program pembinaan. Berdasarkan data tahun 2024, mayoritas warga binaan di Kota Bogor berasal dari kelompok usia 26–40 tahun, yakni sebanyak 340 orang, menjadikannya kelompok usia dengan jumlah WBP terbanyak. Hal ini memperkuat temuan bahwa usia produktif merupakan kelompok yang paling rentan terlibat dalam tindakan kriminal, mungkin karena dorongan ekonomi, tekanan pekerjaan, atau keterlibatan dalam aktivitas sosial berisiko tinggi.

Kelompok usia 19–25 tahun menyusul di posisi kedua dengan 240 orang, mengindikasikan bahwa usia muda, yang cenderung lebih eksploratif dan mudah terpengaruh oleh lingkungan, juga memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap penyimpangan sosial. Sementara itu, kelompok 41–69 tahun tercatat sebanyak 166 orang, menunjukkan penurunan jumlah dibanding usia lebih muda, meskipun tetap signifikan. Jumlah warga binaan di usia 0–18 tahun dan lebih dari 70 tahun sangat kecil, masing-masing hanya 7 orang dan 3 orang, mencerminkan bahwa keterlibatan anak-anak serta

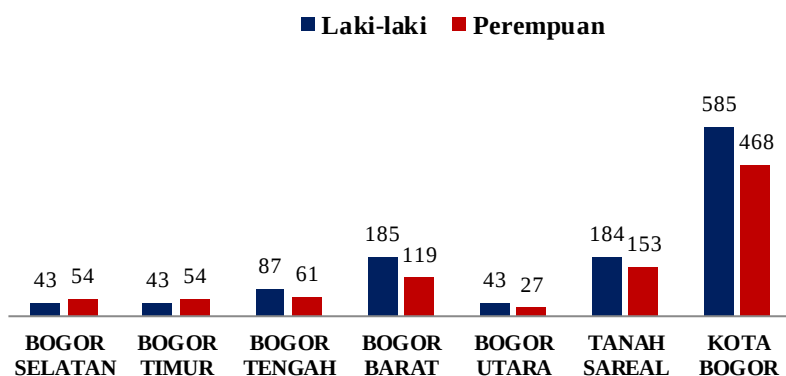
lansia dalam sistem pemasyarakatan relatif rendah, kemungkinan besar karena pengaruh regulasi hukum yang berbeda serta peran sosial yang terbatas pada kelompok usia ini.

Distribusi usia ini menandakan bahwa program pembinaan perlu disesuaikan dengan karakteristik psikologis dan sosial dari tiap kelompok umur. Misalnya, usia 19–40 tahun memerlukan pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan karakter yang lebih intensif, sementara usia 41 tahun ke atas bisa difokuskan pada pendampingan reintegrasi keluarga dan sosial. Di sisi lain, jumlah kecil WBP anak dan lansia menunjukkan urgensi perlindungan ekstra karena kerentanan mereka terhadap dampak psikologis selama masa pemenidanaan.

## **7.2 Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses pelayanan publik, pendidikan, dan pekerjaan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, penting

bagi pemerintah daerah untuk mengetahui persebaran jumlah penyandang disabilitas di tiap wilayah, termasuk berdasarkan jenis kelamin. Data pada gambar 7.4 memberikan gambaran yang komprehensif terkait distribusi penyandang disabilitas di enam kecamatan, yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok ini.



Gambar 7.4 Jumlah Penyandang Disabilitas Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar tersebut, jumlah penyandang disabilitas didominasi oleh laki-laki, dengan total 585 orang, dibandingkan perempuan

sebanyak 468 orang. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa disabilitas lebih banyak dialami oleh laki-laki, atau bahwa pelaporan dan pendataan laki-laki lebih menonjol. Secara spasial, Kecamatan Bogor Barat dan Tanah Sareal mencatat jumlah yang cukup tinggi, yaitu masing-masing 185 laki-laki dan 119 perempuan di Bogor Barat, serta 184 laki-laki dan 153 perempuan di Tanah Sareal. Ini menunjukkan tingginya konsentrasi penyandang disabilitas di dua wilayah tersebut, yang mungkin disebabkan oleh faktor populasi, akses layanan kesehatan, atau pendataan yang lebih intensif.

Sementara itu, tiga kecamatan lainnya—Bogor Selatan, Bogor Timur, dan Bogor Utara—memiliki angka yang lebih rendah dan cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan, yakni masing-masing 43 laki-laki dan 54 perempuan di Bogor Selatan dan Timur, serta 43 laki-laki dan 27 perempuan di Bogor Utara. Sebaliknya, Kecamatan Bogor Tengah menunjukkan jumlah yang cukup signifikan dengan 87 laki-laki dan 61 perempuan, menempatkannya

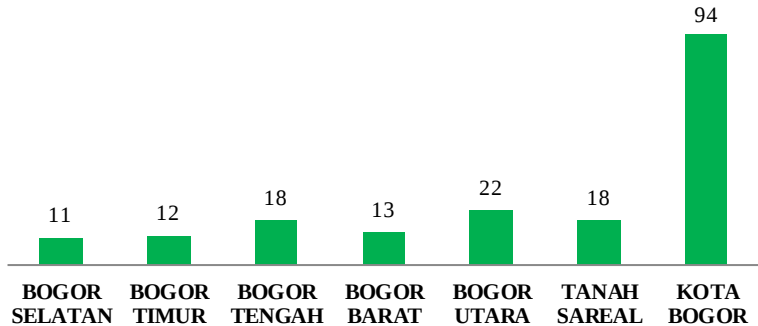
pada posisi tengah dalam hal sebaran jumlah penyandang disabilitas.

Perbedaan jumlah ini dapat mencerminkan perbedaan akses terhadap layanan pendataan dan kesehatan antar kecamatan, serta faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi prevalensi dan pelaporan disabilitas. Penting bagi kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi perbedaan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin dan wilayah ini, termasuk penyediaan alat bantu, program pelatihan keterampilan, layanan rehabilitasi, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap inklusi disabilitas secara merata di seluruh wilayah Kota Bogor.

### **7.3 Taman dan Ruang Terbuka Hijau**

Taman dan ruang terbuka hijau (RTH) memegang peran vital dalam mendukung kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta ruang interaksi sosial yang inklusif. Keberadaan RTH juga menjadi indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan dan tata kota yang ramah lingkungan. Di Kota Bogor, distribusi taman dan RTH di setiap

kecamatan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses ruang hijau yang merata bagi warganya.



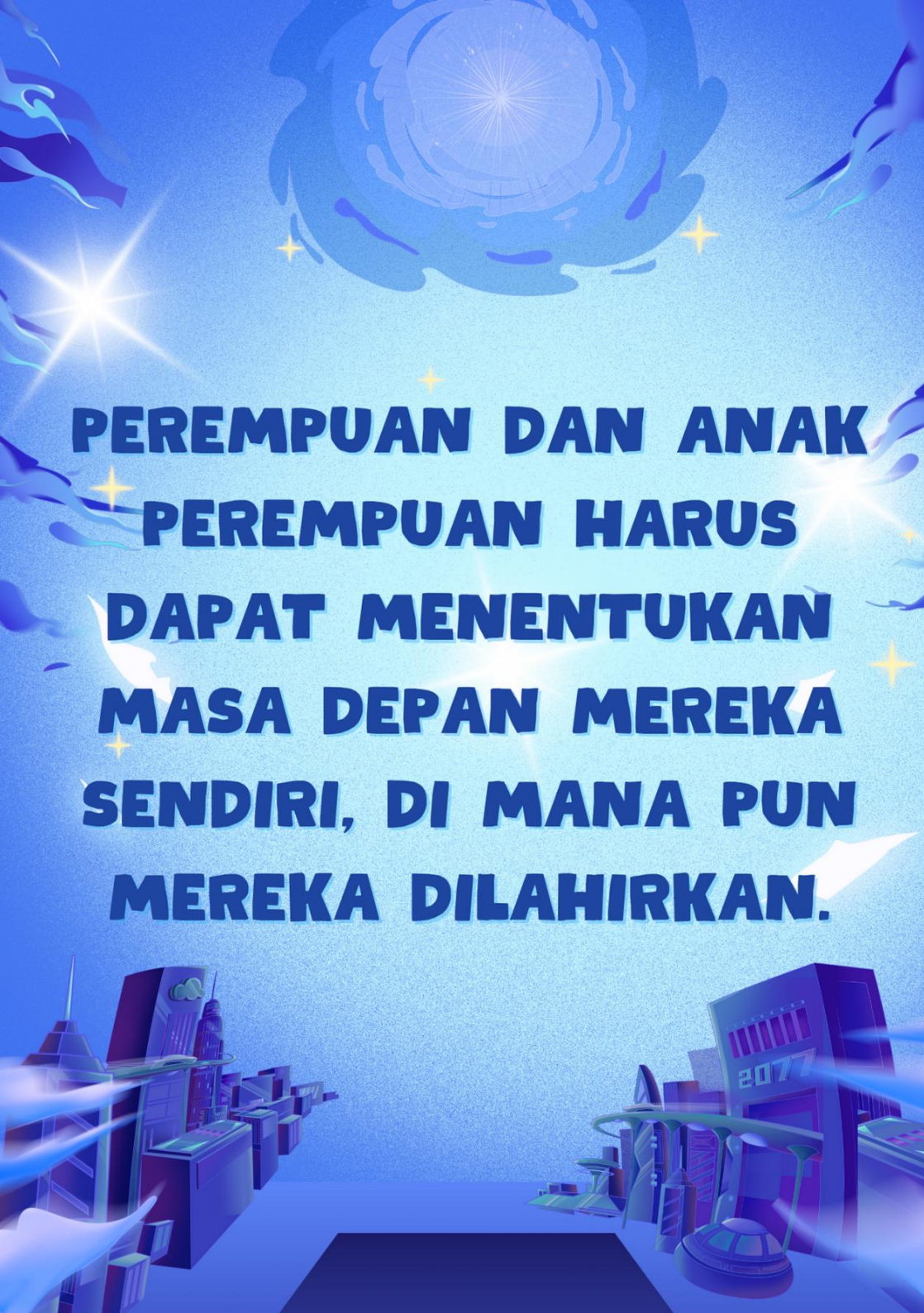
Gambar 7.5 Jumlah Taman dan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bogor 2025 (diolah)

Gambar 7.5 menunjukkan bahwa total terdapat 94 taman dan RTH di seluruh Kota Bogor. Jika dilihat per kecamatan, Kecamatan Bogor Utara menjadi wilayah dengan jumlah RTH terbanyak yaitu 22 lokasi, disusul oleh Bogor Tengah dan Tanah Sareal masing-masing 18 lokasi, kemudian Bogor Barat sebanyak 13, Bogor Timur sebanyak 12, dan Bogor Selatan sebanyak 11 taman/RTH.

Distribusi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam ketersediaan RTH antar wilayah, yang berpotensi memengaruhi kualitas hidup masyarakat di kecamatan dengan akses ruang hijau yang lebih rendah. Padahal, keberadaan taman dan RTH tidak hanya memberikan manfaat ekologi seperti penyerapan air hujan dan pengendalian suhu, tetapi juga memiliki dampak sosial—sebagai ruang interaksi antarwarga tanpa diskriminasi.

Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di setiap kecamatan tidak hanya memperkuat ketahanan iklim kota, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari pembangunan kota yang ramah gender, ramah lingkungan, dan inklusif secara sosial.



**PEREMPUAN DAN ANAK  
PEREMPUAN HARUS  
DAPAT MENENTUKAN  
MASA DEPAN MEREKA  
SENDIRI, DI MANA PUN  
MEREKA DILAHIRKAN.**

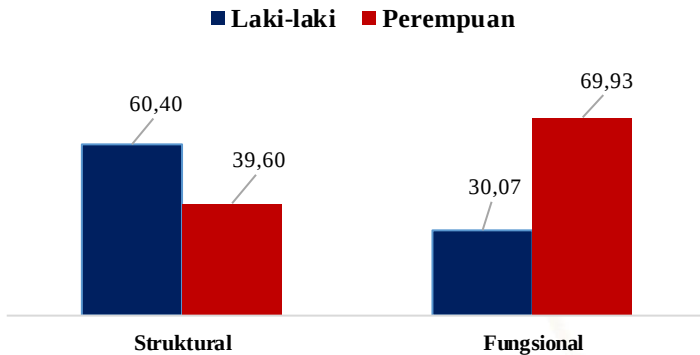
## **BAB VIII**

### **PROFIL GENDER BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

Profil gender dalam bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keterlibatan dan representasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan publik. Partisipasi politik yang setara merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan institusional yang membatasi ruang gerakannya di ranah politik dan pemerintahan. Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis di lembaga legislatif, eksekutif, maupun birokrasi mencerminkan adanya ketimpangan akses dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan

## 8.1 Aparatur Sipil Negara

Kesenjangan gender dalam struktur birokrasi masih menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan jabatan dan jenis kelamin dapat menjadi indikator awal untuk mengukur partisipasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan, serta efektivitas kebijakan afirmasi gender di ranah pemerintahan.



Gambar 8.1 Persentase ASN Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

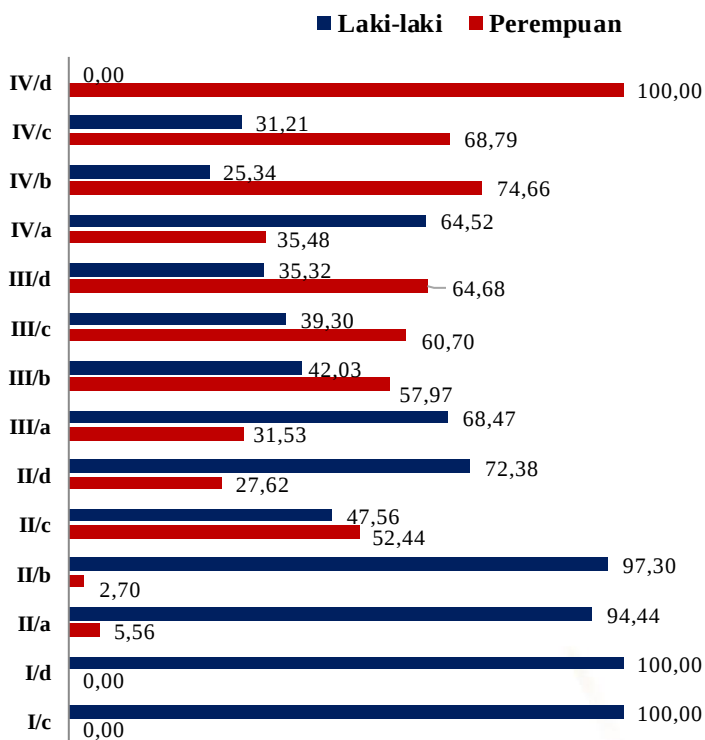
Sumber: BKPSDM Kota Bogor 2025 (diolah)

Data pada gambar 8.1 menunjukkan bahwa perempuan masih belum setara dalam hal jabatan struktural. Dari total ASN yang menduduki jabatan struktural, sebanyak 60,40% diisi oleh laki-laki, sementara hanya 39,60% oleh perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan relatif kurang terwakili dalam posisi strategis yang cenderung memegang peran pengambilan keputusan.

Sebaliknya, pada jabatan fungsional, justru perempuan mendominasi dengan 69,93%, sedangkan laki-laki hanya 30,07%. Jabatan fungsional umumnya berfokus pada pelaksanaan tugas teknis tertentu dan tidak selalu berkaitan langsung dengan posisi kepemimpinan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan ASN banyak yang berkontribusi dalam aspek pelaksana, namun belum mendapatkan peluang yang setara untuk mengakses jenjang kepemimpinan.

Ketimpangan ini menandakan pentingnya implementasi kebijakan gender *mainstreaming* secara lebih konkret di lingkungan birokrasi Kota Bogor. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat

prinsip kesetaraan, tetapi juga meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan publik karena melibatkan perspektif yang lebih beragam dalam struktur organisasi pemerintahan.



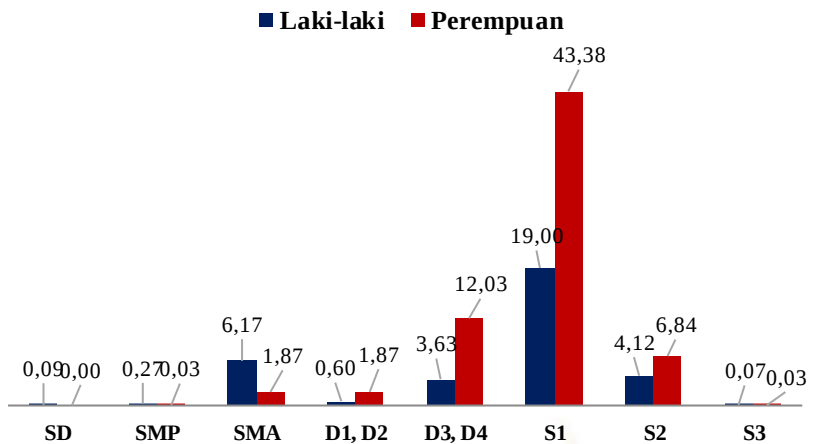
Gambar 8.2 Persentase ASN Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Sumber: BKPSDM Kota Bogor 2025 (diolah)

Distribusi ASN berdasarkan golongan dan jenis kelamin mencerminkan struktur hierarki birokrasi dan akses terhadap jenjang karier di lingkungan pemerintahan. Ketimpangan dalam distribusi ini dapat mengindikasikan hambatan struktural maupun kultural yang dialami oleh kelompok tertentu, khususnya perempuan.

Data pada gambar 8.2 memperlihatkan bahwa perempuan mendominasi golongan ASN tingkat menengah hingga atas, terutama pada golongan IV/b (74,66%), IV/c (68,79%), dan IV/a (64,68%). Sebaliknya, laki-laki justru lebih dominan pada golongan awal dan menengah bawah, seperti II/b (97,30%), II/a (94,44%), serta beberapa golongan III. Namun, terdapat anomali pada golongan IV/d, di mana 100% ASN adalah perempuan dan tidak ada laki-laki sama sekali. Hal ini bisa mencerminkan dua kemungkinan: rendahnya jumlah laki-laki yang naik ke level tersebut atau representasi sangat kecil secara keseluruhan yang membuat data ekstrem secara persentase.

Ketimpangan signifikan juga terlihat pada golongan III/c dan III/b, di mana laki-laki masih mendominasi, masing-masing dengan 60,70% dan 57,97%. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah mampu menembus golongan atas, dominasi laki-laki tetap kuat pada golongan menengah yang merupakan jalur transisi menuju kepemimpinan struktural.



Gambar 8.3 Persentase ASN Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

Sumber: BKPSDM Kota Bogor 2025 (diolah)

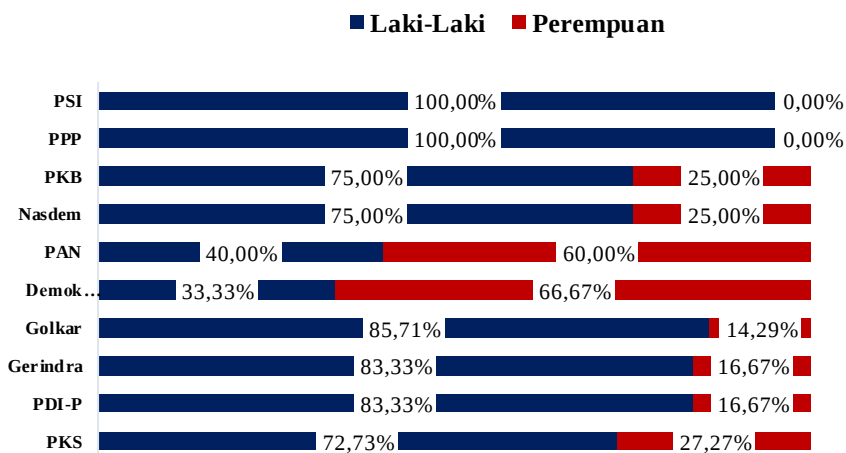
Tingkat pendidikan ASN merupakan indikator penting untuk menilai kapasitas sumber daya

aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Ketika dianalisis berdasarkan jenis kelamin, data ini juga membuka ruang untuk memahami akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, serta peluang karier yang menyertainya. Data menunjukkan bahwa perempuan mendominasi pada jenjang pendidikan tinggi, khususnya S1 (43,38%) dan S2 (6,84%), dibandingkan laki-laki yang masing-masing hanya berada di angka 19,00% (S1) dan 4,12% (S2). Artinya, mayoritas ASN perempuan di Kota Bogor telah mengenyam pendidikan sarjana dan pascasarjana.

Sementara itu, laki-laki lebih tersebar pada jenjang pendidikan menengah dan diploma, seperti SMA (6,17%), D3/D4 (12,03%), serta D1/D2 (1,87%), dibandingkan perempuan pada jenjang yang sama. Temuan menarik adalah bahwa ASN berpendidikan SD hingga SMP nyaris tidak ada, dan hanya tersisa 0,09% laki-laki berpendidikan SD. Ini menunjukkan peningkatan standar kualifikasi ASN secara umum, meskipun di sisi lain, jenjang S3 masih sangat minim (0,07% laki-laki; 0,03% perempuan).

## 8.2 Dewan Perwakilan Rakyat

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana prinsip kesetaraan gender dijalankan dalam ruang politik formal. Gambar 8.4 menampilkan proporsi anggota DPRD Kota Bogor tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin dan afiliasi partai politik.



Gambar 8.4 Proporsi Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bogor 2025 (diolah)

Data pada gambar 8.4 memperlihatkan ketimpangan representasi gender yang cukup mencolok antar partai politik. Terdapat dua partai,

yakni PSI dan PPP, yang seluruh anggotanya adalah laki-laki (100%) dan tidak memiliki wakil perempuan sama sekali, yang mencerminkan nihilnya keterlibatan perempuan dalam partai-partai tersebut di tingkat legislatif lokal. Hal ini menjadi catatan serius mengingat kedua partai tersebut semestinya dapat menjadi motor perubahan dengan membuka ruang lebih besar bagi perempuan, terutama PSI yang sering membawa narasi progresif dan keterbukaan.

Sementara itu, partai-partai besar lain seperti Golkar, Gerindra, dan PDI-P, meskipun memiliki anggota legislatif perempuan, namun persentasenya masih sangat kecil masing-masing hanya sekitar 16,67%, jauh di bawah batas ideal keterwakilan perempuan 30% sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pemilu dan prinsip-prinsip kesetaraan. Ini menandakan bahwa dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan politik masih sangat kuat, bahkan di partai-partai yang telah lama eksis dan memiliki jaringan akar rumput yang luas.

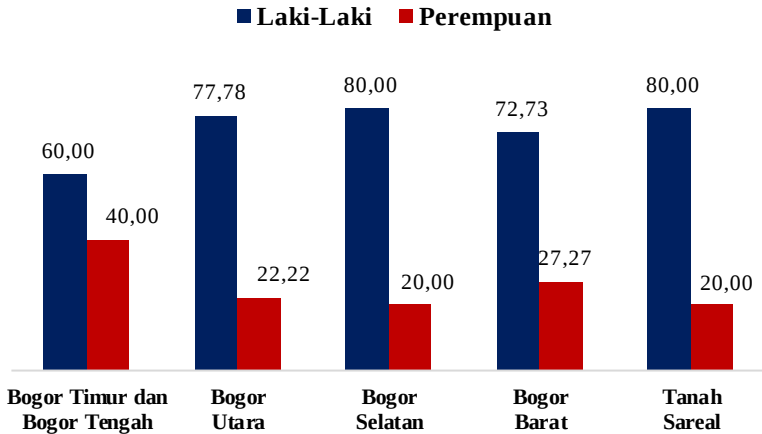
Di sisi lain, terdapat kecenderungan yang lebih progresif dalam partai seperti NasDem dan Demokrat. NasDem mencatat 60% anggotanya adalah perempuan, sementara Demokrat mencatat 66,67% anggota perempuan, menjadikannya satu-satunya partai yang menempatkan perempuan sebagai mayoritas di DPRD Kota Bogor. Ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh, karena menunjukkan bahwa dengan strategi perekrutan dan afirmasi yang tepat, keterwakilan perempuan yang signifikan sangat mungkin untuk dicapai. Selain itu, partai seperti PAN dan PKS juga mulai menunjukkan representasi perempuan meskipun masih terbatas, masing-masing pada 66,67% laki-laki vs 33,33% perempuan (PAN) dan 72,73% laki-laki vs 27,27% perempuan (PKS), yang berada di ambang batas kuota minimum.

Perbedaan mencolok antar partai ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan tidak hanya bergantung pada sistem pemilu secara umum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh komitmen internal masing-masing partai dalam menjalankan prinsip inklusivitas dan keadilan gender.

Faktor lain yang mungkin turut memengaruhi adalah pola rekrutmen politik, struktur organisasi partai, akses perempuan terhadap sumber daya politik, serta budaya politik lokal yang masih bias gender. Tanpa perubahan sistemik di dalam tubuh partai dan penguatan kapasitas calon legislatif perempuan sejak dini, maka kesenjangan ini berpotensi berulang di pemilu-pemilu berikutnya.

Komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor tahun 2024 berdasarkan daerah pemilihan (dapil) dan jenis kelamin mencerminkan masih adanya ketimpangan representasi antara laki-laki dan perempuan. Meskipun keterwakilan perempuan di parlemen merupakan aspek penting dalam demokrasi inklusif dan berkeadilan gender, data menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di tingkat lokal belum merata dan masih didominasi oleh laki-laki di hampir semua kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mendorong keterwakilan perempuan tidak hanya terjadi secara umum di

lembaga legislatif, tetapi juga terlihat jelas ketika ditinjau berdasarkan wilayah pemilihan.



Gambar 8.5 Komposisi Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bogor 2025 (diolah)

Distribusi anggota DPRD Kota Bogor tahun 2024 berdasarkan daerah pemilihan dan jenis kelamin menunjukkan pola dominasi laki-laki yang merata di seluruh kecamatan, dengan presentase paling tinggi berada di Kecamatan Bogor Selatan dan Tanah Sareal, masing-masing 80% laki-laki. Bahkan di seluruh dapil, tidak ada satu pun yang mendekati kesetaraan proporsional 50:50, apalagi kuota

afirmatif 30% perempuan yang menjadi sebuah tolok ukur keterwakilan minimal menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

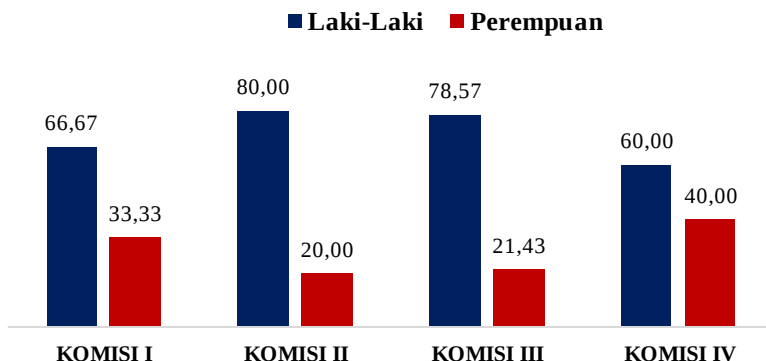
Meskipun Bogor Timur dan Bogor Tengah menunjukkan angka representasi perempuan yang relatif lebih baik (40% perempuan), angka ini masih jauh dari ideal dan belum mencerminkan representasi yang setara dalam proses demokrasi lokal. Sementara itu, Kecamatan Bogor Utara, Bogor Barat, dan Tanah Sareal memperlihatkan tingkat keterwakilan perempuan yang bahkan lebih rendah lagi, masing-masing hanya 22,22%, 27,27%, dan 20%, yang mencerminkan adanya kesenjangan struktural dalam akses politik perempuan di wilayah-wilayah ini.

Ketimpangan ini bisa ditelusuri pada berbagai faktor struktural dan kultural, seperti dominasi jaringan politik laki-laki dalam proses pencalonan, rendahnya dukungan partai terhadap calon perempuan di tingkat daerah, serta kurangnya pendidikan politik dan sumber daya yang dimiliki calon legislatif perempuan untuk bersaing di

panggung elektoral. Selain itu, faktor kultur patriarkis lokal dan resistensi terhadap kepemimpinan perempuan di wilayah tertentu dapat menjadi hambatan kultural yang memperkuat eksklusi politik berbasis gender.

Pembagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor ke dalam masing-masing komisi menunjukkan dinamika representasi gender yang menarik untuk dicermati. Komisi merupakan struktur kerja penting dalam DPRD yang menangani isu-isu sektoral, dan distribusi anggota berdasarkan jenis kelamin di tiap komisi mencerminkan sejauh mana perempuan ikut terlibat dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Data tahun 2024 memperlihatkan bahwa meskipun perempuan telah hadir di seluruh komisi, proporsi mereka masih tertinggal jauh dibandingkan laki-laki, khususnya di Komisi II dan Komisi III yang mencatat dominasi laki-laki di atas 78%. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan kritis terkait peluang, minat, dan mungkin juga hambatan struktural yang dihadapi

perempuan dalam mengakses ruang pengambilan keputusan di bidang-bidang strategis tersebut.



Gambar 8.6 Komposisi Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Komisi dan Jenis Kelamin

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bogor 2025 (diolah)

Komposisi keanggotaan DPRD Kota Bogor berdasarkan komisi dan jenis kelamin menunjukkan adanya ketimpangan representasi gender yang cukup mencolok. Meskipun secara umum keterlibatan perempuan dalam politik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, distribusi kehadiran perempuan dalam struktur komisi DPRD masih menunjukkan pola segregatif berbasis gender. Komisi II yang umumnya membawahi urusan

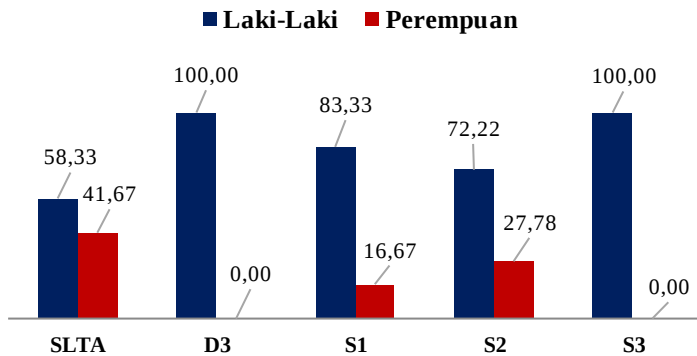
perekonomian, keuangan, dan sumber daya alam, didominasi oleh laki-laki sebesar 80%. Demikian pula Komisi III, yang sering menangani urusan infrastruktur, pekerjaan umum, dan perhubungan, menunjukkan dominasi laki-laki sebesar 78,57%. Sementara itu, perempuan hanya mengambil porsi minoritas dalam dua komisi tersebut, yakni masing-masing 20% dan 21,43%.

Sebaliknya, Komisi IV yang cenderung membidangi sektor-sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, memperlihatkan porsi perempuan yang lebih besar dibanding komisi lainnya, yaitu 40%. Hal ini menunjukkan masih kuatnya pembagian peran berbasis stereotip gender dalam sistem representasi politik lokal. Perempuan cenderung lebih diterima atau didorong untuk berada di sektor-sektor yang dipersepsikan dekat dengan peran tradisional mereka di masyarakat, seperti pengasuhan, sosial, dan layanan masyarakat. Di sisi lain, akses perempuan ke ranah pengambilan kebijakan yang lebih teknokratis dan strategis seperti

anggaran, ekonomi makro, dan pembangunan infrastruktur masih terbatas.

Ketimpangan ini tidak hanya menjadi masalah representasi numerik, tetapi juga berimplikasi pada kualitas keberpihakan kebijakan. Rendahnya representasi perempuan di komisi-komisi strategis berpotensi membuat perspektif gender kurang terakomodasi secara menyeluruh dalam perumusan dan pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Hal ini dapat memperbesar jurang ketimpangan struktural dan memperlambat agenda pengarusutamaan gender (PUG) di tingkat legislatif.

Tingkat pendidikan anggota DPRD merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kapasitas legislator dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Dalam konteks representasi gender, perbedaan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan anggota DPRD juga dapat mencerminkan hambatan struktural dan sosial yang masih dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan tinggi dan jabatan politik secara bersamaan.



Gambar 8.7 Komposisi Anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan gambar 8.7, terlihat bahwa anggota DPRD Kota Bogor Tahun 2024 sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, dengan dominasi pada jenjang S1 dan S2. Namun, terdapat ketimpangan yang signifikan ketika data ini ditelisik berdasarkan jenis kelamin. Pada jenjang pendidikan S1, laki-laki mencakup 83,33% dari total anggota DPRD dengan gelar tersebut, sedangkan perempuan hanya 16,67%. Ketimpangan ini berlanjut pada jenjang S2, di mana laki-laki mendominasi dengan 72,22% dan perempuan hanya

27,78%. Bahkan pada jenjang pendidikan tertinggi, yakni S3, seluruhnya diisi oleh laki-laki (100%), sementara perempuan tidak terwakili sama sekali.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan telah berhasil masuk ke lembaga legislatif, mereka masih menghadapi keterbatasan akses pada jenjang pendidikan tertinggi yang sering kali menjadi prasyarat untuk menempati posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, satu-satunya jenjang pendidikan yang menunjukkan proporsi perempuan relatif tinggi adalah pada tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), yakni sebesar 41,67%. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai keberhasilan sebagian perempuan dalam menembus struktur politik lokal meskipun dengan latar pendidikan yang lebih rendah—namun juga sekaligus menandakan tantangan dalam mengakses pendidikan tinggi secara merata.

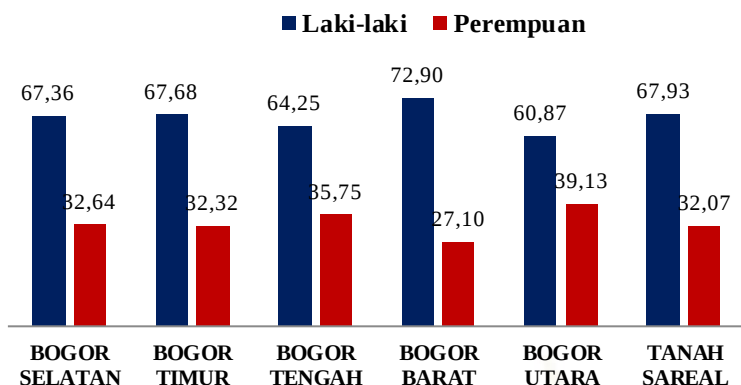
Ketiadaan perempuan pada jenjang D3 dan S3 serta minimnya proporsi mereka pada tingkat S1 dan S2 mengindikasikan adanya kebutuhan untuk

mendorong peningkatan kapasitas pendidikan politikus perempuan. Ketimpangan ini berisiko memperkuat bias struktural yang menganggap laki-laki lebih layak menduduki posisi politik karena latar belakang akademis yang lebih kuat, padahal persoalan akses terhadap pendidikan tinggi kerap tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan beban sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami perempuan.

### **8.3 Musrembang**

Partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) merupakan indikator penting keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks kesetaraan gender, tingkat kehadiran laki-laki dan perempuan dalam Musrembang mencerminkan sejauh mana suara dan kebutuhan keduanya diakomodasi dalam perencanaan kebijakan publik. Data partisipasi Musrembang di Kota Bogor tahun 2024 menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara jumlah

peserta laki-laki dan perempuan di seluruh kecamatan. Ketimpangan ini menegaskan pentingnya upaya afirmatif dan strategi pemberdayaan yang lebih kuat untuk mendorong keterlibatan perempuan secara aktif dalam forum-forum perencanaan pembangunan, agar kebijakan yang dihasilkan merupakan kebijakan yang benar-benar inklusif dan mewakili kepentingan seluruh warga.



Gambar 8.8 Persentase Peserta Musrembang Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan

Sumber: Kecamatan Kota Bogor 2025 (diolah)

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrembang) merupakan indikator penting dari keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik. Namun, jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara laki-laki dan perempuan di Kota Bogor pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa proporsi peserta laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan di seluruh kecamatan. Kecamatan Bogor Barat memiliki kesenjangan paling lebar, dengan 72,90% peserta laki-laki dan hanya 27,10% peserta perempuan. Hal serupa juga tampak di kecamatan lainnya, seperti Bogor Selatan (67,36% laki-laki; 32,64% perempuan), Bogor Timur (67,68% laki-laki; 32,32% perempuan), dan Tanah Sareal (67,93% laki-laki; 32,07% perempuan).

Sementara itu, Bogor Utara menjadi satu-satunya kecamatan dengan partisipasi perempuan yang relatif lebih tinggi (39,13%), meskipun tetap belum melampaui angka partisipasi laki-laki (60,87%). Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa perempuan belum sepenuhnya terwakili dalam

forum-forum strategis pembangunan daerah. Rendahnya partisipasi perempuan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan waktu karena beban ganda, minimnya sosialisasi dan undangan kepada kelompok perempuan, serta belum adanya pendekatan afirmatif yang mendorong representasi setara. Oleh karena itu, diperlukan strategi afirmatif dan fasilitasi partisipasi yang lebih inklusif agar perempuan dapat lebih aktif terlibat dalam proses Musrembang di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota.



**KESETARAAN GENDER  
ADALAH KATALISATOR  
BAGI PERTUMBUHAN  
SOSIAL, EKONOMI, DAN  
POLITIK YANG  
BERKELANJUTAN.**

## **BAB IX**

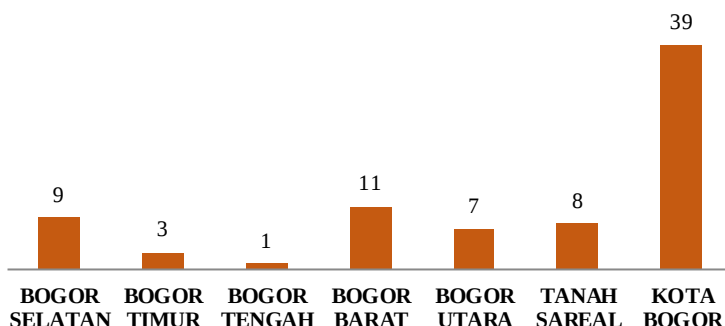
# **TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Isu kekerasan berbasis gender merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, terutama di tingkat lokal. Perempuan, sebagai kelompok yang rentan, kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan baik dalam ranah domestik maupun publik. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual menjadi dua bentuk kekerasan yang paling banyak dialami perempuan, namun sering kali tersembunyi di balik norma sosial dan budaya yang patriarkal.

Kota Bogor, sebagai wilayah urban dengan kompleksitas sosial yang tinggi, tidak terlepas dari persoalan ini. Meskipun telah tersedia layanan pengaduan dan perlindungan, fenomena kekerasan terhadap perempuan masih menunjukkan angka yang memprihatinkan dan memerlukan penanganan yang lebih sistemik serta berbasis data.

## **9.1 KDRT dan Kekerasan Seksual**

Data pada gambar 9.1 menyajikan sebaran jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual yang dialami perempuan di enam kecamatan di Kota Bogor sepanjang tahun 2024. Informasi ini dihimpun oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai bagian dari sistem pencatatan kekerasan berbasis gender di tingkat kota. Pemaparan data ini penting untuk menunjukkan wilayah-wilayah dengan tingkat pelaporan yang tinggi, yang dapat mencerminkan tingginya angka kekerasan atau justru akses yang lebih terbuka terhadap pelaporan dan layanan. Selain itu, persebaran data ini juga menjadi dasar awal dalam mengidentifikasi konsentrasi kasus serta potensi kesenjangan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kecamatan.



Gambar 9.1 Jumlah KDRT dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Kecamatan

Sumber: UPTD PPA Kota Bogor 2025 (diolah)

Data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Bogor Tahun 2024 menunjukkan distribusi yang tidak merata antar kecamatan, dengan angka tertinggi tercatat di tingkat kota secara agregat, yaitu sebanyak 39 kasus. Angka ini menandakan adanya persoalan serius dalam sistem pelaporan, pencatatan, atau mungkin juga perlindungan yang bersifat lebih terpusat di tingkat kota dibandingkan kecamatan.

Kecamatan Bogor Barat mencatat angka kekerasan tertinggi di tingkat lokal dengan 11 kasus,

disusul oleh Bogor Selatan (9 kasus), Tanah Sareal (8 kasus), dan Bogor Utara (7 kasus). Sementara itu, Bogor Timur dan Bogor Tengah mencatat jumlah yang jauh lebih rendah, masing-masing 3 dan 1 kasus. Meskipun rendahnya angka pada dua kecamatan terakhir dapat diinterpretasikan sebagai indikasi lingkungan yang lebih aman, hal ini juga bisa mencerminkan adanya hambatan budaya atau struktural dalam pelaporan kasus—termasuk ketakutan korban, stigma sosial, atau kurangnya akses terhadap layanan perlindungan.

Kesenjangan antar wilayah ini penting untuk dicermati dalam penyusunan kebijakan perlindungan perempuan yang responsif terhadap konteks lokal. Angka yang tinggi di wilayah seperti Bogor Barat dan Selatan bisa menjadi indikator dari kombinasi faktor seperti kepadatan penduduk, dinamika keluarga, serta ketersediaan (atau justru ketiadaan) mekanisme dukungan komunitas. Sebaliknya, rendahnya pelaporan di beberapa kecamatan harus dikaji ulang melalui pendekatan kualitatif untuk

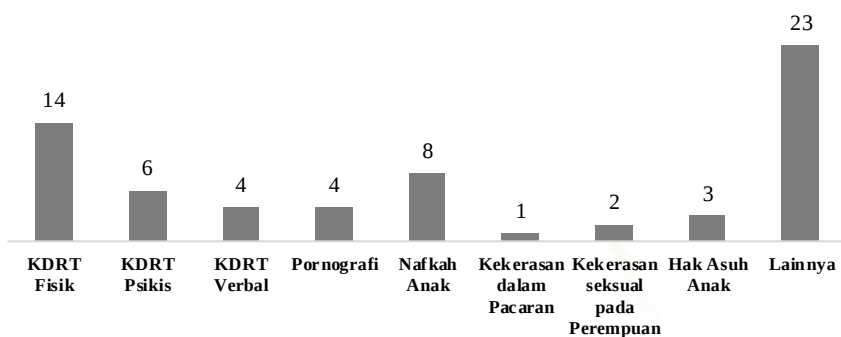
menilai apakah angka tersebut benar mencerminkan kejadian atau justru lemahnya sistem pelaporan.

Temuan ini mempertegas pentingnya penguatan unit layanan perempuan dan anak di tingkat kelurahan/kecamatan, serta perlunya kampanye yang masif untuk mendorong korban agar berani melapor dan mencari bantuan. Strategi preventif seperti edukasi gender, pelibatan tokoh masyarakat, dan integrasi layanan kesehatan–sosial–hukum menjadi sangat mendesak guna mengatasi kekerasan berbasis gender yang kerap tidak terlihat namun berdampak besar terhadap kualitas hidup perempuan di Kota Bogor.

## **9.2 Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu sosial yang kompleks dan multidimensional, mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di berbagai ranah kehidupan. Di Kota Bogor, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan sangat beragam, mulai dari

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis relasi, seperti dalam pacaran. Data menunjukkan bahwa kasus tertinggi dikategorikan sebagai “lainnya”, yang menandakan adanya banyak jenis kekerasan yang mungkin belum terklasifikasi secara spesifik. Disusul oleh KDRT fisik dan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk-bentuk kekerasan yang masih dominan terjadi. Fakta ini mengindikasikan bahwa perempuan masih berada dalam posisi rentan, baik di ruang domestik maupun publik.



Gambar 9.2 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kekerasan

Sumber: UPTD PPA Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Kota Bogor tahun 2024, tampak bahwa kategori “lainnya” menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan dengan total 23 kasus. Hal ini mengindikasikan adanya sejumlah kekerasan yang mungkin belum terklasifikasi secara spesifik dalam sistem pelaporan, atau mencerminkan kompleksitas bentuk kekerasan yang dialami perempuan di luar kerangka konvensional. Di posisi kedua, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) fisik masih mendominasi dengan 14 kasus, menunjukkan bahwa rumah—yang seharusnya menjadi ruang aman—masih menjadi lokasi rawan bagi perempuan. Kekerasan terhadap anak (8 kasus), kekerasan psikis (6 kasus), serta kekerasan verbal dan paparan pornografi (masing-masing 4 kasus) turut menegaskan bahwa perempuan dan anak-anak tetap menjadi kelompok rentan dalam berbagai bentuk relasi sosial.

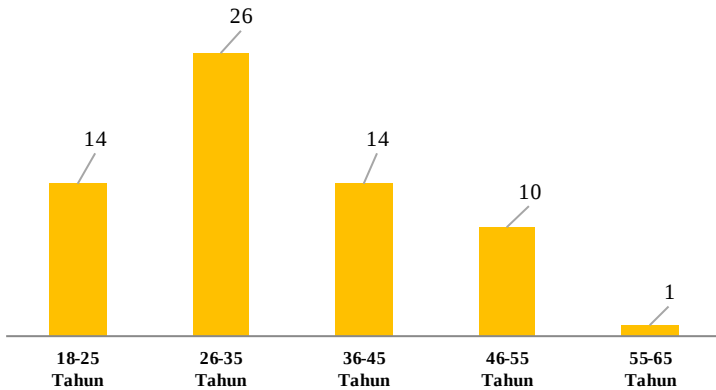
Menariknya, meskipun isu kekerasan seksual dan kekerasan dalam pacaran semakin banyak diangkat dalam wacana publik, jumlah kasus yang

tercatat masih sangat rendah (masing-masing 2 dan 1 kasus). Hal ini bisa jadi bukan karena kekerasan tersebut tidak terjadi, melainkan lebih kepada rendahnya angka pelaporan, baik karena rasa takut, malu, maupun stigma sosial yang masih melekat kuat terhadap korban. Temuan ini menyoroti pentingnya meningkatkan kapasitas layanan pengaduan yang aman, ramah korban, dan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang kerap tersembunyi atau disamarkan. Oleh karena itu, strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan harus disertai dengan pendekatan kultural, edukasi kesetaraan gender sejak dini, serta penegakan hukum yang lebih berpihak kepada korban.

### **9.3 Korban Kekerasan Berdasarkan Kelompok Usia**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu serius yang memerlukan perhatian lintas sektor, terutama ketika ditinjau berdasarkan kelompok usia. Setiap tahapan usia perempuan membawa tantangan dan kerentanan yang berbeda, yang turut

memengaruhi pola dan jenis kekerasan yang dialami. Data Kota Bogor tahun 2024 menunjukkan gambaran konkrit mengenai kelompok usia perempuan yang paling rentan menjadi korban kekerasan, sekaligus menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis usia.



**Gambar 9.3** Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Usia

Sumber: UPTD PPA Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik pada gambar 9.3, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kelompok usia di Kota Bogor tahun 2024, terlihat bahwa kelompok usia 26–35 tahun merupakan yang

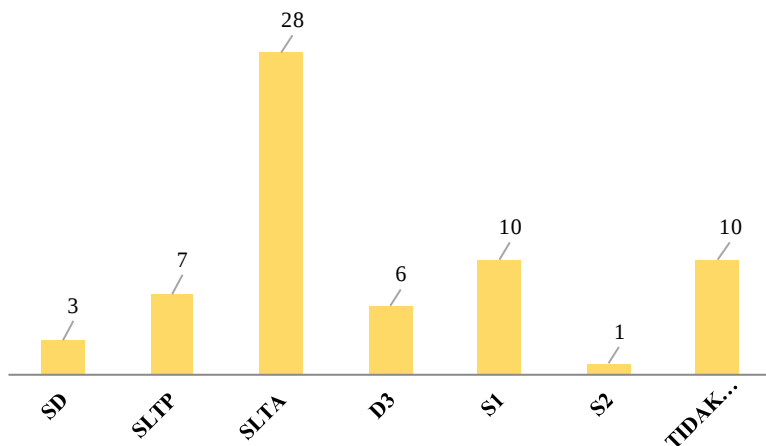
paling rentan menjadi korban dengan jumlah kasus mencapai 26. Hal ini mencerminkan bahwa perempuan dalam usia produktif, yang umumnya tengah aktif dalam kehidupan kerja dan keluarga, justru menghadapi risiko kekerasan yang lebih tinggi. Kelompok usia 18–25 tahun dan 36–45 tahun juga menunjukkan jumlah kasus yang sama besar (masing-masing 14 kasus), menandakan bahwa ancaman kekerasan tidak terbatas pada usia tertentu, melainkan menyebar di fase-fase awal hingga pertengahan usia dewasa.

Sementara itu, kelompok usia 46–55 tahun mencatat 10 kasus, dan angka kekerasan menurun drastis pada kelompok usia 55–65 tahun dengan hanya 1 kasus. Penurunan ini bisa diartikan sebagai menurunnya eksposur terhadap lingkungan berisiko, namun bisa juga mencerminkan kecenderungan korban lansia untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena faktor ketergantungan atau norma budaya. Secara umum, data ini memperkuat urgensi perlindungan perempuan dalam usia produktif, serta pentingnya sistem pendukung dan

upaya pencegahan kekerasan berbasis usia dan siklus kehidupan yang komprehensif.

#### **9.4 Korban Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan risiko serta kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Pendidikan tidak hanya membuka akses terhadap informasi dan sumber daya, tetapi juga berperan dalam membentuk kesadaran diri, kemampuan mengambil keputusan, serta keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan. Meski demikian, data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada satu jenjang pendidikan saja, melainkan tersebar di berbagai tingkat pendidikan, termasuk pada mereka yang berpendidikan tinggi. Fakta ini menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi masalah struktural yang tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, melainkan juga oleh norma dan relasi kuasa yang masih timpang dalam masyarakat.



Gambar 9.4 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sumber: UPTD PPA Kota Bogor 2025 (diolah)

Data menunjukkan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan SLTA merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan, yaitu sebanyak 28 orang. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pendidikan lainnya, termasuk pendidikan tinggi seperti D3 (6 orang), S1 (10 orang), dan S2 (1 orang). Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pendidikan dapat menjadi faktor pelindung, perempuan dengan pendidikan menengah masih menghadapi

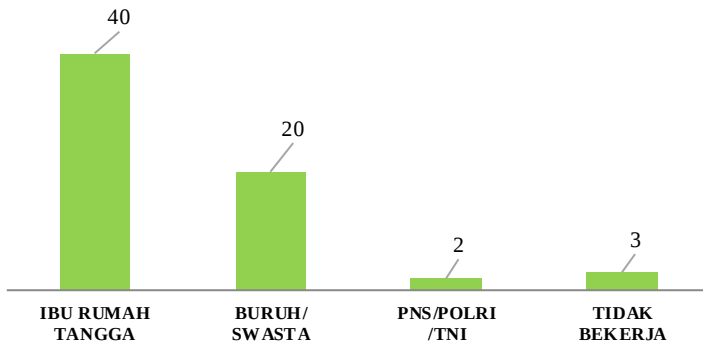
kerentanan yang cukup tinggi. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena kelompok ini berada dalam usia produktif dan aktif secara sosial maupun ekonomi, namun belum memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam relasi sosial, ekonomi, maupun domestik.

Selain itu, terdapat pula 10 kasus dari korban yang tingkat pendidikannya tidak diketahui, yang menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam pendataan dan pelaporan. Fenomena ini menegaskan pentingnya intervensi yang tidak hanya fokus pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga penguatan kesadaran gender dan sistem perlindungan yang responsif di semua jenjang pendidikan.

## **9.5 Korban Kekerasan Berdasarkan Status Pekerjaan**

Status pekerjaan merupakan salah satu faktor sosial yang dapat memengaruhi tingkat kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Dalam konteks ini, pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas

ekonomi, tetapi juga dengan posisi sosial, akses terhadap sumber daya, serta dinamika relasi kuasa di lingkungan kerja maupun rumah tangga. Data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan status pekerjaan memberikan gambaran penting mengenai kelompok-kelompok perempuan yang lebih rentan menjadi korban, sekaligus mencerminkan kondisi struktural yang memerlukan perhatian serius dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan.



Gambar 9.5 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Status Pekerjaan

Sumber: UPTD PPA Kota Bogor 2025 (diolah)

Data pada gambar 9.5 menunjukkan bahwa perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga merupakan kelompok paling rentan terhadap

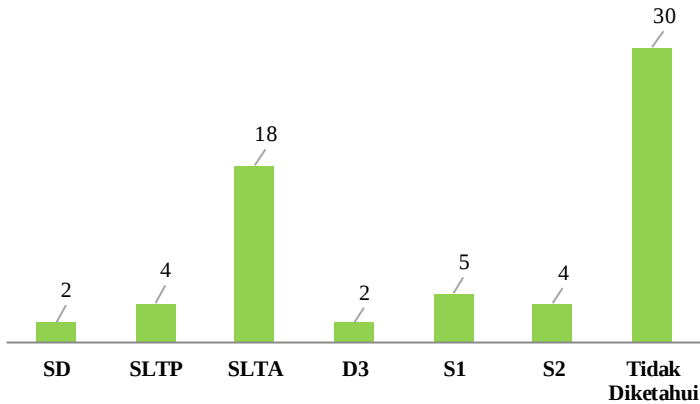
kekerasan, dengan jumlah korban mencapai 40 orang. Hal ini dapat mencerminkan posisi perempuan dalam ranah domestik yang kerap tidak diimbangi dengan perlindungan hukum dan sosial yang memadai. Selain itu, perempuan dengan status sebagai buruh atau pekerja swasta menempati urutan kedua dengan 20 korban, mengindikasikan bahwa ruang kerja pun belum sepenuhnya aman dari potensi kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan seksual, psikis, maupun ekonomi.

Jumlah korban dari kalangan PNS/TNI/Polri relatif rendah (2 orang), namun hal ini belum tentu mencerminkan kondisi yang lebih aman, melainkan bisa juga terkait dengan relasi kuasa dan kecenderungan untuk tidak melaporkan kasus karena stigma atau risiko profesional. Sementara itu, terdapat pula korban dari kelompok yang tidak bekerja (3 orang), yang menunjukkan bahwa kekerasan bisa terjadi lintas status sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, distribusi data ini mempertegas bahwa status pekerjaan berpengaruh terhadap pola dan intensitas kekerasan terhadap

perempuan, sekaligus menuntut pendekatan perlindungan yang lebih komprehensif, baik di ruang domestik maupun publik.

## **9.6 Pelaku Kekerasan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan sering dianggap sebagai salah satu instrumen penting dalam membentuk perilaku dan kesadaran sosial, termasuk dalam hal mencegah kekerasan berbasis gender. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak selalu berkorelasi langsung dengan rendahnya tingkat pendidikan pelaku. Data jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan berdasarkan tingkat pendidikan memberikan gambaran penting mengenai latar belakang pendidikan para pelaku, serta membuka ruang refleksi atas efektivitas pendidikan dalam membentuk nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.



Gambar 9.6 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: UPTD PPA Kota Bogor 2025 (diolah)

Data pada gambar 9.6 memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan di Kota Bogor pada tahun 2024 paling banyak berasal dari kelompok yang tingkat pendidikannya tidak diketahui, yakni sebanyak 30 kasus. Tingginya angka ini menunjukkan adanya kendala dalam proses dokumentasi atau pelaporan, yang bisa menghambat upaya analisis mendalam dan perumusan kebijakan yang berbasis bukti. Di luar kategori tersebut, pelaku dengan latar belakang pendidikan SLTA tercatat sebagai yang tertinggi (18

orang), diikuti oleh lulusan S1 (5 orang), SLTP dan S2 (masing-masing 4 orang), serta SD dan D3 (masing-masing 2 orang).

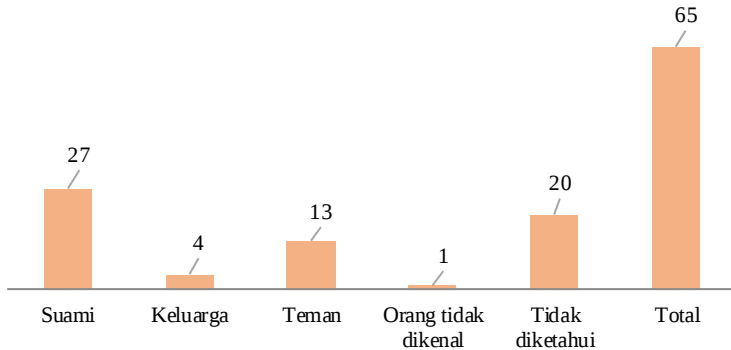
Sebaran ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dilakukan oleh individu dengan pendidikan rendah, tetapi juga oleh mereka yang memiliki akses ke pendidikan menengah bahkan tinggi. Fakta ini memperkuat pemahaman bahwa pendidikan formal belum secara otomatis menjamin terbentuknya kesadaran gender, empati, atau nilai-nilai anti-kekerasan. Selain itu, pendekatan pendidikan yang terlalu berfokus pada aspek kognitif dan pencapaian akademik tanpa menyentuh nilai-nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia mungkin berkontribusi pada kegagalan membentuk perilaku yang menghormati perempuan.

Dengan demikian, penting bagi institusi pendidikan dan lembaga sosial untuk lebih menekankan pendidikan nilai dan kesadaran gender sejak usia dini. Di sisi lain, perbaikan sistem pelaporan dan pencatatan data juga menjadi aspek

krusial, agar setiap kasus dapat dianalisis secara utuh dan menjadi dasar dalam merancang strategi pencegahan kekerasan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

### **9.7 Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan Dengan Korban**

Hubungan antara korban dan pelaku merupakan salah satu aspek penting dalam memahami dinamika kekerasan terhadap perempuan. Relasi ini tidak hanya menentukan pola kekerasan yang terjadi, tetapi juga memengaruhi proses pelaporan, penanganan, dan pemulihan korban. Dalam konteks kekerasan berbasis gender, pelaku tidak selalu datang dari luar lingkungan korban—justru sering kali berasal dari lingkaran terdekat. Oleh karena itu, pemetaan hubungan antara korban dan pelaku menjadi langkah krusial dalam merancang intervensi yang efektif, membangun sistem dukungan yang sensitif, serta mengidentifikasi celah perlindungan yang masih ada dalam masyarakat.

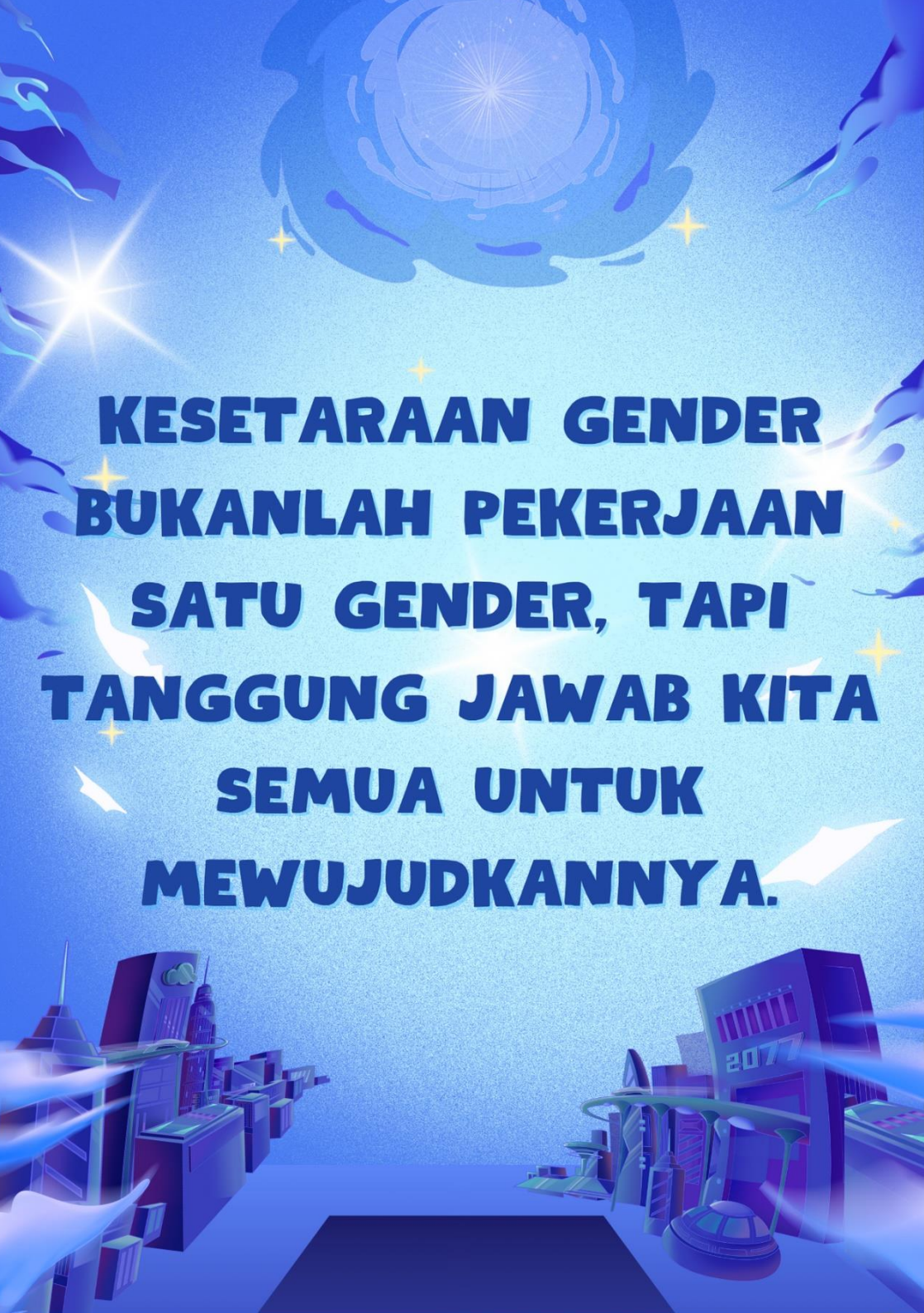


Gambar 9.7 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bogor Tahun 2024 Berdasarkan Hubungan Dengan Korban  
Sumber: UPTD PPA Kota Bogor 2025 (diolah)

Data pada gambar 9.7 mengenai jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hubungan dengan korban menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku merupakan suami dari korban, yaitu sebanyak 27 orang. Temuan ini menguatkan realitas bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan terhadap perempuan. Selain suami, pelaku yang berasal dari lingkungan teman berjumlah 13 orang, yang mengindikasikan bahwa kekerasan juga dapat terjadi dalam hubungan yang diasumsikan memiliki kedekatan atau rasa saling percaya.

Menariknya, hanya 1 kasus yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, yang berarti sebagian besar kekerasan dilakukan oleh orang terdekat korban.

Selain itu, terdapat 4 pelaku yang berasal dari keluarga dan 20 pelaku yang tidak diketahui hubungannya dengan korban. Kategori “tidak diketahui” ini kembali menyoroti tantangan dalam pelaporan dan pendokumentasian kasus kekerasan secara rinci. Tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh pasangan atau orang dekat mencerminkan dinamika relasi kuasa dan ketimpangan gender dalam ruang domestik. Oleh karena itu, penting untuk terus menguatkan upaya preventif, edukasi kesetaraan gender dalam keluarga, serta memperluas jangkauan layanan aduan dan perlindungan agar perempuan berani melapor meski pelaku adalah orang terdekat.



**KESETARAAN GENDER  
BUKANLAH PEKERJAAN  
SATU GENDER, TAPI  
TANGGUNG JAWAB KITA  
SEMUA UNTUK  
MEWUJUDKANNYA.**

# **BAB X**

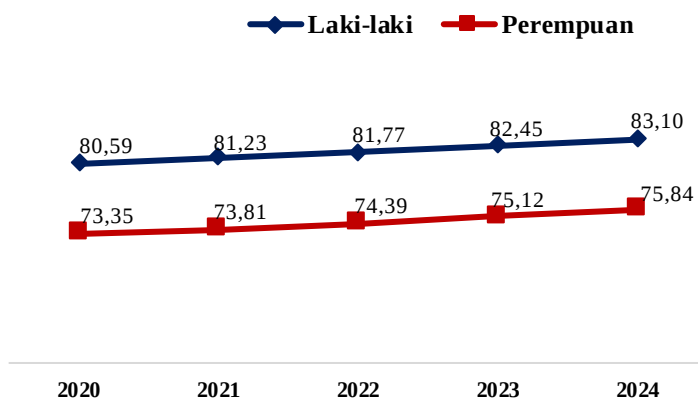
## **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, INDEKS PEMBANGUNAN GENDER, INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER, DAN INDEKS KETIMPANGAN GENDER**

### **10.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IPM mencerminkan pencapaian rata-rata dari tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (diukur melalui angka harapan hidup saat lahir), pengetahuan (dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur melalui pendapatan per kapita yang disesuaikan).

Dengan nilai yang berkisar antara 0 hingga 100, IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana suatu daerah mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan penduduknya hidup

produktif dan bermartabat. Oleh karena itu, IPM tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah, tetapi juga dasar perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh.



Gambar 10.1 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2020-2024

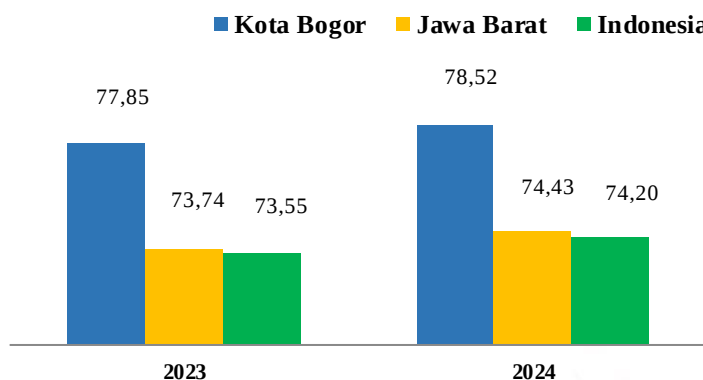
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor menunjukkan tren peningkatan secara konsisten, baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2020, IPM laki-laki berada di angka 80,59 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai

83,10 pada tahun 2024. Hal serupa terjadi pada penduduk perempuan, yang mengalami kenaikan dari 73,35 menjadi 75,84 dalam periode yang sama. Peningkatan ini menandakan adanya kemajuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat secara umum. Namun demikian, jarak antara IPM laki-laki dan perempuan masih cukup lebar, yakni berkisar antara 7 hingga 8 poin setiap tahunnya. Ketimpangan ini menandakan bahwa meskipun perempuan juga mengalami peningkatan kualitas hidup, mereka belum mendapatkan akses dan hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki.

Selisih IPM tersebut menjadi indikasi bahwa pembangunan di Kota Bogor masih menghadapi tantangan dalam hal kesetaraan gender. Faktor-faktor seperti beban ganda perempuan, keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi dan pekerjaan yang layak, serta norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan turut mempengaruhi capaian IPM mereka. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan untuk tidak hanya mendorong peningkatan IPM secara umum, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan tersebut bersifat inklusif dan responsif gender. Upaya afirmatif seperti program pemberdayaan perempuan, peningkatan akses layanan dasar, serta kebijakan yang mendukung partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor kehidupan perlu terus diperkuat demi mengejar ketertinggalan dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh warga Kota Bogor.



Gambar 10.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2023-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa IPM Kota Bogor secara konsisten berada di atas rata-rata provinsi Jawa Barat maupun nasional. Pada tahun 2023, IPM Kota Bogor tercatat sebesar 77,85, lebih tinggi dari Jawa Barat (73,74) dan Indonesia (73,55). Tren ini berlanjut pada tahun 2024, di mana IPM Kota Bogor meningkat menjadi 78,52, sementara Jawa Barat dan Indonesia masing-masing mencatat angka 74,43 dan 74,20. Capaian ini menggambarkan bahwa Kota Bogor memiliki capaian pembangunan manusia yang relatif lebih baik, yang bisa jadi disebabkan oleh kualitas pendidikan yang lebih tinggi, pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau dan merata, serta tingkat pendapatan masyarakat yang lebih baik dibandingkan wilayah lain.

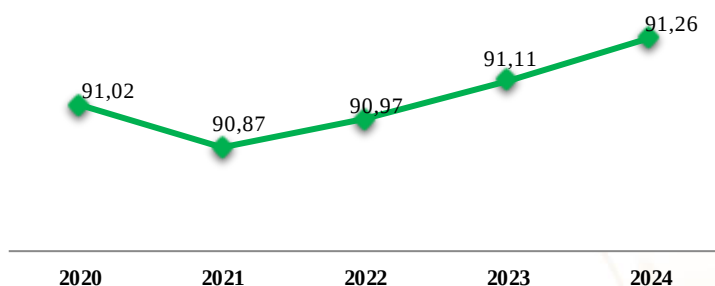
Namun, keunggulan Kota Bogor dalam capaian IPM ini tetap harus dibaca secara kritis. Meskipun lebih tinggi secara agregat, masih terdapat kesenjangan internal, terutama dalam hal kesetaraan gender sebagaimana terlihat dalam grafik sebelumnya. Selain itu, penting untuk memastikan

bahwa peningkatan IPM tidak hanya bersifat simbolik atau tertumpu pada wilayah-wilayah tertentu saja, melainkan benar-benar mencerminkan pemerataan kualitas hidup di seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, tantangan selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan laju pertumbuhan IPM yang inklusif dan berkeadilan secara sosial dan gender.

## **10.2 Indeks Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Indeks ini menyoroiti perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dengan kata lain, IPG mencerminkan sejauh mana perempuan memperoleh manfaat yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Nilai IPG yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam pembangunan semakin kecil, artinya perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang hampir setara untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPG, maka semakin besar ketimpangan gender yang terjadi. Oleh karena itu, IPG tidak hanya menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan, tetapi juga menjadi cerminan dari keberhasilan suatu daerah dalam menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh penduduknya tanpa memandang jenis kelamin.



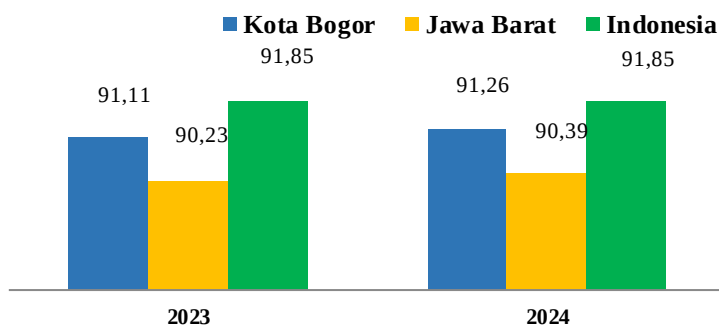
Gambar 10.3 Indeks Pembangunan Gender Kota Bogor Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Perkembangan IPG Kota Bogor dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan yang cukup stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 91,02 dan mengalami penurunan tipis menjadi 90,87 pada tahun 2021. Penurunan ini bisa mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses atau capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, meskipun tidak signifikan. Namun, dalam tiga tahun berikutnya, tren IPG menunjukkan arah yang positif, dengan angka yang terus meningkat: 90,97 pada 2022, 91,11 pada 2023, dan mencapai 91,26 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan relatif dalam capaian pembangunan perempuan dibandingkan laki-laki, terutama dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Meskipun secara umum IPG Kota Bogor berada pada level tinggi, stabilitas angka tersebut juga mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesetaraan gender masih berjalan secara gradual dan belum menunjukkan lompatan signifikan. Artinya,

kesetaraan dalam hasil pembangunan belum sepenuhnya tercapai, dan perempuan masih menghadapi tantangan struktural dalam mengakses peluang yang setara. Dengan strategi yang lebih terarah, IPG diharapkan tidak hanya naik secara angka, tetapi juga mencerminkan transformasi nyata dalam kehidupan perempuan di Kota Bogor.



Gambar 10.4 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kota Bogor Tahun 2023 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Perbandingan IPG Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa Kota Bogor secara konsisten memiliki indeks yang lebih tinggi dibandingkan dua wilayah pembandingnya. Pada tahun 2023, IPG Kota

Bogor mencapai angka tertinggi dibandingkan Jawa Barat dan Indonesia, yang masing-masing tertinggal cukup jauh. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kota Bogor relatif lebih kecil. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2024, di mana IPG Kota Bogor tetap lebih unggul dan mengalami peningkatan, sementara IPG Jawa Barat dan Indonesia juga menunjukkan kenaikan namun masih berada di bawah capaian Kota Bogor.

Capaian IPG yang lebih tinggi ini menunjukkan keberhasilan relatif Kota Bogor dalam mewujudkan pembangunan yang lebih setara gender, khususnya dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun demikian, posisi unggul Kota Bogor bukan berarti bahwa kesetaraan gender telah tercapai sepenuhnya, melainkan menunjukkan bahwa Kota Bogor berada dalam jalur yang lebih progresif. Tantangannya kini adalah mempertahankan dan meningkatkan angka IPG tersebut melalui kebijakan yang konsisten, responsif gender, serta upaya konkret dalam menghapus hambatan struktural yang

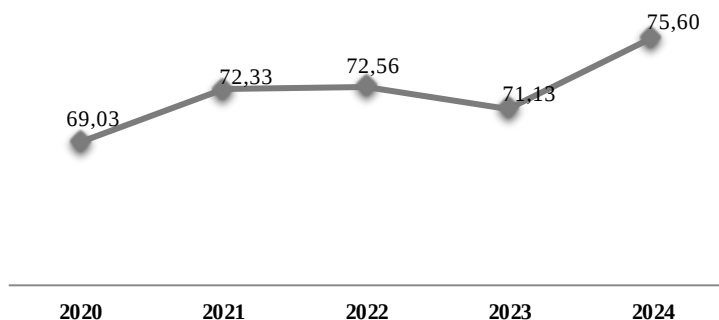
masih dihadapi perempuan, agar pembangunan benar-benar bersifat inklusif dan berkeadilan.

### **10.3 Indeks Pemberdayaan Gender**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik serta memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat. Tidak hanya melihat dari sisi kesejahteraan, IDG menyoroti aspek keterlibatan perempuan dalam struktur kekuasaan dan kepemimpinan, termasuk representasi di parlemen, partisipasi dalam angkatan kerja profesional, teknis, dan manajerial, serta penghasilan perempuan dibandingkan laki-laki.

Dengan kata lain, IDG menunjukkan tingkat peluang yang dimiliki perempuan untuk memberdayakan diri dan memperoleh posisi strategis dalam masyarakat. Nilai IDG yang tinggi mencerminkan adanya kemajuan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam aspek akses,

kontrol, dan pengaruh terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan, yang menjadi fondasi penting dalam pencapaian pembangunan yang adil dan inklusif.



Gambar 10.5 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bogor Tahun 2020-2024

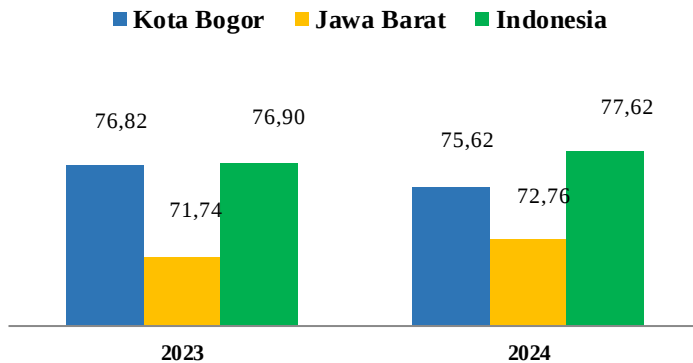
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Data IDG Kota Bogor tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif fluktuatif namun secara keseluruhan mengarah pada peningkatan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2020, IDG berada di angka 69,03 dan melonjak signifikan pada 2021 menjadi 72,33. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan peluang perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan

keputusan strategis. Tahun 2022 mencatat peningkatan kecil menjadi 72,56, namun tahun berikutnya sempat mengalami penurunan ke angka 71,13, yang dapat menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan capaian pemberdayaan gender secara konsisten. Kendati demikian, tahun 2024 menunjukkan lonjakan tertinggi selama lima tahun terakhir, dengan IDG mencapai 75,60.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara bertahap perempuan di Kota Bogor mulai mendapatkan ruang yang lebih besar dalam struktur kekuasaan dan ekonomi. Namun, fluktuasi nilai IDG juga mengindikasikan bahwa pemberdayaan perempuan belum sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik, kebijakan publik, serta budaya patriarki yang mungkin masih kuat dalam masyarakat. Diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya memiliki akses terhadap kesempatan, tetapi juga

diberdayakan secara setara dan berkelanjutan dalam semua lini kehidupan. Selain itu, penting untuk memperkuat kebijakan afirmatif dan pengarusutamaan gender agar capaian IDG tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan berdampak jangka panjang terhadap pembangunan inklusif.



Gambar 10.6 Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bogor Tahun 2023 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bogor pada tahun 2023 tercatat sebesar 76,82, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 76,90 namun jauh lebih tinggi daripada Jawa

Barat yang hanya mencapai 71,74. Pada tahun 2024, IDG Kota Bogor mengalami sedikit penurunan menjadi 75,62, sementara Jawa Barat justru menunjukkan peningkatan menjadi 72,76 dan Indonesia mencatat angka tertinggi sebesar 77,62. Data ini menunjukkan bahwa Kota Bogor masih berada di atas provinsi induknya dalam hal pemberdayaan gender, namun mulai tertinggal dari capaian nasional pada tahun terakhir.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum Kota Bogor memiliki kinerja pemberdayaan perempuan yang cukup baik, namun tantangan dalam mempertahankan kemajuan tersebut tetap ada. Penurunan IDG Kota Bogor pada 2024 dapat menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap efektivitas program-program pengarusutamaan gender yang telah berjalan. Apalagi, di tengah peningkatan IDG di tingkat provinsi dan nasional, stagnasi atau penurunan capaian lokal dapat mengindikasikan perlunya intervensi yang lebih adaptif terhadap konteks dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu,

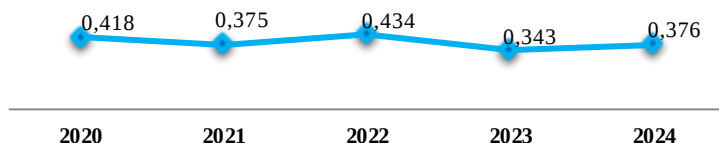
penguatan partisipasi perempuan dalam ruang publik dan pengambilan keputusan, terutama di tingkat lokal, harus menjadi prioritas untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender yang berkelanjutan.

#### **10.4 Indeks Ketimpangan Gender**

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi penting pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin besar ketimpangan gender yang terjadi dalam suatu wilayah, yang berarti perempuan mengalami keterbatasan lebih besar dibanding laki-laki dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta memperoleh manfaat pembangunan.

Sebaliknya, nilai IKG yang rendah mencerminkan kesetaraan yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan dalam ketiga dimensi tersebut. Dalam konteks ini, IKG menjadi alat

penting untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mendorong perumusan kebijakan yang responsif gender guna menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan adil. Sebagai salah satu indikator global yang diadopsi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia, IKG membantu mengarahkan upaya menuju pengurangan ketimpangan dan pencapaian kesetaraan gender yang lebih substansial di berbagai sektor pembangunan.



Gambar 10.7 Indeks Ketimpangan Gender Kota Bogor Tahun 2020 - 2024

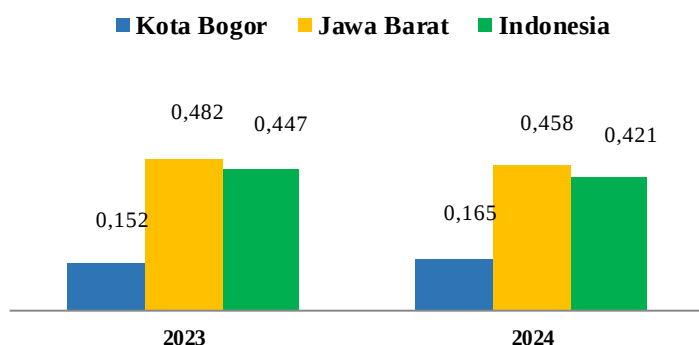
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Bogor selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, nilai IKG tercatat sebesar 0,418 dan

mengalami penurunan pada 2021 menjadi 0,375, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender, terutama terkait partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Namun, angka tersebut kembali meningkat pada 2022 menjadi 0,434, mengindikasikan memburuknya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang bisa disebabkan oleh menurunnya proporsi perempuan dalam posisi strategis atau akses yang tidak merata terhadap sumber daya. Selanjutnya, pada tahun 2023, IKG menurun drastis ke angka 0,343, yang merupakan titik terendah selama lima tahun terakhir dan menandakan pencapaian yang positif dalam mengurangi ketimpangan gender.

Meskipun begitu, pada 2024 terjadi sedikit kenaikan menjadi 0,376. Dinamika ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kota Bogor masih terus berlangsung. Perubahan nilai yang naik-turun juga dapat menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam kebijakan atau implementasi

program yang mendukung partisipasi perempuan secara setara dalam berbagai aspek pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih konsisten, terarah, dan berbasis data untuk menurunkan ketimpangan gender secara berkelanjutan, baik melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, ekonomi produktif, maupun posisi kepemimpinan.



Gambar 10.8 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kota Bogor Tahun 2023 - 2024

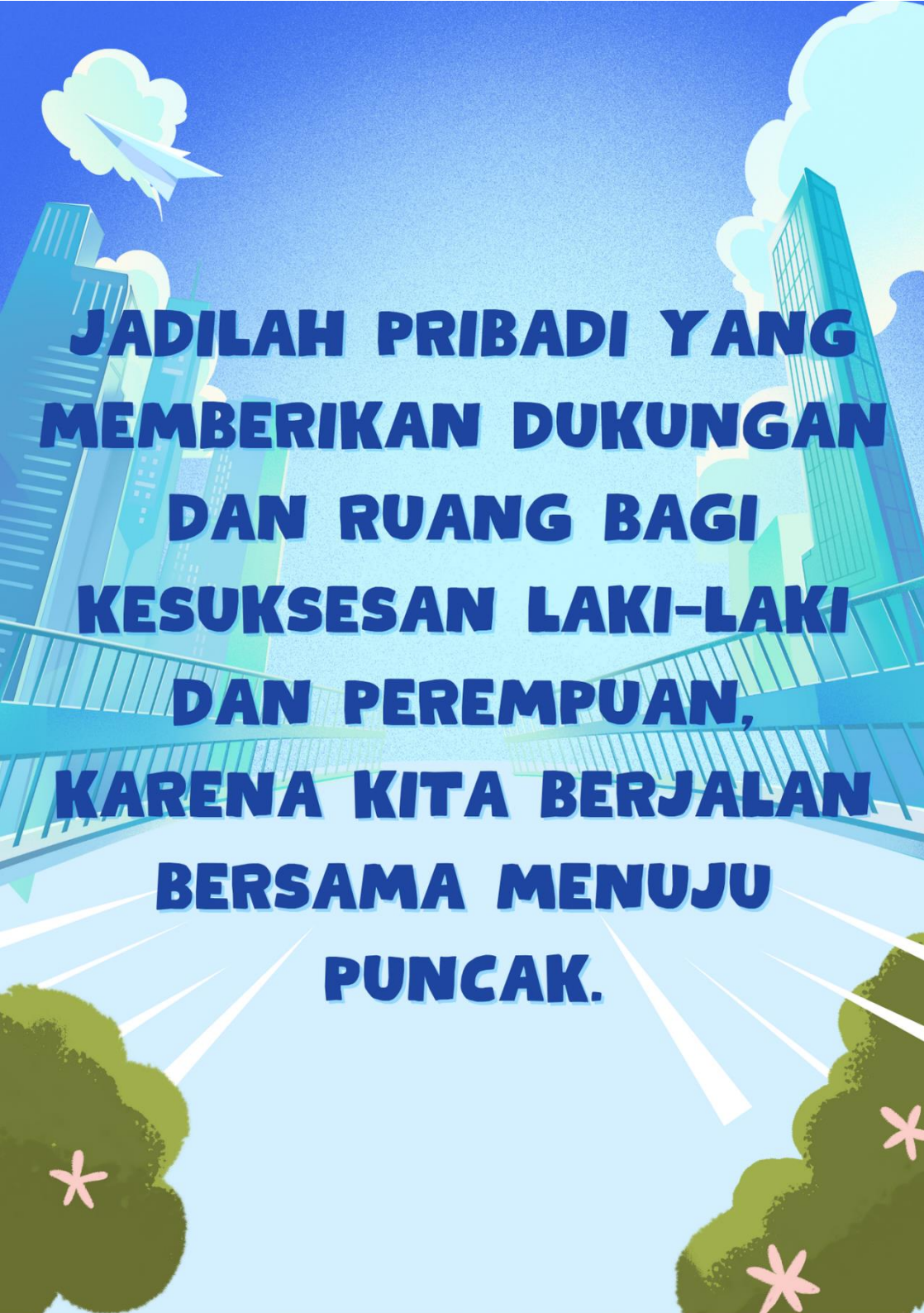
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 2025 (diolah)

Berdasarkan grafik perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) antara Kota Bogor, Jawa Barat, dan Indonesia tahun 2023–2024, terlihat bahwa Kota Bogor memiliki nilai IKG yang jauh lebih

rendah dibandingkan provinsi maupun nasional. Pada tahun 2023, IKG Kota Bogor berada di angka 0,152, sedangkan Jawa Barat sebesar 0,482 dan nasional 0,447. Begitu pula di tahun 2024, Kota Bogor mencatat angka 0,165, sementara Jawa Barat dan Indonesia masing-masing sebesar 0,458 dan 0,421. Nilai IKG yang rendah menandakan tingkat ketimpangan gender yang juga rendah—dengan kata lain, Kota Bogor dinilai berhasil menjaga keseimbangan akses dan partisipasi perempuan dalam bidang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan peran ekonomi maupun politik.

Meskipun begitu, peningkatan nilai dari 0,152 menjadi 0,165 dalam satu tahun perlu menjadi perhatian, sebab tren kenaikan menunjukkan adanya potensi memburuknya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, posisi Kota Bogor tergolong progresif dan dapat dijadikan contoh dalam pelaksanaan kebijakan kesetaraan gender yang lebih adil dan inklusif. Namun, agar ketimpangan gender tidak kembali melebar, penting bagi pemerintah kota

untuk memperkuat program afirmatif bagi perempuan, khususnya dalam bidang kepemimpinan politik, pekerjaan layak, dan layanan kesehatan yang merata.



**JADILAH PRIBADI YANG  
MEMBERIKAN DUKUNGAN  
DAN RUANG BAGI  
KESUKSESAN LAKI-LAKI  
DAN PEREMPUAN,  
KARENA KITA BERJALAN  
BERSAMA MENUJU  
PUNCAK.**

## **BAB XI**

### **PENUTUP: REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Pembangunan di Kota Bogor merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, yaitu “Terwujudnya masyarakat yang adil, maju, mandiri, dan makmur.” Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam delapan misi strategis pembangunan nasional yang salah satunya menekankan pada pentingnya pemerataan dan keadilan dalam pembangunan, serta penguatan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas manusia dan partisipasi inklusif. Di tingkat lokal, Kota Bogor telah menetapkan arah pembangunannya dalam visi “Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan”, yang berfokus pada transformasi berbasis inovasi, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan seluruh warga.

Dalam konteks ini, upaya mewujudkan pembangunan yang adil dan merata tidak dapat

dilepaskan dari komitmen terhadap kesetaraan gender sebagai salah satu indikator utama kualitas pembangunan manusia. Hasil analisis profil gender Kota Bogor menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan yang nyata antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, akses terhadap teknologi, hingga partisipasi politik dan kepemimpinan. Meskipun terdapat beberapa capaian positif, seperti meningkatnya angka partisipasi sekolah dan akses kesehatan dasar, namun perempuan masih menghadapi hambatan dalam memperoleh hak yang sama dalam pengambilan keputusan, akses sumber daya ekonomi, dan perlindungan sosial yang memadai.

Isu utama yang terus berulang dalam berbagai bab adalah terbatasnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang komprehensif, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini berdampak serius terhadap kemampuan pemerintah dalam merancang program yang benar-benar responsif terhadap

kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan. Selain itu, masih banyak program dan kebijakan yang bersifat netral gender, sehingga berpotensi memperkuat ketimpangan yang telah ada.

Beberapa kendala struktural juga masih menjadi tantangan besar, seperti minimnya pemahaman tentang konsep gender di kalangan aparat, tidak tersedianya analisis gender dalam proses perencanaan, dan masih dominannya partisipasi laki-laki dalam musrenbang serta forum-forum pengambilan keputusan lainnya. Dalam konteks jabatan publik, perempuan juga masih sangat kurang terwakili, terutama di level strategis seperti lurah, ketua RW/RT, pimpinan OPD, dan perwakilan legislatif.

Menjawab persoalan-persoalan tersebut, rekomendasi kebijakan ke depan perlu mengedepankan langkah-langkah strategis dan lintas sektor sebagai berikut:

#### 1. Penguatan Sistem Data dan Analisis Gender

- a. Menyusun sistem pendataan terpilah gender yang terintegrasi antar-OPD, serta

mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan data terpilah.

- b. Menyediakan pelatihan dan panduan teknis tentang analisis gender bagi perencana program di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

## 2. Optimalisasi Penganggaran Responsif Gender (ARG)

- a. Menjadikan ARG sebagai instrumen wajib dalam setiap siklus perencanaan dan penganggaran daerah.
- b. Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan ARG di setiap tahap: penyusunan, pembahasan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran.

## 3. Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan

- a. Menyediakan program pelatihan kepemimpinan, mentoring politik, serta penguatan kapasitas organisasi bagi perempuan di tingkat akar rumput dan lembaga formal.

- b. Menerapkan kebijakan afirmatif di bidang politik dan pemerintahan yang mendorong keterwakilan perempuan secara signifikan.

#### 4. Integrasi Gender dalam Ekonomi Kreatif dan Teknologi

- a. Mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor sains, teknologi, dan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan digital, akses modal usaha, dan dukungan inkubasi bisnis berbasis gender.
- b. Menjamin bahwa transformasi digital dan sains di Kota Bogor tidak memperlebar kesenjangan gender, tetapi menjadi alat pemberdayaan.

#### 5. Perluasan Akses Perlindungan Sosial dan Kesehatan Reproduksi

- a. Menjamin akses layanan dasar bagi perempuan dan kelompok rentan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, lansia, dan warga binaan.
- b. Meningkatkan kapasitas petugas layanan publik (sipir perempuan, tenaga medis,

pekerja sosial) dalam memberikan perlindungan yang ramah gender.

#### 6. Penguatan Kemitraan dan Advokasi Masyarakat Sipil

- a. Membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, media, organisasi perempuan, dan komunitas lokal dalam merancang serta mengevaluasi program pembangunan.
- b. Mengembangkan platform pelaporan dan pengaduan kekerasan berbasis gender yang aman, responsif, dan inklusif.

Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, Kota Bogor tidak hanya akan menjadi kota yang ramah keluarga, tetapi juga menjadi pelopor dalam pembangunan kota modern yang adil dan setara. Transformasi menuju Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan hanya dapat dicapai jika seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berdaya, dan berkontribusi. Untuk itu, pembangunan

responsif gender bukan sekadar pendekatan teknis, tetapi merupakan komitmen moral dan strategis untuk menjamin hak, martabat, dan kesejahteraan seluruh warga Kota Bogor.

**KESETARAAN ITU SEPERTI  
GRAVITASI. KITA  
MEMBUTUHKANNYA  
UNTUK BERDIRI DI BUMI  
INI SEBAGAI PRIA DAN  
WANITA.**



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Direktorat Jenderal. *Kajian Kependudukan*.  
Jakarta (ID): Kementerian Keuangan.
- Barat BPJ. 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Menurut Kabupaten Kota dan Jenis Kelamin  
2020-2022. BPS Provinsi Jawa Barat. [accessed  
2025 Jun 21].
- Bogor B. 2022. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota  
Bogor 2022. Kota Bogor.
- BPS. 2022a. Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut  
Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Tahun),  
2021-2022. [accessed 2025 Jun 18].  
[https://www.bps.go.id/indicator/40/455/1/ang  
ka-harapan-hidup-ahh-menurut-kabupaten-  
kota-dan-jenis-kelamin.html](https://www.bps.go.id/indicator/40/455/1/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html).
- BPS. 2022b. Tingkat Pengangguran Terbuka  
Berdasarkan Jenis Kelamin. BPS. [accessed  
2025 Jun 22].  
[https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view  
\\_data/0000/data/1177/sdgs\\_11/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1177/sdgs_11/1).

BPS. 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin 2021-2022. BPS. [accessed 2025 Jun 21]. <https://www.bps.go.id/indicator/40/462/1/indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-jenis-kelamin.html>.

BPS Kota Bogor. 2024. Kota Bogor dalam Angka 2024. Bogor.

BPS Provinsi Jawa Barat. 2022. [SUPAS 2015] Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota (persen) 2020-2022. [accessed 2025 Jun 22]. <https://jabar.bps.go.id/indicator/6/89/2/-supas-2015-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-kabupaten-kota.html>.

Indonesia PR. 1995. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Indonesia: Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Keluarga DK. 2022. Laporan Kinerja Direktorat Kesehatan Keluarga Tahun 2021. Jakarta.

<https://www.depkes.go.id/article/view/19020100003/hari-kanker-sedunia-2019.html>.

Kemenkes RI. 2014. Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Kemenkes RI. 2020a. Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. In: Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. Jakarta: Keme. p. 6–17.

Kemenkes RI. 2020b. Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Gizi Masyarakat Tahun 2020-2024. 2020th–2025th ed. Jaka: Kemenkes RI.

Kemenkes RI. 2020c. Air dan Kesehatan. Jakarta.

Kemenkes RI. 2022. Rencana Strategis Kemenkes 2020-2024. Indonesia: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan. 2019. Definisi Operasional Juknis Profil Kesehatan Indonesia 2019. In: Juknis Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI. p. 1–80.  
<https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/info-terkini/1-DEFINISI-OPERASIONAL-JUKNIS-PROFIL-KES-2019.pdf>.

Kementerian Sosial RI. 2012. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Indonesia: Kementerian Sosial RI.  
<http://peraturan.go.id/inc/view/11e6c5bb4146bec08414313431373532.html>.

Menteri Sosial RI. 2018. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Indonesia: Kementerian Sosial RI.

Menteri Sosial RI. 2019. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Indonesia: Kementerian Sosial RI.

Perpres. No 18. 2020. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 2020-2024. Kemenkumham.(Januari):2271.

Perpres. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Indonesia: LN.2020/NO.10,  
JDIH.SETKAB.GO.ID : 7 HLM.

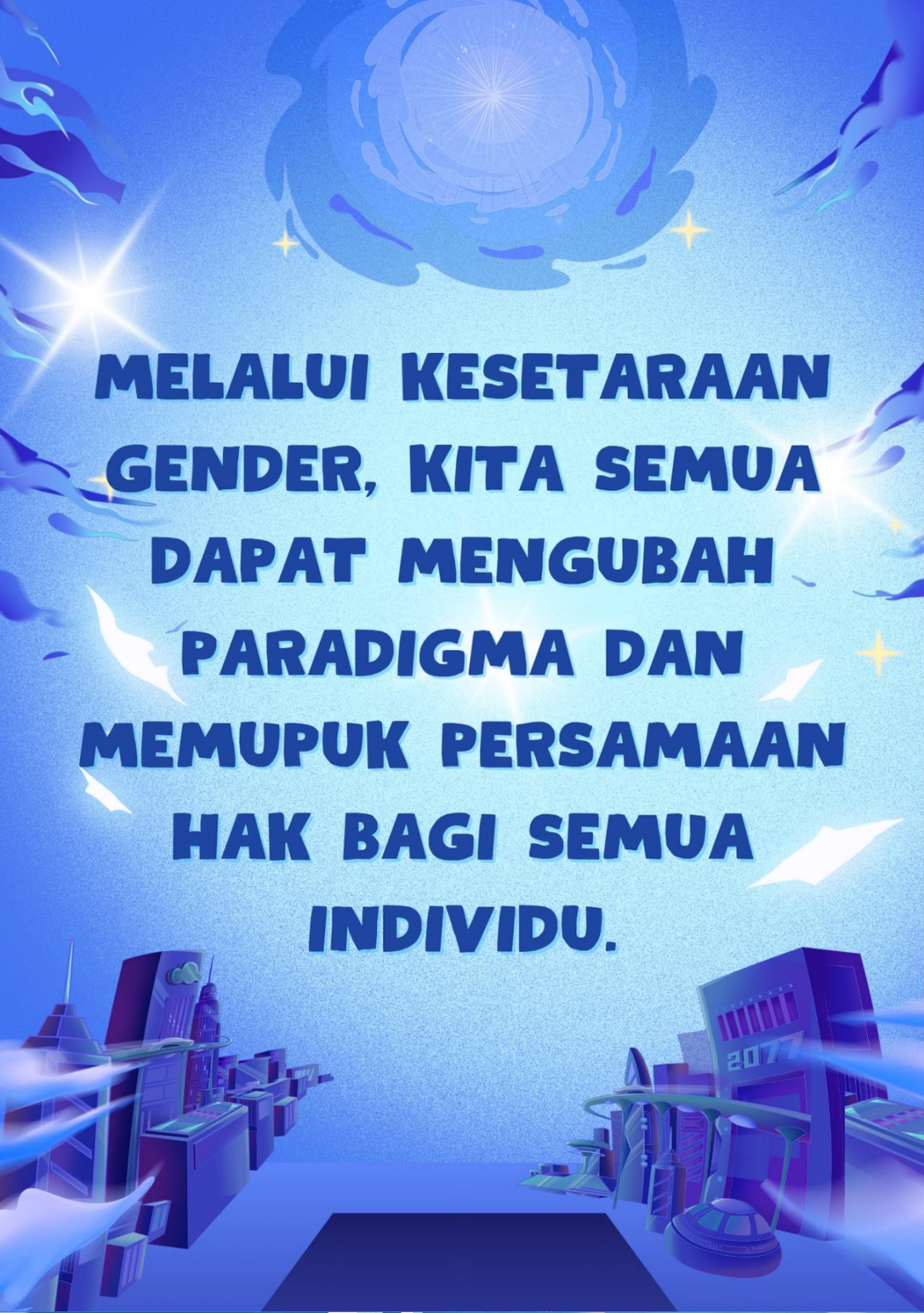
Presiden RI. 2009. Undang Undang Republik  
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika. Indonesia: Presiden RI.

Presiden RI. 2012. Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang  
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.  
Indonesia: Pres.

Presiden RI. 2017. Peraturan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang  
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.  
Indonesia: Presiden RI.

Presiden RI. 2019. Undang Undang Republik  
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang  
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1  
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Indonesia:  
LN.2019/NO.186, TLN NO.6401,  
JDIH.SETNEG.GO.ID : 4 HLM.  
[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122  
740/uu-no-16-tahun-2019.](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019)

RI K. 2015. Permen PPPA RI Nomor 5 Tahun 2015  
Tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang  
Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat  
Kerja. Indonesia: BN 2015 (814): 7 hlm.



**MELALUI KESETARAAN  
GENDER, KITA SEMUA  
DAPAT MENGUBAH  
PARADIGMA DAN  
MEMUPUK PERSAMAAN  
HAK BAGI SEMUA  
INDIVIDU.**

**KESETARAAN BUKANLAH  
HAK ISTIMEWA, TETAPI  
HAK ASASI. MARI  
JADIKAN DUNIA INI LEBIH  
ADIL BAGI SEMUA.**





DP3A  
KOTA BOGOR  
KEMENTERIAN KEMAHASISAAAN  
KEMERIAAN RI